

Seri Memoria Resurrectionis No 1

Membangun Papua Tanah Damai

Orang Muda Papua *Pu Cerita*

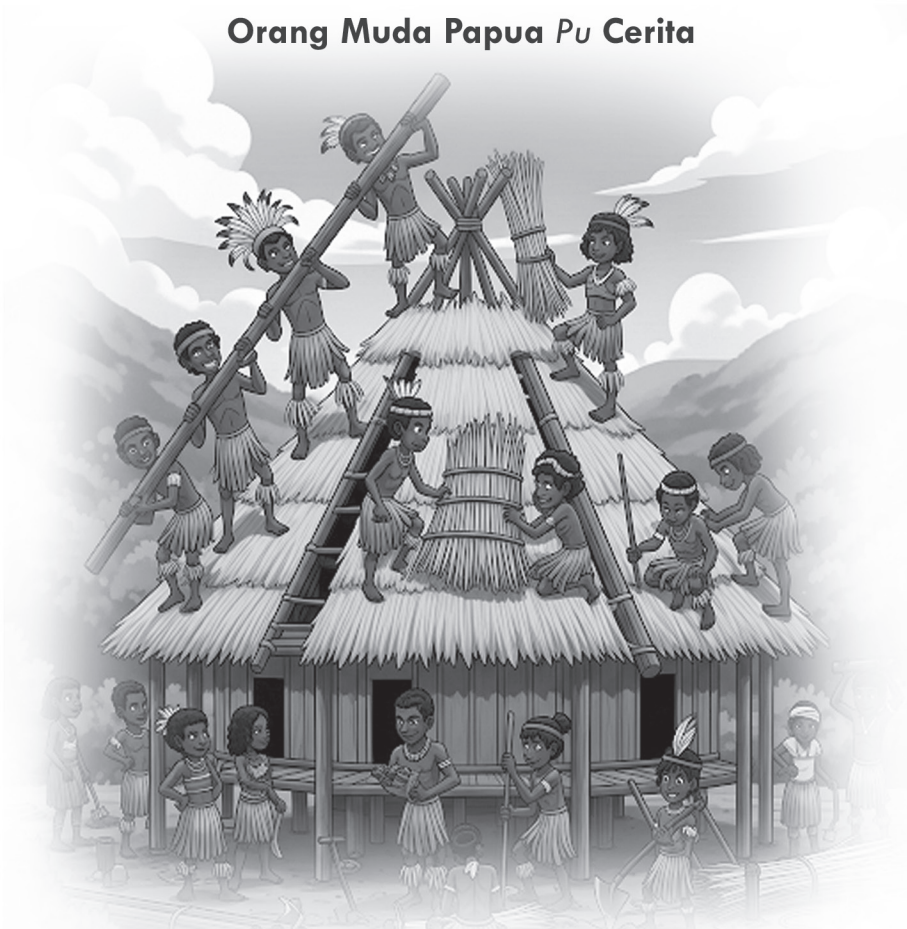


**Kristofel Ajoin, Kurniawan Patma, Oksianus E. Bukega,
Anugrah Amin Ignatius Julio Wejai, Hyasintus Asalang, Debi Debora Okowali,
Monika Bamulki, Yuliana Agustina Youwe & Ferawati Workas,
Fransiskus Bala Kleden, Yohanes Kayame, Ignasius Silubun OFM**

Seri Memoria Resurrectionis No 1

Membangun Papua Tanah Damai

Orang Muda Papua *Pu* Cerita



**Kristofel Ajoin, Kurniawan Patma, Oksianus E. Bukega,
Anugrah Amin Ignatius Julio Wejai, Hyasintus Asalang, Debi Debora Okowali,
Monika Bamulki, Yuliana Agustina Youwe & Ferawati Workas,
Fransiskus Bala Kleden, Yohanes Kayame, Ignasius Silubun OFM**



Justice, Peace, and Integrity of Creation OFM Papua



**Membangun Papua Tanah Damai:
Orang Muda Papua Pu Cerita**

Copyrights©2025, JPIC OFM Papua
Cetakan I, September 2025

Penerbit:

SKPKC Fransiskan Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius Sentani, Jayapura Papua 99352

www.fransiskanpapua.org

Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis : Kristofel Ajoin, Kurniawan Patma, Oksianus E. Bukega, Anugrah
Amin Ignatius Julio Wejai, Hyasintus Asalang, Debi Debora
Okowali, Monika Bamulki, Yuliana Agustina Youwe & Ferawati
Workas, Fransiskus Bala Kleden, Yohanes Kayame, Ignasius
Silubun OFM

Editor : Fr Alexandro Rangka OFM

Layout : Oktavianus

SERI MEMORIA RESURRECTIONIS

Seri *Memoria Resurrectionis* merupakan paralel dari seri *Memoria Passionis*. “*Memoria Resurrectionis*” berasal dari bahasa Latin, di mana “*Memoria*” berarti “ingatan” dan “*Resurrectionis*” merujuk pada “kebangkitan”. Dalam konteks kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, konsep ini dimaknai sebagai upaya untuk mencatat kebangkitan atau pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Jika *Memoria Passionis* berfokus pada penderitaan dan pelanggaran, *Memoria Resurrectionis* berfokus pada perlawanan, pemulihan, dan penghormatan kembali hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, *Memoria Resurrectionis* akan mencatat cerita-cerita baik, kearifan dan pengetahuan lokal Papua, upaya-upaya masyarakat Papua untuk bangkit dari penderitaan dan memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan martabat mereka. Dokumentasi ini mencakup gerakan-gerakan sosial, inisiatif-inisiatif masyarakat sipil, serta langkah-langkah hukum dan politik yang diambil untuk memperbaiki situasi HAM di Papua. Ini menyoroti bagaimana masyarakat Papua terus berjuang untuk memperbaiki keadaan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang sah.

Konsep *Memoria Resurrectionis* membawa harapan dan optimisme, menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggaran dan penderitaan, ada juga kekuatan dan semangat untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak yang sah. Konsep ini menekankan pentingnya harapan dan kebangkitan dalam kehidupan manusia, serta perubahan positif yang mungkin terjadi. Ini menginspirasi gerakan-gerakan sosial dan memotivasi orang untuk bekerja menuju dunia yang lebih baik, meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan, yang terus menyalakan harapan dan semangat kebangkitan di tengah realitas kompleks Tanah Papua. Buku yang kini hadir di tangan pembaca merupakan edisi perdana dari seri *Memoria Resurrectionis*—sebuah inisiatif dokumentatif yang lahir dari kerinduan akan narasi-narasi konstruktif, inspiratif, dan membebaskan yang berasal dari dan untuk orang Papua sendiri.

Penamaan *Memoria Resurrectionis* bukanlah pilihan yang sembarangan. Ia merupakan penyeimbang dari *Memoria Passionis* yang selama ini menandai dokumentasi penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Jika *Memoria Passionis* mencatat luka dan ketidakadilan, maka *Memoria Resurrectionis* berkomitmen untuk mencatat kebangkitan: upaya-upaya pemulihan, perlawanan yang bermartabat, dan gerakan-gerakan sosial yang menyalakan harapan. Ia adalah ruang bagi ingatan yang menyembuhkan, bukan sekadar mengenang, tetapi menghidupkan kembali martabat dan kekuatan orang Papua dalam membangun masa depan yang damai dan adil.

Edisi pertama ini secara khusus memberi ruang bagi suara orang muda Papua. Mereka adalah peserta Lomba Menulis Artikel “Membangun Papua Tanah Damai” yang diselenggarakan pada tahun 2023. Tulisan-tulisan mereka, yang semula tersebar dan berisiko tercecer, kini dikumpulkan dalam satu buku sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka berpikir, merumuskan, dan menyuarakan gagasan tentang perdamaian dari sudut pandang generasi muda. Di dalamnya, kita menemukan refleksi kritis, harapan yang jujur, dan semangat untuk

membumikan damai dalam konteks sosial, budaya, dan politik Papua yang nyata.

Buku ini bukan sekadar antologi artikel. Ia adalah sebuah testimoni kolektif tentang bagaimana orang muda Papua memaknai dan mengupayakan perdamaian. Di tengah tantangan struktural dan sejarah panjang konflik, mereka memilih untuk menulis, berdialog, dan membangun narasi alternatif. Ini adalah bentuk produksi pengetahuan yang tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga strategis secara kultural dan spiritual.

JPIC OFM Papua memandang karya ini sebagai bagian dari gerakan pastoral ekologi dan keutuhan ciptaan Tuhan. Ia menyuarakan keadilan ekologis, martabat manusia, dan spiritualitas perdamaian yang berakar dalam konteks Papua. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi, refleksi, dan aksi bagi siapa pun yang mencintai Papua dan percaya bahwa damai bukan sekadar slogan, melainkan jalan hidup yang harus diperjuangkan bersama.

Sentani, 31 Agustus 2025
Fr Alexandro Ranga, OFM



Direktur JPIC OFM Papua

DAFTAR ISI

<i>Seri Memoria Resurrectionis</i>	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
<i>Sa Pu Bapa Pu</i> Cerita Tentang Bangun Wc Karena <i>Suanggi</i> : Alih-Ubah Sebagai Jalan Damai untuk Hidup Orang Mpur di Tanah Papua.....	1
<i>Kristofel Ajo</i>	
Proyek <i>Dia-Lo-Gue</i> : Membumi (Hangus)-Kan Damai di Papua.....	9
<i>Kurniawan Patma</i>	
Membangun Kembali Budaya Hidup Damai di Papua Lewat Dialog ...	18
<i>Oksianus E. Bukega</i>	
Historisitas, Kontekstualisasi, Dan Rekonstruksi: Pembangunan Peradaban Di Tanah Papua	26
<i>Anugrah Amin Ignatius Julio Wejai</i>	
Tanah Papua: Merayakan Perdamaian Atau Menghilang dalam Represi Kebijakan?	40
<i>Hyasintus Asalang</i>	
Upaya Membangun Papua Tanah Damai Menggunakan Teori Johan Galtung.....	47
<i>Debi Debora Okowali</i>	
Mewujudkan Papua Tanah Damai: Upaya, Tantangan, dan Harapan Masa Depan	76
<i>Monika Bamulki</i>	
Miras, Kriminalitas, dan Peran Pemuda: Membangun Papua Tanah Damai.....	82
<i>Yuliana Agustina Youwe dan Ferawati Workas</i>	

<i>Mutual Trust</i> di Tengah Kompleksitas Isu Papua	88
<i>Fransiskus Bala Kleden</i>	
Membangun Sikap Keterbukaan untuk Berdialog dalam Rangka Penyelesaian Konflik Kekerasan di Tanah Papua.....	97
<i>Yohanes Kayame</i>	
Mewujudkan Papua Tanah Damai (Telaah <i>Zoonpolitikon</i> Aristoteles)....	109
<i>Ignasius Silubun OFM</i>	

SA PU BAPA PU CERITA TENTANG BANGUN WC KARENA SUANGGI: ALIH- UBAH SEBAGAI JALAN DAMAI UNTUK HIDUP ORANG MPUR DI TANAH PAPUA

Kristofel Ajo

PENDAHULUAN

Perdamaian bukanlah sebuah kata yang kosong. Perdamaian adalah ungkapan konstruktif dari beragam konteks dan kontestasi hidup. Damai juga bukanlah akhir sebuah kesepakatan melainkan awal dari permulaan hidup bersama atau awal sebuah upaya pembangunan yang diketahui dan disepakati untuk dilakukan bersama. Ibarat perkawinan/pernikahan. Pria dan Wanita dewasa dengan sadar bersama-sama saling mengakui dan merelakan sebagian kebebasannya untuk mengalami penderitaan bersama-sama sebagai suami atau ayah dan sebagai isteri atau ibu. Kalimat itu memaknai sebuah konsep perdamaian dari sebuah kesepakatan untuk alih-ubah atau bertransformasi bersama-sama.

Antropolog P. M. Laksono menyebut “transformasi” sebagai “alih-ubah” (Laksono, 1985). Terdiri dari dua kata “trans” dan “formasi”. Istilah *trans* berarti beralih atau pergantian atau transisi, sedangkan *formasi* adalah bentuk, pola, atau tatanan. Jadi *transformasi* adalah perubahan bentuk, perubahan pola, atau tatanan yang berubah (ubah) atau mengalami perubahan (Inda Arintina dan Rika Novi Yarti 2019, 361). Laksono mengidentifikasi dua jenis transformasi. Pertama, transformasi sinkronis, yaitu transformasi yang mengarah pada alih-ubah tatanan kebudayaan ke masa depan dalam pengertian apa yang perlu

dipersiapkan, bagaimana caranya, dan seperti apa keuntungannya bagi masyarakat yang memilih masuk dalam perubahan pembangunan. Kedua, transformasi diakronis, yaitu mengarah pada alih-ubah yang didasari untuk melakukan romantisasi kebudayaan yang didasarkan pada peninggalan sejarah, warisan nenek moyang, serta warisan kolonial. Saya memilih menggunakan alih ubah dalam artikel ini.

Pengalaman alih ubah bisa dilihat pada tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Apabila Camat Belajar Antropologi (Atau Antropolog Jadi Camat?)” untuk pengantar buku *Belanda di Irian Jaya: Amtenaar di masa penuh gejolak 1945-1962* (2001). Bagi Aditjondro pembangunan Papua harus menemukenali kebudayaan Papua secara holistik (utuh dan menyeluruh). Seperti para pegawai pemerintah Belanda dibekali “ilmu gado-gado yang dulu disebut *Indologie*”. *Indologie* membantu dalam pendekatan memahami manusia Papua dari mencatat setiap observasi/turne dan pertemuan langsung ke dalam laporan yang akan diserahkan pada saat serah terima pengalihan dan pergantian jabatan. Pengetahuan ini yang menjadi instrumen alih-ubah di Papua secara massif dari 1942-1963 (dalam Pim Schoorl 2001, xi-xii). Pemerintah Belanda diterima orang Papua dan orang Papua dipandang sebagai manusia oleh Belanda. Amtenaar Papua juga menuangkan pengalamannya dalam buku yang disunting oleh Leontine Visser dan Amapon Jos Marey (Leontine Visser dan Amapon Jos Marey 2008).

Ngurah Suryawan (Suryawan 2016, 64) dan Theo van Den Broek (Broek 1996) juga mengulas Suku Amungme di Timika yang memperjuangkan nasib di tengah kehadiran PT Freeport. Mereka mengatur strategi seperti institusionalisasi adat dan mitos serta reorganisir tatanan sosial yang lebih modern didukung aksi-aksi perlawanan tanpa kekerasan sehingga mendorong adanya tindakan pemberian kompensasi dari PT Freeport dan pemerintah Indonesia kepada mereka. Sebab jika tidak *hai*¹

¹ NgurahSuryawan (Suryawan2016, 64) menjelaskan bahwa “*hai* merupakan ungkapan/ekspresi masyarakat di Papua akan tatanan kehidupan yang penuh keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan”. *Hai* adalah sebuah kepercayaan tentang kesejahteraan hidup dan kebahagiaan yang bisa diperoleh orang Amungme setelah melewati ritus-ritus peralihan hidup, seperti inisiasi. Inisiasi ini dilakukan di dalam hutan, di gunung, di sungai, dengan memanfaatkan isi alam semesta sebagai sarana. <file:///C:/Users/USER/Downloads/182-581-1-PB.pdf>. Diakses 23 Juli 2021.

akan terancam, oleh sebab gunung dan alamnya telah dirusak Freeport. Pada akhirnya kompensasi pendidikan dan pola-pola pengembangan ekonomi pertanian menjadi jalan baru.

Literatur itu masih relevan hingga sekarang dan berkaitan erat dengan kisah yang diceritakan *sa pu bapa* ketika menjadi kepala distrik di distrik Mubrani.²

KAKUS, SUANGGI, DAN RUMAH ORANG MPUR

Di tahun 2012 dalam sebuah perjalanan dinasny *sa pu bapa* menyempatkan waktu singgah di Yogyakarta mengunjungi saya. Kami tinggal di Asrama Kabupaten Tambrauw di Sapen Yogyakarta. Bapa bercerita kepada saya dan seorang teman dan dia bilang kamu kuliah tapi nanti sudah selesai baru kamu rasa. Lain di darat lain di laut istilah bapa. Saya kira maksudnya adalah lain teori lain praktek. Bapa cerita waktu dia masih jadi Kepala Distrik di Mubrani belum ada rumah setengah tembok. Orang di sana masih tinggal di rumah panggung. Tiang-tiang kayu. Gedek bambu. Atap sagu. Yang pakai atap seng hanya sedikit orang. Rumah panggung itu dijadikan sebagai rumah utama sejak dahulu. Buang air, kakus, dan mandi dilakukan di sungai yang dekat dengan pemukiman warga di situ.

Bapa cerita ada program rumah sosial dengan beberapa tahapan. Waktu mau bangun tahap pertama, bapa berunding dengan warga. Sebagian besar warga menolak membangun rumah dengan kakus di dalam rumah. Para orang tua masih memegang keyakinan akan nilai-nilai budaya. Menurut mereka, bikin kakus di dalam rumah sama saja membawa penyakit atau, yang lebih buruk, kematian bagi mereka. Rumah adalah tempat yang paling baik, aman, bersih, dan pelindung dari bahaya. Rumah adalah surga di dunia. Sementara itu, kotoran, kejahatan, dan dosa ada di luar rumah. Membuat kakus di dalam rumah berarti membawa hal buruk dan malapetaka bagi keluarga yang menempati rumah itu.

² Distrik Mubrani sejak tahun 2013 telah menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tambrauw. Tambrauw dimekarkan tahun 2008 dengan UU No.56/2008 yang hanya memuat tujuh distrik dari wilayah Sorong. Namun setelah direvisi dengan UU No.14/2013, akhirnya empat distrik dari wilayah Manokwari yang salah satunya adalah distrik Mubrani, masuk menjadi wilayah administratif kabupaten Tambrauw.

Sampai suatu hari ada kedukaan berturut turut di Arfu. Desas-desus yang beredar dari ujung kampung ke ujung kampung, orang meninggal karena *suanggi*. *Suanggi* adalah orang-orang yang menggunakan bahan-bahan dari alam, dengan beberapa latihan dan keterampilan, yang khususnya dipakai sebagai alat untuk membunuh orang lain yang memiliki masalah. Biasanya utang-piutang dan dendam.³ Jadi *suanggi* bukan hantu atau setan. Kabar yang beredar dia *ditoki* (dibunuh) pada saat akan pergi untuk buang air di kali. Di Arfu, bila ada orang yang meninggal, dalam bentuk apapun, mereka melempar kesalahan itu pada *suanggi*. *Sa pu bapa*, bersama seorang aparat anak asli setempat dan beberapa pegawai pergi mengunjungi rumah duka. Karena orang yang meninggal itu masih keluarga, bapa diminta untuk menyampaikan hal-hal penting dan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Dalam sambutan itu ia menyampaikan pikirannya. "Jadi *suanggi* ini memang ada di kampung ini, makanya orang meninggal terus. Saya bayangkan seandainya kita bangun rumah dengan WC atau kakus di dalam rumah, kita tidak pergi lagi ke kali untuk buang air. Cukup buang air di rumah. Jadi *suanggi* tidak bisa *toki* kamu. Tapi karena tidak ada WC atau kakus, kita pergi ke kali yang jauh di belakang sana. Jauh. Malam gelap lagi. Sunyi. Itu kesempatan *suanggi* menunggu kita untuk bunuh kita." Mendengar itu ada suara-suara kecil dari orang tua di situ dalam Bahasa Mpur, "*distrik abuar bar tin*" (kepala distrik berkata benar). Beberapa waktu setelah itu, karena takut pada *suanggi* akhirnya warga memberitahu bapa untuk membangun WC atau kakus di dalam rumah.

Sa pu bapa bertugas sebagai kepala distrik di wilayah Kabupaten Manokwari. Selain pegawai yang sekolah sampai kerja di Manokwari, bapa juga berasal dari Kebar. Mengikuti klasifikasi bahasa, orang Arfu di distrik Mubrani secara kultural dikelompokkan sebagai suku Mpur. Suku ini baru disebut dalam catatan ilmiah para peneliti Belanda sekitar tahun 1950an- 1960an. Kemudian dipatenkan dalam ekspedisi para peneliti bahasa dan antropologi sejak 1980an sampai 1990an. Beberapa di antaranya

³ *Suanggi* di wilayah kepala burung, Tanah Papua, dapat disebut dalam istilah lain, misalnya preman adat, mavia lokal, dsb. Dalam perkembangannya, *suanggi* juga dipakai sebagai bagian dari alat pertahanan budaya dan eksistensi dalam berbagai hal.

adalah Jelle Miedema (Jelle Miedema, Cecillia Ode & Rien A.C. Dam, eds 1998), Greg Kalmbacher dan istrinya Carol J. Kalmbacher (Kalmbacher, dkk 2013), dan Cecillia Ode (Ode 2004). Peneliti lain yang diperkirakan sempat melintasi daerah suku Mpur adalah Jan Erick Elmberg. Mereka memberi muatan materi untuk klasifikasi terhadap diversifikasi budaya Mpur dari budaya lain di Papua Barat, khususnya di wilayah otak burung, kepala burung, Tanah Papua, yang dikelompokkan sebagai wilayah adat Domberai.⁴

Orang Mpur hidup di wilayah seputar pegunungan Arfak dan Tambrauw. Di sebelah Timur, wilayah Kali Kasi bersilang-sengkarut dengan orang Meyah Arfak. Di sebelah Barat berbaur dengan orang Miyah dan orang Irires, termasuk juga orang Abun. Bagi suku-suku ini, rumah adalah tempat perlindungan, penyimpanan memori, dan ide; struktur kehidupan yang pertama seorang manusia ketika lahir. Manusia memulai awal dan belajar memahami hidup dan dunianya dari dalam rumah. Rumah sama saja struktur kekerabatan. Beberapa rumah adalah klan yang membentuk kampung dan dibangun dari hubungan resiprokal dan asimetris yang berlangsung seimbang dalam unsur-unsur kebudayaannya. Rumah panggung seperti di Mubrani punya bentuk dan struktur bangunan, termasuk fungsi dan makna yang sama dengan penduduk di Kebar, Amberbaken, Senopi, hingga Asiti. Orang di sini dikelompokkan ke dalam satu suku berdasarkan bahasa, yang disebut suku Mpur.

Bapa bilang orang Mpur punya kepercayaan membuat WC di dalam rumah adalah membawa penyakit ke dalam rumah, bahkan membawa kematian ke dalam rumah. Mereka hanya punya rumah dengan satu ruang utama. Di dalam rumah panggung itu mulanya tidak ada kamar. Mereka baru mengenal kamar setelah para misionaris Kristen masuk ke wilayah ini dan mengajari banyak hal tentang konsep rumah, termasuk pembagian kamar hingga tugas dalam keluarga. Mereka juga kenalkan sistem

⁴ Lihat salah satunya tulisan Dominggus Mampioer, yang menjelaskan secara historis bahwa pembagian tujuh wilayah adat dilakukan oleh G.J. Held (1970), tentang *cultuur provincies* (provinsi kebudayaan); AA Gerbrands (1979) tentang *art style areas* (wilayah gaya seni) dan Don AL Flassy dalam buku aspek dan prospek seni budaya Papua (1983) terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya. <https://jubi.co.id/menyimak-wilayah-budaya-dan-adat-di-tanah-papua/>. Diakses 15 Juli 2021.

perkawinan dan hubungan suami-istri sampai ke tingkatan pembangunan sosial tertinggi, seperti integrasi pemukiman dan pemutusan isolasi sosial melalui perdamaian pasca perang rekonsiliasi adat dan pemaksaan rekognisi agama Kristen di tengah-tengah keadaan masyarakat yang masih kental secara adat. Ujung dari proses alih-ubah itu, rumah orang Mpur berubah menjadi satu pemukiman besar yang mereka sebut "bivak". Terdiri dari kompleks pemukiman berdasarkan klan atau marga yang dipimpin oleh pemimpin klan. Kadang ada juga afiliasi yang bersifat etnik atau terdiri dari dua atau tiga marga karena hubungan perkawinan. Sampai pada kesepakatan membangun WC di dalam rumah yang terulas dari *bapa pu cerita*.

PENUTUP

Perdamaian tidak dicapai hanya dengan kesepakatan kosong. Tidak selalu juga pada pasca konflik. Perdamaian memuat substansi hidup dan pembangunan yang disadari untuk dilakukan bersama-sama. Jadi perdamaian selalui berada di akhir upaya pembangunan. Seperti peran pemerintah membangun masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan bisa mendatangkan konflik dapat pula menjadi pintu masuk perdamaian. Kasus Arfu, Distrik Mubrani di Manokwari menjadi contoh bagaimana alih ubah cara pandang pada tindakan oleh seorang kepala distrik yang merupakan bagian dari orang Mpur yang membawa nilai nilai baru berhasil mengalih ubahkan cara pandang masyarakat dengan pandangan mereka sendiri. Bukan membawa nilai dari luar melainkan nilai-nilai asli. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Pemerintah diterima, dipercaya dan diyakini membawa perubahan baik. Nilai-nilai pembangunan dan hal baru dapat diterima selama itu membantu masyarakatnya berkembang di dalam kebudayaannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- (LIPI), The Asia Foundation (TAF) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018. *JALAN UNTUK KOMUNITAS: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR: KONEKTIVITAS JALAN UNTUK PENGHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DAN LINGKUNGAN HIDUP*. Jakarta: TAF dan LIPI.
- Aditjondro, George Junus. 2000. *Cahaya bintang kejora*. Jakarta: Elsam.
- Ahmad, Pengantar dalam. 2000. *Amber dan komin: studi perubahan ekonomi di Papua*. Yogyakarta: Bigrif Publishing.
- Aris Ananta, dkk. t.thn. "Statistics on ethnic diversity in the land of Papua, Indonesia." *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol 3, no. 3 458-474.
- Boelaars, Jan. 1986 . *Manusia Irian: Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Broek, Theo van den. 1996. "Menempatkan diri dalam perubahan." Jayapura.
- Budi Hernawan dalam Gerlachus Sri Mulyono, ed. 2016. *Nisekolara kami belajar; saat para guru mengajar dengan hati*. CV. Voxus Media Bekali.
- dalam Pim Schoorl. 2001. *Apabila Camat Belajar Antropologi (Atau Antropologi Jadi Camat?)*. Disunting oleh Pim Schoorl. Jakarta: Perwakilan KITLV Jakarta & Penerbit Garba Budaya.
- Inda Arintina dan Rika Novi Yarti. 2019. "MENUMBUHKEMBANGKAN HUMAN DIGITAL SKILL PENDIDIK DI ABAD KE 21." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*. Palembang: Universitas PGRI. 356-363.
- Jelle Miedema, Cecillia Ode & Rien A.C. Dam, eds. 1998. *Perspectives on the bird's head of Irian Jaya, Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Kalmbacher, dkk. 2013. *Bar ma wor: kejadian*. Papua : Wycliffe Bible Translators, Inc.
- Laksono, P M. 1985. *Tradisi dalam struktur masyarakat Jawa kerajaan dan pedesaan: Alih-ubah model berpikir Jawa*. Yogyakarta: UGM Press.
- Leontine Visser dan Amapon Jos Marey. 2008. *Bakti pamong praja Papua*. Jakarta: Kompas.

- Mansinambouw, Edward Karel Markus, dan Paul Haenen. 1994. *Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya*. Disunting oleh Edward Karel Markus Mansinambouw dan Paul Haenen. Jakarta: LIPI.
- Miedema, Jelle. 1986. "Pre capitalism and cosmology." *Verhandelingen: van het koninklijk institut voor taal-, land- en volkenkunde* 1-43.
- Ode, Cecillia. 2004. *Endangered languages of the Pacific rim: Mpur vocabulary*. Leiden: Leiden University-ELPR.
- Suryawan, I Ngurah. 2016. "Di antara ugatame dan injil: transformasi teologi-teologi pribumi di Tanah Papua." *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies Vol 2, No 1 Januari-Juni 2016* 62-69.

PROYEK *DIA-LO-GUE*: MEMBUMI (HANGUS)-KAN DAMAI DI PAPUA

Kurniawan Patma

PENDAHULUAN

“Bapak, Ibu, Saudara/-i sekalian pada hari ini kita bersama sama akan mendeklarasikan papua sebagai tanah damai yang akan ditandai dengan pendantanganan berita acara atau piagam deklarasi”

Di atas adalah sebuah kalimat yang (sepertinya) sudah terlalu familiar kita dengarkan dalam forum yang seringkali diinisiasi oleh pemerintah dan para tokoh di Papua dalam kegiatan bertajuk deklarasi damai di Tanah Papua. Kalimat tersebut terkesan telah menjadi *template* formalitas belaka dan seakan menjadi *backsound* tak bermakna. Pada akhirnya deklarasi damai hanya menjadi program tekstual yang seakan menjadi proyek unggul pemerintah dan hanya memiliki dampak semu dan temporer.

Intensitas dan kuantitas giat deklarasi damai di Papua yang diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2019 – 2022 menurut data yang dikumpulkan oleh penulis melalui studi literatur setidaknya telah dilakukan sebanyak delapan kali. Diantaranya adalah deklarasi Papua Tanah Damai di Jayapura pada 5 September 2019 yang dihadiri Kapolri, Panglima TNI, Ketua MRP, Ketua DPR Papua, Gubernur Papua dan 34 perwakilan tokoh masyarakat setempat serta Deklarasi Papua Damai bertajuk Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat yang akan digelar serangkaian dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 di Wamena.

Sayangnya, kuantitas dari giat deklarasi ini tidak berjalan linear dengan kualitas potret kedamaian yang tercipta di tanah Papua, hal ini terbukti dengan tren positif dari konflik terjadi di Papua yang terus meningkat tajam. Pada sisi lain potret anomali dari deklarasi ini sering terjadi dimana praktek kekerasan pun sering dilakukan oleh 'oknum' aparat terhadap orang asli papua. Pendekatan non kekerasan sebagai wujudnyata dari kondisi damai dari deklarasi yang ditandatangani terkesan hanya berlaku di atas kertas belaka.

"Kawan-kawan aktifis hari ini kita akan melakukan demo damai..."

Pada sisi lain, para aktifis yang terus gencar bergerak seringkali menggunakan diksi damai pada aksi yang diinisiasi seperti pada kalimat di atas. Namun tak jarang aksi yang diinisiasi dengan tajuk 'demo damai' ini malah seringkali memicu konflik dan berakhir ricuh.

Dua potret tersebut di atas menjadi legitimasi sederhana bagi kita bahwa akar permasalahan dari konflik berkepanjangan yang terus terjadi juga disebabkan oleh karena kedua pihak yang seringkali menggunakan diksi damai dalam program dan gerakan yang diinisiasi oleh mereka malah menjadi pelaku kekerasan. Spirit damai yang diusung dalam program dan gerakan mereka pada akhirnya membuka tabir bawah semua terkesan palsu dan hanyalah topeng (*kamuflase.red*) belaka.

Penulis dalam tulisan ini tertarik untuk merumuskan masalah yang mencoba mengurai secara kualitatif bagaimana potret anomali dari kedamaian yang selama ini terlalu sering dideklarasikan secara tekstual namun minim dipraktekkan secara kontekstual. Pendekatan kekerasan menjadi representasi dari aktifitas 'membumi hanguskan damai' di Papua dan dialog menjadi representasi dari aktifitas 'membangkitkan damai' di Papua. Dimensi lain yang tertuang di dalam diksi *dialogue* juga hendak mengurai *dialogue* menjadi *dia, lo:kamu dan gue: saya* yang merepresentasikan kolektifitas atau kebersamaan sebagai pembawa damai.

Kata damai atau *peace* secara etimologis ditemukan sekitar abad ke-12 dan berasal dari bahasa inggris pada abad pertengahan yaitu *pees* yang diambil dari bahasa latin yaitu *pax* yang berarti damai dan keselarasan. Pengertian perdamaian secara terminologis adalah tidak

adanya peperangan atau konflik kekerasan. Dari rumusan ini dapat kita simpulkan bahwa damai adalah sebuah keadaan tenang dan harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Walaupun konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan namun secara sederhana damai dapat kita rumuskan sebagai kondisi tidak adanya kekerasan atau perang dan sistem keadilan berlaku secara menyeluruh. Kondisi damai tercipta saat semua manusia tanpa terkecuali mempraktikannya. Untuk mewujudkan kondisi damai tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang disebut sebagai pembawa damai untuk menyalurkan harmoni keselarasan dan jauh dari konflik dalam kehidupan alami antar manusia. Siapa pembawa damai itu? mereka yang telah mempelajari seni perdamaian dan mempraktikkannya, mereka tahu bahwa tidak ada rekonsiliasi tanpa karunia hidup seseorang, dan bahwa perdamaian harus selalu dicari dan dalam setiap kasus.

PAPEDA : Papua Penuh Damai atau Papua Penuh Darah ?

Menurut data yang dirilis oleh redaksi tirto.id bahwa dalam rentang tahun 2018-2020 ada 263 warga sipil yang meninggal, 7 orang KKB meninggal dan 6 Pasukan TNI-Polri meninggal dalam kontak bersenjata. Sebuah potret miris yang terus terjadi sampai saat ini di Tanah Papua dan menjadi representasi bahwa Papua bukanlah tanah damai tetapi seakan menjadi Papua tanah darah.

Jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi di Papua menjadi potret bahwa Papua masih jauh dari kondisi damai. Hal ini terus berkelanjutan karena belum adanya kesadaran bersama bahwa kedamaian adalah seni yang tidak hanya memperjuangkan konsep tetapi juga aktualisasi.

Spirit perjuangan Dialog Papua – Jakarta yang diinisiasi oleh almarhum Pastor Dr. Neles Tebai Pr. melalui Jaringan Damai Papua harusnya menjadi inspirasi bagi para penggiat dan aktifis di Tanah Papua. Pater Neles dalam gerakannya menganggap bahwa satu-satunya persepsi yang sama dari kedua kubu yang bertikai adalah menjadikan Papua tanah damai. Target memunculkan perdamaian abadi di Papua ini yang

harus diperjuangkan bersama-sama melalui dialog Jakarta-Papua. Dialog Jakarta – Papua menjadi jalan ideal dan jalan tengah yang tidak lagi harus mengorbankan banyak *tumbal* yang harus merengang nyawa.

Spirit dialog yang diinisiasi dan diperjuangkan oleh almarhum Pastor Dr. Neles Tebai Pr harusnya tidak boleh '*senyap*' setelah kepergian beliau. Embrio perjuangan beliau harus terus dihidupkan dengan mengkampanyekan kemagisan dari dialog di berbagai sektor mulai dari dialog inter-religius sampai dengan dialog antara negara dan kelompok pro Papua Merdeka. Dialog menjadi wahana humanis yang harus terus diperjuangkan untuk memediasi kepentingan dari kedua belah pihak yang selama ini terkesan hanya melaksanakan '*monolog*'.

NKRI DAN PAPUA MERDEKA : Harga Mati atau Mati Harga?

Tagline yang sering dikumandangkan antara kedua pihak yang berseteru adalah 'harga mati'. Frasa ini hendak menggambarkan secara tegas sebuah prinsip dari kedua belah pihak bahwa tidak ada jalan atau tidak ada alternatif lain selain NKRI 'harga mati' dan Papua Merdeka 'harga mati'.

NKRI 'harga mati' adalah *tagline* yang sering dikampanyekan oleh pemerintah melalui aparat yang hendak menunjukkan dominasi atau superioritas dari pemerintah. *Memoria passionis* dalam hal intimidasi, eksploitasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dengan dalil NKRI 'harga mati' juga seringkali memakan korban yang pada akhirnya menjadikan *tagline* ini seakan berubah dari NKRI 'harga mati' menjadi NKRI 'mati harga' di mata dunia. Mari melihat dan merefleksikan strategi *teatrical* oleh aparat (TNI dan Polri.red) yang terlalu sering mem-*blow up* kegiatan sosial seperti mengajar di sekolah -sekolah dan memberikan bantuan bahan makanan lalu meminta anak anak untuk memegang bendera merah putih kecil dan mempublikasikan ke media dengan redaksi pada berita 'demi menumbuhkan kecintaan pada NKRI, TNI rela menjadi guru untuk mengajar pancasila di sekolah sekolah'. Strategi yang hanya memiliki dampak yang temporer.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok pro Papua Merdeka yang pada akhirnya sering ikut-ikutan memplagiasi frasa 'harga mati'. Gerakan kekerasan yang sering dipraktekkan oleh kedua belah pihak pada akhirnya terus menggerus empati dari pihak luar dan akan memperteguh posisi kedua belah pihak ini menjadi 'mati harga' (tidak ada nilainya.red), belum lagi profokasi yang terus diproduksi di media sosial secara masif terus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan *hoax* dan *hatespeech*.

Narasi yang diproduksi di media sosial harusnya adalah narasi kritis konstruktif yang memberikan suasana kebenaran dan kedamaian. Teror dan intimidasi melalui media sosial yang dengan masif diproduksi oleh 'oknum' dari kedua belah pihak semakin memperteguh daerah Papua sebagai daerah yang 'horor'. Hal ini harus di-*counter* dengan narasi narasi positif yang terus mengkampanyekan semangat toleransi antar suku dan agama yang ada di Papua.

UANG: MATA AIR atau AIR MATA?

Kucuran dana '*jumbo*' yang dialirkan ke Papua melalui beragam kebijakan percepatan pembangunan diantaranya dana Otonomi Khusus ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang ada di Papua. Gelombang '*tsunami*' aliran dana yang mengucur ke Papua ternyata tidak menjadi 'mata air' (sumber kesejahteraan.red) tetapi malah menjadi paradoks yang memunculkan beragam permasalahan lainnya seperti korupsi, konflik horizontal, perang saudara/suku dan beragam masalah sosial lainnya. Sejak 2017 pemerintah mengucurkan anggaran lebih dari Rp11 triliun per tahun ke provinsi-provinsi di Papua. Untuk *outlook* tahun 2022 pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp8,5 triliun serta dana tambahan infrastruktur untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp 4,37 triliun. Jika ditotalkan, anggaran untuk Papua ini mencapai Rp 12,88 triliun terus meningkat Rp 949,2 miliar dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp11,93 triliun.

Pendekatan '*uang*' yang dilakukan oleh pemerintah malah menjadi fenomena kotak pandora bagi masyarakat di Papua yang malah memun-

culkan 'air mata' (kesedihan/kedukaan.red) bagi masyarakat di Papua. Besaran dana yang dikucurkan melalui dana otsus tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua yang sampai saat ini terus menduduki posisi terendah yaitu urutan ke 37 dari 37 Provinsi yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan Indeks Kemiskinan dimana Papua menduduki posisi teratas dengan persentase 26,56% diikuti oleh Papua Barat dengan persentase 21,33%. Potret ini tentu menjadi penegasan bahwa pendekatan '*uang*' yang diterapkan oleh pemerintah telah merubah Papua menjadi 'air mata' karena telah merenggut kemandirian dari masyarakat Papua menjadi mentalitas instan.

Spirit ekonomi kerakyatan harus didorong dalam program pemerintah agar masyarakat Papua tidak berubah dari masyarakat yang suka bercocok tanam di kebun (petani.red) dan berburu di hutan atau laut (nelayan.red) menjadi masyarakat yang suka bercocok tanam dan berburu uang di kantor pemerintah daerah dan kantor pemerintah kampung.

PAPUA : BINGKAI NKRI atau BANGKAI NKRI?

Potret ketertinggalan yang terjadi di Papua harusnya menjadi prioritas dari negara untuk terus bergerak dalam rangka membawa keadilan dan kesetaraan di Papua. Pembangunan infrastruktur yang dengan gencar dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang konsisten dan berkelanjutan, jika negara ini betul menganggap bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari 'bingkai' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketertinggalan yang tercermin dari beragam indeks yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik mulai dari Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Literasi sampai kepada Indeks Kemiskinan terus menunjukkan bahwa Papua selalu menjadi '*pemegang kunci*'. Proyek pembangunan manusia di Papua harus menjadi prioritas utama agar sumber daya manusia yang tercipta menjadi literat dan berkualitas. Gerakan literasi yang konsisten dan berkelanjutan harus menjadi proyek *dia-lo-gue* (proyek bersama dia, kamu dan saya. red) dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Pada tahun 2023 ini Presiden Jokowi baru saja meresmikan *Papua Youth*

Creative Hub (PYCH) di Papua yang tentu diharapkan bisa menjadi wahan atau sentra pengembangan kapasitas sumber daya pemuda dan manusia di Papua. Keberadaan fisik dari bangunan PYCH yang 'mewah' ini harus berjalan linear dengan keberadaan kualitas sumber daya manusia Papua yang juga harus makin berkualitas melalui program program pengembangan kapasitas yang kreatif. Hal ini diharapkan bisa menjadi bagian dari *input* dan *impact* untuk memperteguh diksi 'bingkai' NKRI bukan 'bangkai' NKRI.

PENUTUP: FALSAFAH 'NOKEN' (NON KEKERASAN)

Kondisi damai yang diharapkan terjadi di tanah Papua terasa hanya menjadi mimpi belaka bahkan secara ekstrim dan dengan sentuhan menggelitik penulis metaforakan dengan redaksi: Papua '*mimpi basah*' kedamaian. Ejakulasi dan orgasme '*kedamaian*' yang terjadi di Papua selama ini seakan hanya berasal dari '*mimpi basah*' yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak nyata dan fatamorgana.

Negara yang terus intens menginisiasi deklarasi 'damai' melalui penandatanganan piagam atau berita acara dan kelompok aktifis Papua yang juga secara intens melakukan demo 'damai' malah menjadi ilusionis kedamaian karena sering menggunakan pendekatan kekerasan. Negara yang terus mengkampanyekan *tagline* NKRI 'harga mati' dan kelompok Papua merdeka yang juga massif mengkampanyekan Papua Merdeka 'harga mati' malah terus intens mengakutalisasikan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendekatan non kekerasan harus menjadi prioritas dan gerakan bersama - dalam upaya menciptakan Papua menjadi tanah damai dalam arti yang sesungguhnya. Spirit perjuangan non kekerasan yang telah diletakkan oleh beberapa tokoh Papua seperti alm. Pastor Dr. Neles Tebai Pr tidak boleh '*senyap*' tetapi harus terus dihidupkan dan diteruskan oleh semua pihak. Jalur non kekerasan adalah pendekatan yang paling ideal dan terbukti bisa membawa solusi yang humanis atas kelompok yang bertikai. Mari melihat dan merefleksikan gerakan non kekerasan yang pernah diinisiasi oleh Mahatma Gandhi di India melalui gerakan

'*Satyagraha, Ahimsa, Hartal dan Swadesi*'. Gerakan ini terbukti secara humanis meminimalisir jatuhnya '*tumbal*' atas pertikaian yang terjadi dan terbukti menarik empati dari dunia internasional.

Setiap pihak perlu bergerak termasuk komunitas non Papua harus berani tampil memberikan perspektif dan kontribusi terkait dengan arti damai yang sesungguhnya. Pluralitas harus menjadi kekuatan dan peluang untuk membumikan spirit damai bukan malah menjadi kelemahan dan ancaman untuk membumi hanguskan spirit damai di Papua.

Dialog bukan monolog- inisiasi dialog Papua dan Jakarta menjadi proyek bersama yang harus diperjuangkan dan diaktualisasikan secara konsisten. Praktek yang terjadi selama ini terkesan masih dalam parameter *monolog* (diskusi sepihak atau diskusi sendiri sendiri. red), dialog akan menjadi wahana yang bermartabat dimana akan tercipta ruang yang adil dan aman bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Makassary, Ridwan. 2016. Damai Papua Damai Indonesia. Kementerian Agama Provinsi Papua.*
- Jaringan Damai Papua. 2014. Indikator Papua Tanah Damai : Versi Masyarakat Papua. Papua Peace Network.*
- Siregar, Latifah A. 2013. Menuju Papua Tanah Damai : Perspektif Non Papua. Aliansi Demokrasi untuk Papua.*

ARTIKEL/BERITA :

- https://www.setneg.go.id/baca/index/hadiri_deklarasi_papua_damai_wapres_dukung_kolaborasi_tokoh_adat_dan_local_champion_oap_wujudkan_percepatan_pembangunan_papua
- <https://www.detik.com/berita/d-6182189/ini-10-provinsi-di-indonesia-dengan-kemiskinan>

<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1435757-ipm-papua-naik-namun-masih-bergerak-lambat>

<https://tirto.id/kepergian-neles-tebay-jalur-dialog-jakarta-papua-yang-jadi-sunyi-gcll>

<https://setkab.go.id/peresmian-papua-youth-creative-hub-pych-di-kota-jayapura-provinsi-papua-21-maret-2023/>

MEMBANGUN KEMBALI BUDAYA HIDUP DAMAI DI PAPUA LEWAT DIALOG

Oksianus E. Bukega

PENDAHULUAN

Sebelum ada seruan “Papua Tanah Damai”, masyarakat Papua yang hidupnya terintegrasi dalam suku-suku di wilayah adatnya sudah menghidupi budaya hidup damai. Damai dijadikan sebagai landasan dan tujuan hidup mereka. Untuk itu dalam kehidupannya, masyarakat Papua mendambakan hidup damai dan berupaya menghindari perbuatan yang menimbulkan konflik.

Masyarakat Papua yang pada dasarnya mendambakan hidup damai itu sedang berubah. Perubahannya terjadi karena konflik internal (lokal) maupun eksternal (nasional). Konflik lokal, seperti pertikaian/perang antar klen dan suku, dan seterusnya. Konflik di tingkat nasional, seperti mempersoalkan sejarah integrasi Papua ke wilayah Indonesia dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM (dua dari empat akar konflik menurut LIPI); rasialisme maupun pemekaran daerah otonomi baru.

Berbagai cara ditempuh untuk menyelesaikan konflik agar tercipta budaya hidup damai di Papua. Pendekatan keamanan atau pendekatan kesejahteraan sudah dan sedang diterapkan tetapi pendekatan tersebut belum mewujudkan damai di Papua. Kalau beberapa cara tersebut belum terwujud, maka mekanisme kearifan lokal budaya Papua dan dialog perlu dirujuk dan digunakan demi penanganan konflik di Papua. Artikel ini diberi judul “Membangun Kembali Budaya Hidup Damai di Papua

Lewat Dialog". Pembahasannya terdiri dari Pendahuluan; Tinjauan Bahan; Metode Penulisan; Temuan dan Bahasan; serta Kesimpulan.

MASYARAKAT PAPUA DAN BUDAYA HIDUP DAMAI

Damai diartikan sebagai keadaan kehidupan yang tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang dan keadaan tidak bermusuhan. Damai dalam konteks Papua, damai yang didambakan masyarakat adalah keadaan aman, tidak ada konflik dan kekerasan, tidak ada perang dan permusuhan (Kossay, 2015). Tidak adanya konflik memang penting untuk hidup damai dalam masyarakat. Tetapi tidak adanya konflik belum berarti bahwa sudah ada damai, apa lagi budaya damai. Damai mempunyai makna lebih luas daripada sekedar meniadakan konflik dan perang. Maka usaha untuk menjadikan Papua 'Tanah Damai' tidaklah cukup kalau yang dimaksudkan hanyalah membuat Papua menjadi wilayah yang netral di tengah berbagai pihak yang berkonflik (Ladjar, 2009).

Konflik di Papua yang kini mendapat perhatian adalah empat akar konflik yang dikemukakan oleh LIPI, yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan di Papua, dan marginalisasi dan diskriminasi (Widjojo, dkk, 2009). Ada berbagai cara untuk menyelesaikan konflik agar tercipta budaya hidup damai di Papua. Pendekatan kekerasan, keamanan, dan kesejahteraan sudah dilakukan tetapi kedamaian belum terwujud (Sarapung, 2013). Cara lain untuk penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian di Papua disebut 'dialog' kearifan lokal Papua dan mediasi dialog (Afwan, 2015; Tebay, 2009).

Papua dihuni oleh berbagai suku bangsa yang terbagi ke dalam tujuh wilayah adat. Segala dinamika hidup dari masing-masing suku di setiap wilayah adat ini diatur dan dikendalikan oleh otoritas adat-kebudayaan setempat. Hubungan sosial di antara wilayah adat ini sangat beragam. Hal ini karena masing-masing memiliki sistem dan organisasi sosial kebudayaan yang berbeda. Satu sisi, keberagaman ini menampilkan

kekayaan kebudayaan Papua, di sisi lain, keragaman ini menampilkan dinamika konflik (bdk. Bukega, 2021: 113-114).

Masyarakat Papua pada dasarnya mendambakan hidup damai. Hidup damai menjadi landasan dan tujuan hidup. Landasan hidup artinya damai dijadikan sebagai titik pijak awal atau fondasi dasar untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan makmur. Untuk mempermudah tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran, mereka senantiasa hidup damai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Sedangkan tujuan hidup tercermin dalam segala daya upaya yang mereka lakukan semata-mata untuk mewujudkan damai sejahtera. Untuk itu, dalam kehidupannya mereka berupaya menghindari perbuatan yang menimbulkan konflik dengan sesama, kutukan leluhur, kutukan Tuhan, dan bencana alam. (Sitokdana, dkk, 2020: 3).

Kondisi hidup damai yang diinginkan masyarakat Papua ialah keadaan yang aman, tidak ada konflik dan kekerasan tidak ada intimidasi, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, semua kehidupan di Tanah Papua berada dalam suasana damai, aman, harmonis menciptakan persaudaraan dan kekeluargaan permanen. Dalam keadaan demikian, diharapkan akan tumbuh dan berkembang inisiatif masyarakat untuk membangun dirinya menjadi sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah (bdk, Kossay, 2015: 9).

Masyarakat Papua sekalipun mendambakan hidup damai. Namun, suasana peralihan budaya dan perubahan yang menimbulkan konflik dari internal tak terhindarkan, seperti pertikaian antar klen, perang antar suku, intrik politik, pertikaian soal tanah sudah terjadi. Dulu hal itu diatur ketat dalam peraturan adat. Sekarang masyarakat Papua diperadabkan untuk hidup pada hari ini yang disertai dengan kemajemukan masyarakat dan konflik-konflik eksternal yang juga turut mengganggu kehidupan damai di Papua (bdk. Tim SKP Jayapura, 2006: 8-9).

KONFLIK YANG MENGGANGU BUDAYA HIDUP DAMAI DI PAPUA

Dalam mengidentifikasi konflik yang terjadi di Papua, LIPI menyimpulkan bahwa sumber konflik di Papua ada 4 (empat). *Pertama*, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini LIPI merekomendasikan hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan di Aceh. *Kedua*, pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di Papua. Rekomendasinya perlunya jalan rekonsiliasi. *Ketiga*, kegagalan pembangunan. Untuk itu LIPI mengusulkan, diperlukan semacam paradig baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. *Keempat*, masalah marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua. Untuk menjawab masalah ini, LIPI mengusulkan perlunya kebijakan afirmatif rekognisi harus dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. (Widjojo, dkk, 2009; dalam Kossay, 2015: 3-4).

Dalam analisi dan temuan penulis, beberapa konflik di Papua yang menjadi sumber konflik aktual, yaitu (a) *Rasisme dan ketidakadilan*. Upaya untuk meminimalisir diskriminatif rasial ini perlu dibangun sikap toleransi agar menghormati martabat manusia. (b) *Pemekaraan daerah otonomi baru*. Para politisi melihat otonomisasi lebih-lebih sebagai bagi-bagi kekuasaan; jaminan keamanan yang tak terkontrol; kebijakan dan regulasi yang keliru dalam pemetahan wilayah adat sebagai sumber masalah. (c) *Penggunaan dan penyemataaan simbol-simbol budaya Papua*. Tawaran untuk hal ini: kesediaan masyarakat adat agar mencabutnya dan perlu regulasi yang menjami kepemilikan simbol-simbol budaya Papua (bdk. Bukega, 2021: 145-156). (d) *Kemauan*. Belum adanya kemauan Pemerintah Indonesia (militernya) dan Orang Papua (pejuangnya) untuk menyelesaikan beragam konflik di Papua ialah sumber konflik lainnya.

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

Ada berbagai cara untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dengan kekerasan? Sudah disadari dan diakui bahwa cara itu tidak menyelesaikan masalah tetapi, sebaliknya, menambah masalah. Lalu pendekatan ke-

amanan. Nyatanya, itu berarti pendekatan bersenjata yang justru tidak menciptakan rasa aman. Pendekatan kesejahteraan? Bagus. Tetapi tidak serta-merta diterima, karena dianggap gagasan sepihak, dijatuhkan “dari atas” untuk menjinakan yang dibawah (bdk. Sarapung, 2013: xiii). ‘Dialog’ kearifan lokal budaya Papua dan mediasi dialog, merupakan dua aspek dialog yang ideal untuk penyelesaian konflik di Papua. Dua aspek dialog ini dipilih dan diketengahkan agar menjadi modal dan solusi dalam upaya penanganan dan penyelesaian konflik di Papua secara damai.

1) ‘Dialog’ kearifan lokal budaya Papua

Suku-suku bangsa di setiap wilayah adat Papua sudah memiliki dan mengenal beragam cara untuk menyelesaikan konflik secara damai. Mereka membangun mekanisme untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kultural agar tidak mengulangi konflik dan membangun perdamaian. Beberapa unsur yang ada dalam sebuah dialog ialah mediator, ruang dan waktu khusus. Unsur *mediator* berhubungan dengan pemimpin tradisional (kepada suku, ondoafi), yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik. *Ruang* yang digunakan ialah rumah adat dan *para-para* adat. *Waktu khusus* yang digunakan berkaitan dengan upacara ritual ‘*bakar batu*’, *alas tikar* dan sebagainya. Upacara bakar batu/ alas tikar berfungsi sebagai sebuah momen melupakan konflik yang sudah terjadi di antara masyarakat; membangun kesepakatan-kesepakatan kultural agar perdamaian dapat terwujud (bdk, Afwan, 2015: 64-65).

2) Dialog damai prespektif jaringan damai Papua (JDP)

Dalam rangka mencari penyelesaian kompleksitas konflik di Papua, Jaringan Damai Papua (JDP) menawarkan indikator dialog (Jakarta-Papua). Berikut adalah indikator dialog. *Prinsip-prinsip dasar dialog*: masalah Papua diselesaikan secara damai, menyeluruh, bermartabat, dan kesepakatan. *Tujuan dialog*: merumuskan kesepakatan, meretas akar masalah Papua, dan menciptakan perdamaian di Papua. *Partisipasi* masyarakat asli Papua dan warga Papua. *Target-target dialog*: indikator-indikator dari Papua Tanah Damai; masalah-masalah mendasar yang mesti dituntaskan; solusi-solusi

untuk menciptakn perdamaian. *Merancang tahap dialog. Menyediakan fasilitator* dialog dengan tahapannya. *Monitoring implementasi kesepakatan* (bdk, Tebay, 2009: 24-25; Pekey, 2013: 220-223). Melalui dialog konflik di Papua bukan hanya bisa diakhiri tetapi juga dapat dicegah agar tidak terjadi lagi di masa depan.

BUDAYA HIDUP DAMAI: MENEGAKKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL

Membangun hidup damai di Papua harus menjadi agenda bersama agar mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Secara gambaran umum telah diketengahkan konflik aktual yang masih mengganggu kehidupan damai di Papua dan rekomendasi serta resolusi-resolusinya yang perlu ditempuh. Harus diakui bahwa walaupun terjadi berbagai konflik di Papua kenyataannya berbagai lapisan masyarakat tetap mengupayakan untuk berdialog dan membangun budaya hidup damai. Karena itu untuk mencapai Papua Tanah Damai yang sesungguhnya maka dibutuhkan dialog damai sebagai perwujudan tindakan humanis-sosiologis.

Untuk membangun budaya hidup damai lewat dialog, sejumlah prinsip universal ini perlu diintegrasikan supaya terlaksana dan dapat dihayati bersama, yakni dalam dialog setiap orang ingin supaya hidup ini *aman*, supaya setiap orang *dihargai* dalam kepribadiannya masing-masing walaupun berbeda, supaya ada *kesejahteraan*, setiap orang ingin supaya diperlakukan *adil* dan sesuai *kebenaran*, mau diakui *sebagai pribadi* manusia, sebagai suku, setiap orang ingin supaya *suaranya didengar* dan diberikan tempat, supaya hidupnya *harmonis* (Tim SKP, 2006: 26).

Penutup

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan hidup damai. Mempertahankan hidup damai dan memperjuangkan untuk mencapai suatu kehidupan yang damai terwujud dalam kehidupan sosialitas. Masyarakat Papua pada prinsipnya menginginkan hidup damai dan mencintai budaya damai. Konflik berkelanjutan yang mengganggu hidup damai di Papua sesungguhnya dapat dicega jika pihak-pihak yang terlibat mau duduk

bersama dengan tenang dan damai dalam semangat keterbukaan. Dialog kearifan lokal budaya Papua dan mediasi dialog, merupakan dua aspek dialog yang ideal dan dianggap penting untuk penyelesaian konflik di Papua. Dua aspek dialog ini dipilih dan diketengahkan agar menjadi modal dan solusi dalam penanganan dan penyelesaian konflik di Papua. Dalam dialog perdamaian, sejumlah prinsip atau nilai universal yang perlu diintegrasikan supaya terlaksana dan dapat dihayati bersama ialah rasa aman dan nyaman, pengakuan dan harga diri, kesejaterahan, keadilan dan kebenaran, kebersamaan, toleransi dan menghargai, kemandirian, komunikasi-informasi, partisipasi dan harmoni-keutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Asyhari Budi. 2015. *Mutiara Terpendam Papua, Potensi Kearifan Lokal Untuk Perdamaian Di Tanah Papua*. Pogung: CRCS Universitas Gadjah Mada.
- Bukega, K. Oksianus. 2021. *Orang Papua Stop Menjual "Mama" Tanah Papua*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kossay, Paskalis. 2015. *Jalan Damai Menuju Papua Sejahtera*. Jakarta Timur: Tollelegi.
- Ladjar, Laba Leo. 2009. *Membangun Papua Tanah Damai: Kumpulan Ceramah Uskup Leo Laba Ladjar, OFM*. Jayapura: SKP Jayapura.
- Pekey, Titus. 2013. *Gus Dur, Guru dan Masa Depan Papua Hidup Damai Lewat Dialog*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sarapung, J. Elga (Editor). 2013. *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Yogyakarta: Interfide.
- Sitokdana, Melkior, dkk. 2020. *Perdamaian Pegunungan Bintang Untuk Membangun Perdamaian Manusia Aplim Apom*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Tim SKP Jayapura. 2006. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura.
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Prespektif Papua*. Jayapura: SKPKC.

Widjojo, S. Muridan, dkk. 2009. *Papua Road Map Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI – Yayasan Tifa – Yayasan Obor Indonesia.

HISTORISITAS, KONTEKSTUALISASI, DAN REKONSTRUKSI: PEMBANGUNAN PERADABAN DI TANAH PAPUA

Anugrah Amin Ignatius Julio Wejai

Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN

Pada umumnya, Tanah Papua dikenal karena dua hal; kekayaan alam dan keunikan budaya. Kekayaan alam yang terkandung di Bumi Cenderawasih tentu tidak terpisah dari perspektif geografis wilayah Papua yang mencapai 421.981 Km² atau 3,5 kali lebih besar Pulau Jawa. Artinya juga setiap regional dan daerah di Tanah Papua memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti tradisi, norma adat, bahasa, dan komoditas lokal. Hal ini merupakan realitas murni yang pada gilirannya menjadi cikal bakal pembagian wilayah adat di penjuru Tanah Papua. Secara antropologi, terdapat tujuh zona kebudayaan yang terdiri dari: (1) Saireri, (2) Domberai, (3) Ha-Anim, (4) Tabi, (5) Lano-Pago, (6) Bomberai, dan (7) Me-Pago. Artinya, ada lebih dari 250 kelompok etnis yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa, praktik-praktik, dan agama asli yang berbeda—setidaknya agama itu masih eksis masa pra-kolonial hingga pendudukan Belanda dan Jepang—yang berbeda di Papua (Sugandi, 2008).

Dalam rangka mendalami konteks umum Papua, kemungkinan potensial mengenai *power and influence* bagi Orang Papua adalah pengaruh etnis—dalam hal ini kesukuan. Salah satu mesin mobilisasi yang paling efektif di Papua adalah narasi-narasi rasial, oleh karenanya

seringkali insiden-insiden yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap keharmonisan sosial biasanya akan berujung pada ketegangan horizontal di tengah masyarakat (Sugandi, 2008). Kondisi ini dipicu oleh minimnya komunikasi sosial lintas etnis, sehingga memupuk ketidaksepahaman pluralitas atas norma-norma dan nilai-nilai yang terjalin di tengah masyarakat. Selain itu, kekayaan sumber daya alam telah menoreh sejarah konflik yang panjang dan berkesinambungan hingga hari ini dengan biaya kemanusiaan yang signifikan (Sugandi, 2008). Disharmoni sosial dan konflik sumber daya alam menjadi *grievance* atas ketimpangan, kesenjangan, serta keterbelakangan di Papua yang melurut ke berbagai aspek kehidupan.

Untuk menelusuri situasi Papua sekarang, tidak cukup mendalami satu perspektif tunggal saja namun sebaiknya kita menggali secara menyeluruh, semenjak proses historis pembangunan mula-mula hingga realitas struktur sosial-budaya masyarakat tentu banyak peristiwa-peristiwa yang berkontribusi terhadap fakta Papua hari ini. Oleh karena itu, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana proses problematika di Papua begitu kompleks? Bagaimana kita menganalisis aspek historis kesenjangan di Papua? Seperti apakah model alternatif yang mampu mengatasi akibat-akibat kesenjangan di masyarakat Papua dalam jangka panjang?

HISTORISITAS, KONTEKSTUALISASI, DAN REKONSTRUKSI

Sebagai gambaran yang efektif, manakala kita perlu membedah kondisi Papua dalam tiga fase penjelasan yaitu persepsi problematika Papua sebelum Otonomi Khusus (selanjutnya: Otsus), kehidupan sebelum Otsus dan Papua masa Otsus berlangsung. Dengan cara demikian, kemungkinan kita untuk memperoleh jawaban-jawaban perkembangan Papua makin terukur dan sistematis, karena melibatkan momentum Otsus yang konon dinyatakan sebagai “batu loncatan” kesejahteraan Orang Papua.

» **Persepsi Problematika Papua Pra-Otonomi Khusus**

Sesungguhnya garis yang membela fase pra-Otsus dengan masa berlakunya Otsus tidak mengandung kebenaran mutlak untuk sebuah ukuran kemajuan manusia Papua, akan tetapi garis pemisah antara fase sebelumnya dan setelahnya, seharusnya berfungsi menjawab apakah terdapat perkembangan yang signifikan ataukah justru fluktuatif bagi Orang Papua itu sendiri. Ini berhubungan dengan cikal bakal persepsi yang melahirkan Undang-Undang Otsus. *Grievance* (keluhan) Orang Papua atas ketidakmerataan dan keadilan sosial di bawah kedaulatan Indonesia selama masa Orde Baru membangunkan kembali rasa kepercayaan sebagai bangsa yang utuh dan otonom atas nasibnya. Apa yang didorong oleh Papua kala itu adalah kebesaran hati bangsa Indonesia untuk menerima lapang dada kehendak bebas itu. Persepsi sekaligus respons pemerintah Indonesia, secara khusus dalam konteks kesejahteraan masyarakat, justru menyorotinya sebagai suatu kegagalan kebijakan (*policy*) negara. Klaim ini memaksudkan Indonesia tidak harus melepaskan Papua agar hidup sejahtera dan makmur— setidaknya untuk klaim ketidaksejahteraan Papua—namun realitas ketimpangan di Papua dapat diatasi melalui *power sharing* dalam suatu paket politik desentralisasi khusus.

Indonesia melihat masalah Papua sebagai *policy*, sedangkan Orang Papua menyorotnya sebagai sesuatu yang *grievance*. Antara *policy* dan *grievance*, dalam ukuran paling sederhana, kedua perspektif itu berasal dari deretan fenomena yang sama; kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi, kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan tidak merata, dan kecemburuan sosial akibat transmigrasi. Secara teori, intensitas *decision-making process* yang dialami pemerintah dalam tekanan seperti itu akan memaksimalkan kalkulasi rasional, menyeleksi pilihan kebijakan yang meminimalisir kerugian dan memaksimalkan peluang jangka panjang. Perhitungan rasional menunjukkan bahwa rekonsiliasi negara di Papua melalui Otonomi Khusus adalah masuk akal daripada mencederai kedaulatan. Reformasi politik desentralisasi Jakarta dan Papua meletakkan ekspektasi bahwasannya “Paket Otsus” mampu mengeliminir

aspek-aspek ketertinggalan, baik secara *spill over* maupun *trickle-down effect*, yang pada gilirannya meminggirkan isu-isu kemerdekaan. Namun, yang perlu kita perhatikan di sini adalah periode sebelum Otsus dan pasca-pengesahannya, kenyataannya mewarisi jejak- jejak *underdevelopment* (ketertinggalan) yang nyaris tidak mengalami perubahan signifikan.

» **Kilas Balik Kehidupan Orang Papua Pra-Otonomi Khusus**

Sejumlah laporan di Papua periode Pra-Otsus menggambarkan kondisi masyarakat yang tidak terdampak oleh pembangunan sama sekali. Survei Kesehatan Penduduk Papua yang dilakukan tahun 1997 memperlihatkan angka kematian bayi adalah 65 di setiap 1000 kelahiran, dan angka kematian anak adalah 30 per 1000 (Sugandi, 2008). Selama masalah primer ini belum terpecahkan, maka dorongan Orang Papua untuk urbanisasi ke kota karena rendahnya akses memiliki peningkatan yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Sekalipun perpindahan ke kota menambah jumlah penduduk yang dekat dengan akses, itu tidak mengubah fakta yang terjadi di kampung bahwa Orang Asli Papua (OAP) tetap adalah mayoritas penduduk di daerah- daerah terpencil memiliki akses yang lebih rendah terhadap kebutuhan pokok (Sugandi, 2008).

Di samping itu juga, sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan, 30% dari keseluruhan jumlah penduduk di Papua yang berdomisili di kota-kota terdiri atas 55% penduduk non-OAP dan 45% dari OAP (Sugandi, 2008). Implikasinya melebar ke aspek-aspek krusial kehidupan dan martabat Orang Papua. Benturan kebudayaan, seperti berkurangnya ruang gerak hidup (*lebensraum*) penduduk asli oleh karena ketegangan sosial ekonomi dan kesukuan dengan kedatangan transmigran cukup sering terjadi (Sugandi, 2008). Berbicara ekonomi bisnis, keterlibatan OAP sangat rendah yang artinya hampir keseluruhan pengusaha di Papua didominasi oleh kalangan pendatang. Ringkasnya, keterlibatan masyarakat asli Papua dalam sektor bisnis memang tersedia namun peluang dan kesempatan berkembang nyaris punah. Pada akhirnya, gambaran konteks Papua Pra-Otsus berada dalam taraf yang memprihatinkan bagi ukuran peradaban masyarakat abad ke-21.

» **Pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua: Menghitung Angka-Angka Capaian**

Pada tahun 2004, Tim Kajian Papua LIPI merilis Road Map Papua yang mengidentifikasi empat pokok akar masalah di Papua: Pertama, proses integrasi Papua ke Indonesia yang dipandang bermasalah oleh kalangan Pro-Papua yang resistensinya hadir sampai hari ini; Kedua, resistensi tersebut berkaitan dengan operasi militer dan kebijakan yang dinilai represif telah berkontribusi pada konflik berkepanjangan; Ketiga, karena nuansa konflik terus terjadi, maka dampaknya berada pada kegagalan pembangunan; Keempat, *spill over* kegagalan pembangunan memuncak hingga pada marginalisasi dan efek diskriminasi OAP (Widjojo & Budiatri, 2016). Rangkuman sebab-akibat di atas apabila mengaitkannya dengan tujuan Otonomi Khusus maka arah prioritas pembangunan di Papua harus bersandar pada aktual empiris pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tahun kedelapanbelas Otsus berlaku—sejak 2001 sampai 2019—signifikansi pengentasan masalah OAP tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Justru stagnasi tidak berubah disaat kekuatan finansial Otsus yang begitu besar. Terhitung sejak periode 2002- 2019 pengalokasian dana Otonomi Khusus di Papua mencapai Rp. 84 triliun (Mustikawati & Maulana, 2020). Dalam sektor pendidikan yang ditunjukkan melalui data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 adalah 60,84. Pada tahun berikutnya, menurun menjadi 60,44 (Badan Pusat Statistik, 2020). Demikian juga Angka Harapan Hidup (AHH) yang menjadi indikator kesehatan di Papua masih berada di bawah standar nasional yaitu 65,8 tahun 2020 sementara standar nasional adalah 71,47 pada tahun yang sama. AHH di Papua mencapai 65,8 pada tahun 2020 dari 65,2 pada tahun 2002 (Aldila, 2021). Selain itu, data statistik per Maret 2019 mengungkapkan penduduk miskin di Provinsi Papua adalah 926.360 jiwa atau mencakup 27,43% penduduk Papua yang tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2019; Mustikawati & Maulana, 2020). Ringkasnya, data-data dan deretan angka-angka bukan sesuatu yang final dalam mengkontekstualisasikan Papua tetapi setidaknya statistik itu dapat

digunakan sebagai alat ukur dan perbandingan kondisi Papua Pra-Otsus dan masa berlangsungnya Otsus, yang nyatanya belum menjawab harapan rakyat Papua.

ANALISIS, MANIFESTASI, DAN PENATAAN ULANG

» Analisis Konflik: Positive Peace and Negative Peace

Membedah konflik di Papua berpotensi menjadi bias atau salah kaprah oleh karena ketidakcakapan teoretis membaca elemen-elemen dasar kehidupan pokok Orang Papua. Meneruskan problematika Papua melalui eksplanasi statistik sebaiknya memosisikannya sebagai landasan empiris untuk menginduksikannya ke dalam teori *Positive Peace and Negative Peace* dari seorang sosiolog Norwegia yaitu Johan Vincent Galtung. Berbicara perdamaian, menurut teori Galtung, kita harus memahami pengertian dan dimensi *violence* (kekerasan). Kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab dari perbedaan antara potensial dan yang sebenarnya, antara apa yang bisa terjadi dan tidak terjadi (Galtung, 1969). Dengan kata lain, ketika potensi lebih tinggi dari yang sebenarnya dapat dihindari, maka kekerasan hadir. Ketika potensi yang sebenarnya tidak dapat hindari, maka kekerasan tidak hadir. Jadi apabila seseorang meninggal karena tuberkulosis di abad ke-18 akan sulit menganggap ini sebagai kekerasan karena mungkin tidak cukup untuk dihindari, tetapi jika dia meninggal hari ini, terlepas dari sumber daya medis di dunia, maka kekerasan hadir dalam definisi kita (Galtung, 1969).

Jika sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau kelas tertentu dengan tujuan lain, maka itu adalah jenis kekerasan. Kekerasan terjadi dalam dua tipe; personal (*direct*) dan structural (*indirect*). *Personal violence* memiliki korelasi sebagai *negative peace* yang mengilustrasikan bahwa kekerasan langsung terjadi dalam bentuk konflik-konflik sipil yang bersifat fisik, seperti konflik agraria, aksi nirkekerasan, dan gerakan separatisme. Sedangkan structural violence berkorelasi dengan *positive peace* yang mengindikasikan ketidakhadiran keadilan sosial atau *present of social justice*, misalnya korupsi, kemiskinan, dan rasisme. *Negative peace* berbicara tentang sesuatu yang tidak terjadi kekerasan. *Positive peace*

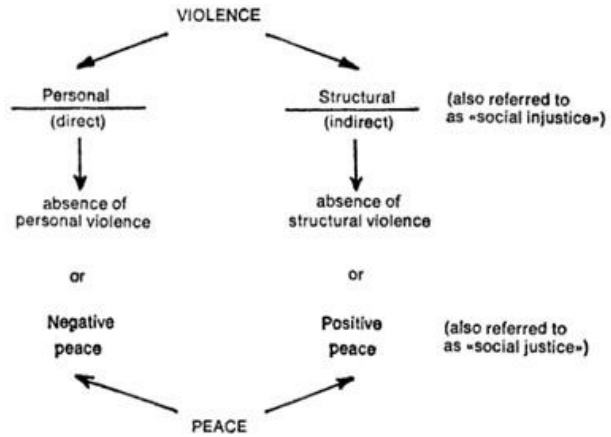
mengatakan kehadiran keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam memahami studi kasus konflik, keterbelakangan, dan gagalnya pembangunan di Papua, teori *negative peace* dan *positive peace* dapat diaplikasikan sebagai landasan konseptual. *Negative*

peace (direct violence) di

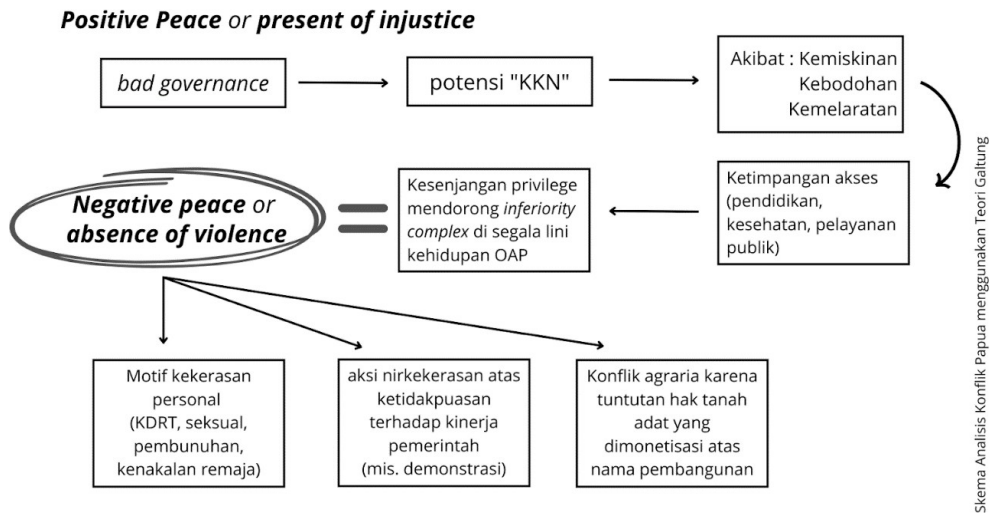
Papua dapat kita temukan melalui tiga fakta empiris: (1) kekerasan yang paling sering terjadi di Papua meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual (pemeriksaan), dan tindakan asusila hingga pembunuhan sesama OAP; (2) aksi nirkekerasan seperti demonstrasi mahasiswa lebih sering terjadi atas tuntutan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan juga ditanggapi oleh gagasan kemerdekaan; (3) konflik agraria di tanah-tanah adat memancing ketegangan sosial antara masyarakat dan kelompok kepentingan, mengingat tanah adalah martabat masyarakat namun termonetisasi oleh kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi *negative peace* atau *absence of direct violence* tidak lahir begitu saja, karena konflik juga dilanggengkan oleh eksistensi *present of injustice (positive peace)*.

Konflik Papua dari sudut pandang *positive peace* menunjukkan lima rantai fakta empiris yang saling berpengaruh satu sama lain: (1) tata kelola (governance) dari pemerintah dan stakeholder terhadap sumber daya di Tanah Papua yang berkinerja buruk; (2) akibatnya adalah terdapat celah di tengah kekuasaan yang mendorong peluang terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); (3) KKN merupakan faktor dominan struktural yang menyebabkan kasus-kasus kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan di Papua sehingga kita seharusnya memahami bahwa kemelaratan di Papua itu bukanlah *destiny* (takdir) melainkan disokong oleh sistem yang



Negative Peace and Positive Peace Theory (Galtung, 1969)

buruk; (4) kemelatan di Papua diperparah dengan ketimpangan akses-pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik—sehingga mengakibatkan kesenjangan privilege di Indonesia; (5) kesenjangan privilege berkontribusi bagi *inferioritas complex* yang inklusif di semua lini kehidupan OAP, seperti kegagalan studi di pendidikan tinggi, ketidakpercayaan diri berkompetisi di dunia bisnis, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang progresif di kota-kota Indonesia.



» Manifestasi Underdevelopment di Papua: Realitas Kultural dan Implikasinya

Manifestasi struktur yang timpang dan senjang mengintervensi pola-pola kultural manusia Papua. Struktur tersistematisasi dalam paradigma kebijakan-kebijakan yang memandang gaya hidup tradisional OAP haruslah bergeser kepada budaya yang lebih modern.

Hal ini direpresentasikan dalam Operasi Koteka, di mana sebuah kampanye militer Indonesia ditujukan untuk memengaruhi OAP di wilayah pegunungan meninggalkan aspek-aspek dari kebudayaan asli setempat, menempuh pendidikan agar menjadi modern secara ekonomi dan mengadaptasi identitas Indonesia yang lebih umum (Sugandi, 2008). Salah satu faktor pendorong operasi tersebut adalah ketidakseimbangan kekuasaan terhadap persepsi penduduk asli bahwa budaya-budaya tradisional/lokal sebagai “terbelakang” dan “tidak beradab”, dan tentu

karena itulah strategi memperlakukan (*humiliation strategy*) dengan atas nama pembangunan telah mendorong keyakinan luas masyarakat atas ketidakberhargaan budaya mereka (Sugandi, 2008). Proses yang terjadi seiring waktu menimbulkan perasaan rendah diri atau inferiority complex dalam perubahan sosial yang seharusnya mereka emban.

Inferiority complex merupakan realitas kultural sebagai akibat ketimpangan struktural di Tanah Papua, dari kebanyakan studi yang dilakukan menyatakan kekuatan jiwa Orang Papua dalam kompetisi dan persaingan bebas menunjukkan keprihatinan. Fakta empiris menggambarkan kekawatiran bagi kita bahwasannya ketidaksiapan anak muda masuk dalam persaingan bebas dunia-dunia *entrepreneur*, inovasi sosial, dan STEM-mengindikasikan kurangnya kepercayaan diri yang berbahaya bagi generasi mendatang. Sejumlah kampus ternama di Pulau Jawa menerima puluhan pelajar Papua setiap tahunnya, akan tetapi tidak semuanya mampu menyelesaikan studi tepat waktu atau bahkan memutuskan kontrak studi sebelum masanya. Hanya ada dua motif untuk memahami fenomena tersebut; mentalitas yang miskin (budaya kemiskinan) dan *inferiority complex*. Akibat jangka panjang di waktu mendatang adalah minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan di Papua dan konstruksi sosial yang secara internal mendiskreditkan keunggulan potensial OAP serta stigma atau stereotip ketidakberdayaan OAP.

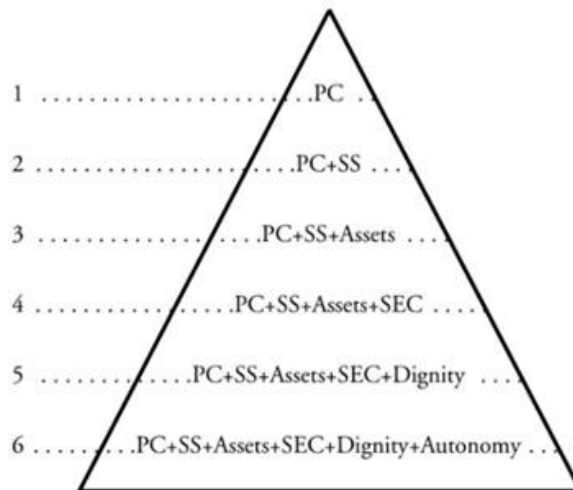
» **Pyramid of Development: Menata Ulang dari Bawah**

Alur tulisan ini memulai dari persepsi kebijakan, analisis kritis ketimpangan struktural dari perspektif teori Galtung, sampai kembali lagi pada implikasi persepsi. Tandanya, ketika berdiskusi mengenai pembangunan Papua kita seharusnya menempatkan persepsi sebagai modal dialog gagasan yang berjejaring. Gagasan pembangunan di Papua belum final, dalam arti sejauh mana kondisi sebelum dan setelah Otsus, masyarakat Papua masih terjerat keterbelakangan di dalam pembangunan, yang membuat pembangunan itu bersifat semu. Oleh karena itu, untuk memahami konteks kebutuhan dasar pembangunan di Papua, sebaiknya kita mengacu pada teori yang dibuat oleh White & Killick (2001) yaitu *Pyramid of Poverty Concepts*. Menurut sejarahnya, konsep ini diprakarsai

untuk membedah kasus-kasus kemiskinan di benua Afrika yang notabene terbelakang. Namun, penggunaannya di sini tidak mengartikan Papua adalah “Afrika” di Indonesia, melainkan lokus elemen-elemen teori yang kontekstual memiliki konsentrasi terhadap pembangunan yang fundamental bagi model masyarakat majemuk. Sehingga pemilihan teori *Pyramid of Poverty* diyakini relevan dengan analisis pembangunan komprehensif di Papua.

Teori *Pyramid of Poverty* terdiri atas susunan kategori hirarkis dengan manfaat mengidentifikasi perbedaan sistem nilai pembangunan yang melekat dalam konteks sosial suatu jenis masyarakat tertentu. White & Killick (2001) menerangkan irisan dan urutan keenam elemen yang menjadi bangunan piramida tersebut, sebagai berikut: *PC* sebagai Private Consumption, *SS* sebagai aksesibilitas layanan publik, *Assets* diartikan sebagai input produktif, *SEC* artinya tingkat kerentanan dan insecurity, *Dignity* dan *Autonomy* saling berhubungan dalam ketergantungan mar-tabat dan pengucilan sosial.

Bagaimana teori ini diaplikasikan dalam menata pembangunan di Papua? Secara berurutan elemen-elemen piramida akan dikorelasikan dengan konteks kebutuhan dasar hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam peradaban masyarakat.



Pyramid of Poverty Concepts (White & Killick, 2001)

1. "Private Consumption" (PC) mencakup kebutuhan primer Orang Papua; makanan, pakaian, dan rumah harus terjamin tanpa terkecuali di setiap keluarga.
2. "SS" mengacu pada layanan yang biasanya disediakan oleh negara maupun kadang-kadang juga oleh swasta; setelah kebutuhan primer terpenuhi maka kita memastikan bahwa Orang Papua bersekolah, dapat mengakses pelayanan kesehatan, masyarakat di kota dan kampung mengakses air bersih, dan menikmati infrastruktur sipil bagi mobilisasi masyarakat. Pembangunan fisik tentu mengakomodasi aksesibilitas dengan memperpendek jarak dan waktu untuk lebih dekat dengan peluang dan kesempatan. Bagian ini cenderung menekankan aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
3. "Assets" dapat diartikan sebagai kepemilikan barang yang digunakan sebagai modal kapital-produktif dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya; biasanya Orang Papua mewarisi tanah, bangunan tertentu, dan kemungkinan Orang Papua memiliki lapak dagang. Benda-benda yang tergolong *assets* menjadi indikator ekonomi mandiri di masyarakat Papua, jika sebagian besar tidak memiliki *assets* seperti yang disebutkan di atas maka pemerintah perlu memproduksi kebijakan yang merangsang pengelolaan aset produktif. Ini punya nilai urgensi bagi standar kemajuan Orang Papua. Setidaknya setiap angkatan produktif-anak muda-Papua difasilitasi menjadi wira-usahawan, inovator sosial, dan sebagaimana itu semua terprogram dalam progresivitas peradaban global.
4. "SEC" mengaitkan tingkat kerentanan dan ketidakamanan (*insecurity*) masyarakat Papua atas gejolak politik, sosial-budaya, dan ekonomi, di mana seringkali menunjukkan ketidakpastian untuk bangkit kembali. Kasus yang sering terjadi dan mudah ditemukan adalah sangat jarang Orang Papua untuk bisa *survive* dalam sektor bisnis, sehingga hampir keseluruhan sektor bisnis industrial Papua dikendalikan oleh non-OAP. Berkaitan dengan *assets*, jikalau kepemilikan modal kapital Orang Papua harus dibersamai dengan perangkat kebijakan

yang memayungi hak mereka untuk maju dan tidak kalah saing. Dalam upaya ini, pemerintah dan stakeholders berperan merekayasa kebijakan yang protektif agar hak-hak orang asli untuk berwirausaha mendapatkan kesempatan yang sepadan dengan yang lainnya, meskipun memang harus dimulai dari tahap paling dasar—edukasi kembali—apabila komitmen pemerintah adalah membudayakan masyarakat secara ekonomi dan politik.

5. “Dignity” dan “Autonomy” berhubungan dengan modal sosial Orang Papua. Keempat elemen sebelumnya memang berlaku mekanistik dengan memperhatikan konteks ekosistem global, namun pada tujuannya akhirnya harus membawa Peradaban Tanah Papua menuju kemandirian dalam nilai-nilai orisinal yang lestari dari generasi ke generasi. Karena kita tidak sedang membangun “manusia ekonomi Papua”, justru secara idealisme adalah manusia Papua yang berkebudayaan dan mandiri. Hal ini tercermin dalam nasihat-nasihat budaya bahwa pembangunan hari ini harus menyokong masyarakat Papua yang otonom atas hidupnya, terbebas dari pengekanan struktural.

Sekali lagi, apa yang kita bicarakan merupakan bagian kontribusi pembangunan Peradaban Papua pada masa depan yang berkesinambungan. Itulah mengapa tahapan pembangunan komprehensif harus ditata dari aspek yang paling dasar dan krusial, agar “kolom” paling kecil terpenuhi maka itu mendorong pemenuhan “kolom-kolom” berikutnya. Juga, ini harus dilakukan dengan *political will* yang bekerja di poros kekuasaan. Bagaimana pemangku kebijakan memenuhi kebutuhan anak sekolah di kampung-kampung dengan akses yang setara dengan mereka yang berada di kota tanpa diskriminasi tertentu. Pemerintah menyediakan akses informasi usaha kreatif bagi pemuda-pemudi sebagai garda muda penggerak ekonomi yang berkebudayaan. Mereka yang merintis usahanya supaya tidak mudah merosot, maka regulasi perlu untuk merekayasa “batu lompatan” persaingan dengan memperhatikan keadilan sosial, agar *market* terjadi secara proporsional. Pada dampak jangka panjang, proses

dan sistem seperti itu mensistematisasi konstruksi Peradaban Papua untuk generasi yang akan datang.

PENUTUP: REFLEKSI MASA LALU, MASA KINI, MASA DEPAN

Membangun Papua bukan pekerjaan satu hari langsung jadi. Tanah Papua sejak zaman pra-kolonial hingga integrasi ke NKRI punya sejarahnya sendiri yang membuatnya berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Perbedaan historisitas tersebut menuntun Tanah Papua untuk harus memikirkan kembali konstruksi sosialnya dalam jalinan interaksi-interaksi kultural, mengingat martabat Orang Papua adalah menjadi diri sendiri dalam artefak budayanya masing-masing. Sejarah bagaikan kurator seni untuk memahami konteks sosial-budaya di Papua, telah menyumbangkan gagasan besar yang selalu diangkat dalam setiap riset bahwa kekayaan etnografi menjadi keunikan Tanah Papua dalam menyelenggarakan pembangunan orisinilnya. Sehingga pembangunan yang kontekstual bukan berarti kebenaran absolut, tetapi cenderung menavigasi aspirasi dan pluralitas ide terhadap model pendekatan yang seharusnya mengandung inklusivitas dan emansipasi nilai, kebiasaan, dan norma masyarakat. Ketika semua itu terhubung maka kerangka dasar pembangunan memerlukan introspeksi lebih lanjut melalui rekonstruksi arah pembangunan Papua. Rekonstruksi persepsi memandang konflik di Papua, rekonstruksi pendekatan masyarakat Papua, serta rekonstruksi dari “bawah menuju atas” Peradaban Papua. Perdamaian Papua dapat dikejar dengan mencoba menggeser sudut pandang, menerobos batas-batas ketidakmampuan, menemukan solusi, dan membangun kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, N. (2021, June 7). *Menkes: Pembangunan Kesehatan di Papua dan Papua Barat Membaik*. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210607/15/1402279/menkes-pembangunan-kesehatan-di-papua-dan-papua-barat-membaik>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 81. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2401>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua*. Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf>
- White, H., Killick, T., Kayizzi-Mugerwa S, S., & Savana M-A (Marie-Angelique) White. (2001). *African poverty at the millennium : causes, complexities, and challenges*. The World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/104521468767420556/African-poverty-at-the-millennium-causes-complexities-and-challenges>
- Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016). UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA :
MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.449>

TANAH PAPUA: MERAYAKAN PERDAMAIAN ATAU MENGHILANG DALAM REPRESI KEBIJAKAN?

Hyasintus Asalang

Email: hyasintasalang1199@gmail.com

PENDAHULUAN

Perdamaian merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dan penuh dengan makna mendalam. Kebenaran yang mendasar adalah bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat diberikan. Perdamaian bukanlah hanya sekedar ketiadaan perang, tetapi juga melibatkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara semua manusia di seluruh dunia.

Namun hingga saat ini, tatanan ideal itu masih jauh terjadi di Tanah Papua. Papua masih diberi label sebagai daerah yang bermasalah bahkan tercatat sebagai daerah konflik bersenjata yang bernuansa kekerasan terlama di Indonesia. Konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami akar persoalan di Papua atau memperebutkan kepentingan tertentu.¹ Konflik yang telah berakar dalam sejarah yang lama dan panjang kini menjadi semakin kompleks. Karena itu penyelesaian melalui ekonomi dan dialog masih belum cukup untuk menciptakan perdamaian di seluruh Tanah Papua.

Penulis memakai metode deskriptif untuk menjelaskan secara mendasar kondisi di Papua, dan metode persuasif yakni menggunakan

¹ Adriana Elisabeth, dkk, 2005. *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, 2005, hal. 1.

argumen dan fakta untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya membangun perdamaian di Papua.

PAPUA TERJEBAK DALAM LINGKARAN KONFLIK

Karya-karya yang menjadi bahan acuan berkaitan dengan perdamaian antara lain: MacLeod², Budiardjo & Liong³, Widjojo⁴. Buku-buku tersebut pada umumnya menarasikan akar persoalan konflik yang terjadi secara umum dan yang terjadi di Papua sehingga pembaca diarahkan untuk memahami akar masalah yang terjadi di Papua.

Meskipun demikian, penulis juga ingin meninjau dan memberikan dasar yang bersifat persuasif tentang kedudukan Negara yang seharusnya bertanggungjawab dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Oleh karena itu, buku-buku yang menjadi acuan di antaranya ialah Anderson⁵, Herman & Chomsky⁶, Frantz & Farrington⁷, The Arbinger Institute⁸ dan Silver⁹.

Berdasarkan landasan berpikir di atas, dapat dirunut bahwa konflik Papua disebabkan oleh ketidakpuasan sejarah dan kurangnya otonomi politik, serta bagaimana gerakan perlawanan sipil dapat membantu memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat secara damai. Gerakan perlawanan sipil pada prosesnya dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perdamaian. Meskipun demikian peran yang diambil oleh pemimpin gereja, mahasiswa, dan anggota parlemen masih belum cukup untuk mengatasi konflik yang lama dan

² Jason, MacLeod, 2015. *Merdeka And The Morning Star: Civil Resistance In West Papua (New Approaches To Peace and Conflict)*. Australia: University of Queensland Press.

³ Carmel Budiardjo, dan Soei Liem Liong, 1988. *West Papua: The Obliteration of a People*. Thornton Heath: Tapol.

⁴ Muridan S. Widjojo, dkk, 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

⁵ Dean Anderson & Linda Ackerman Anderson, 2001. *Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders*. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.

⁶ Edward S. Herman & Noam Chomsky, 1988. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.

⁷ Frantz Fanon, 1994. *Black Skin, White Masks*. London: Pluto Press.

⁸ The Arbinger Institute, 2006. *The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

⁹ Nate Silver, 2012. *The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail — but Some Don't*. New York: The Penguin Press.

berkepanjangan.¹⁰ Secara lebih tajam Budiarto dan Liong menyoroti kelemahan Negara dalam menciptakan perdamaian. Pemerintah Indonesia yang cenderung menggunakan kekerasan untuk menindak warga Papua yang menuntut hak-hak mereka. Peran militer Indonesia dalam konflik di Papua dan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan semakin memperumit adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh warga Papua dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.¹¹

Berbagai konflik di Tanah Papua menurut Widjojo, dkk harus diatasi melalui dialog dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Papua. Adanya potensi pembangunan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketegangan di Tanah Papua. Upaya perdamaian juga dapat dilakukan melalui rekonsiliasi sosial dan penyelesaian konflik jangka panjang melalui dialog dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.¹² Semuanya itu menjadi sumber penting untuk memahami sejarah dan dinamika konflik serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua. Namun, cerita lama ini selalu berulang tanpa ada penyelesaian mendasar hingga sekarang.

PENTINGNYA KRITIK TERHADAP MAKRO

Untuk menciptakan perdamaian diperlukan perubahan besar dan bukan perubahan kecil. Karena itu kritik terhadap Negara menjadi hal yang paling mendasar dibebankan. Pertanyaan klasiknya ialah: Bagaimana ingin mengubah yang besar kalau yang kecil tidak bisa diubah? Bagaimana perdamaian bisa terwujud pada seluruh tempat di Tanah Papua jika setiap individu tidak mampu mewujudkan perdamaian itu di tempat mereka? Pertanyaan ini benar dalam konteks perubahan dari dalam diri namun keliru dalam konteks yang lebih luas. Jika hanya konteks mikro ini yang dikedepankan, maka orang akan masuk

¹⁰ MacLeod, *Op. Cit.*, hal. 32.

¹¹ Budiarto & Liong, *Op. Cit.*, hal. 78.

¹² Widjojo, *Op. Cit.*, hal. 72.

dalam jebakan parsialitas. Jadi kalau dicicil: Jangan bersuara lantang pada Negara tapi benahi dulu masyarakatnya; dipersempit lagi: Jangan benahi masyarakatnya, tapi benahi keluarganya; dipersempit lagi: Jangan benahi keluarganya, tapi benahi dulu moral anak-anaknya; dan seterusnya hingga akhirnya suara lantang itu makin lama makin mikro, dan makronya pun hilang.

Pendekatan untuk perubahan haruslah difokuskan pada transformasi yang holistik dan jauh lebih dalam. Perubahan besar yang signifikan dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada perubahan kecil yang terfragmentasi.¹³ Oleh karena itu Negara bertanggungjawab dalam menciptakan perdamaian. Kalau Negara menjamin perdamaian, pasti akan ada perdamaian. Design kesalahan dimulai dari Negara yang tidak punya konsep utuh tentang Tanah Papua. Seluruh imajinasi tentang Papua akan tumbuh ke arah masa lalu. Papua punya dua nasionalisme: yang pertama dari Negara dan kedua dari pemberian masa lalu bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia melainkan dari Melanesia dari segi etnis, kulit, ras Melanesia. Nasionalisme ini tumbuh dalam alam pikiran masyarakat Papua melalui warisan cerita, mitologi, *social origin*. Bahayanya bahwa Negara hanya melihat Papua itu sebagai lokasi NKRI bukan sebagai *sub culture* yang tumbuh dengan identitasnya sendiri. Dalil ini yang dimanupulasi sehingga masyarakat di Tanah Papua dikondisikan untuk terus menerus merasa cemas.

PERSEPSI KOTOR PADA PAPUA

Perdamaian sulit dicapai karena pandangan yang sempit dan egois, yang menghalangi kemampuan untuk melihat orang lain sebagai manusia yang sama. Maka diperlukan upaya untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.¹⁴ Hal ini sulit karena Papua direpresi oleh kebijakan Negara dan oleh persepsi publik. Ada persepsi buruk tentang Papua. Misalnya menolak rasisme terhadap orang Papua, tapi ketika terjadi kekerasan,

¹³ Anderson, Dean & Anderson, Linda, *Op. Cit.*, hal. 53.

¹⁴ The Arbinger Institute, *Op. Cit.*, hal. 128.

hal itu dianggap wajar, karena itu ada di Papua. Persepsi keberpihakan yang sebenarnya harus dijunjung tinggi, malah dilihat sebagai hal yang biasa karena itu terjadi di Papua. Bahkan ketika terjadi konflik, internet pun dianggap sebagai media provokasi. Ketika internet dimatikan, maka kesimpulannya bahwa semua orang di Papua adalah provokator. Ini adalah persepsi kotor terhadap Papua. Banyak orang menutup mata dan kuping untuk melihat masalah yang substansial.¹⁵

Negara saat ini mempunyai tugas kenegaraan dengan membuat kebijakan humanis terhadap Papua. Terlalu pro terhadap infrastruktur dengan melakukan banyak kunjungan hanya untuk memudahkan untuk investasi. Orang Papua hanya jadi penonton, sedangkan kemanusiaan yang seharusnya lebih diutamakan harus dikesampingkan. Negara harus mengatasi problem Papua, bukan hanya sekadar menanggulangi situasi hari ini. Situasi hari ini akan berlomba dengan kebaikan dan kecerdasan Negara menangani Papua. Kalau Negara muncul bukan sekadar wajahnya, bukan sekadar presensi datang ke Papua, tapi hadir dengan kebijakan dan rencana, hal ini akan luar biasa karena akan meniadakan, membunuh hasrat-hasrat jahat di dalam persepsi tentang Papua.

PENTINGNYA KETERBUKAAN NEGARA TERHADAP TANAH PAPUA

Papua hanya dianggap sebagai tempat yang operasi militer. Negara berusaha keras merespon segala peristiwa keamanan yang terjadi dan hanya menempatkan diri untuk memadamkan percikan kecil di ladang rumput yang luas dan kering, tanpa ingin tahu akar masalah yang dalam, dan sudah berlangsung lama. Namun intensinya supaya tidak gaduh, bukan supaya melakukan perbaikan pada problem substansial. Kegagalan memahami antropologi Papua lantas membuat orang berpikir bahwa Papua hanya bisa ditindas secara militer.

¹⁵ Bdk. Tentang perlakuan terhadap orang kulit hitam di Amerika sering kali merasa tidak diakui dan tidak dihargai, merasa terasing dan tidak memiliki identitas yang jelas dalam masyarakat yang didominasi oleh orang kulit putih, Fanon, *Op. Cit.*, hal. 193.

Keterbukaan Negara terhadap Papua dimulai dengan melihat Papua secara jujur, bukan hanya dengan dialog tetapi upaya terkoordinir dari Negara untuk mengevaluasi bukan hanya soal keamanan dan penegakan hukum, tapi juga mengevaluasi praktek-praktek bisnis yang ada di Tanah Papua. Karena harus dilihat bahwa tujuan memperburuk situasi di Papua adalah dalam rangka merampok. Media juga harusnya tidak digunakan sebagai saluran propaganda dan harus melihat Papua secara komprehensif. Hak publik untuk mengetahui informasi yang utuh juga tidak ada. Itu pentingnya ada sosiolog, feminis, antropolog, ahli etis, supaya perspektifnya ditemukan.¹⁶

PENUTUP

Papua perlu dirawat, ditangani dengan cara yang unik dan spesifik. Negara harus datang mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang ada di Tanah Papua. Pendekatan akademis melalui perspektif sosio antropologi yang harus diperkuat. Semestinya ada semacam desakan yang jujur bahwa memang ada perbedaan perspektif antara Negara dan perspektif yang datang dari hutan- hutan Papua. Negara harus terbuka dan berdamai dengan antropologi Papua sehingga hanya dengan mengamati burung cenderawasih yang butuh hutan, Negara paham arti menjadi orang Papua. Dengan demikian tidak ada lagi pembicaraan soal monyet tapi soal babi, tidak ada lagi bicara soal gedung, harga semen, tapi bahagia dengan honai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Dean & Anderson, Linda Ackerman, 2001. *Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders*. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
- Budiardjo, Carmel dan Liong, Soei Liem, 1988. *West Papua: The Obliteration of a People*. Thornton Heath: Tapol.

¹⁶ Silver, *Op. Cit.*, hal. 87.

- Elisabeth, Adriana, dkk, 2005. *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press, 2005.
- Fanon, Frantz, 1994. *Black Skin, White Masks*. London: Pluto Press.
- Herman, Edward S. & Chomsky, Noam, 1988. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- MacLeod, Jason, 2015. *Merdeka And The Morning Star: Civil Resistance In West Papua (New Approaches To Peace and Conflict)*. Australia: University of Queensland Press.
- Silver, Nate, 2012. *The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail — but Some Don't*. New York: The Penguin Press.
- The Arbinger Institute, 2006. *The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Widjojo, Muridan S, dkk, 2008. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

UPAYA MEMBANGUN PAPUA TANAH DAMAI MENGGUNAKAN TEORI JOHAN GALTUNG

Debi Debora Okowali¹

PENDAHULUAN

Damai merupakan kebutuhan kodrat manusia, maka dalam hidupnya manusia senantiasa mendambakan hidup yang aman, nyaman, harmonis dan hidup bebas tanpa haknya dikekang dan dieksploitasi oleh pihak lain. Namun tidak dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan seringkali menyimpang dari kehidupan yang bermoral. Eric Weil dalam bukunya mengatakan manusia secara kodrati memiliki potensi untuk menjadi rasional dan berpotensi jahat (irasional). Dengan kehendak bebas yang dimilikinya dapat memilih salah satu potensi untuk mewujudkannya. Setiap pilihan ada konsekuensinya, ketika memilih potensi rasional untuk mewujudkannya, maka orang akan hidup damai. Jika memilih potensi kekerasan (irasional), maka ia harus menerima bila dideterminasi hasrat egoistik yang dapat berujung pada munculnya kekerasannya [1].

Namun bukan berarti potensi irasional tersebut dipakai sebagai alat legitimasi perbuatan jahat yang sengaja dipelihara atau dibiarkan tanpa ada upaya praksis untuk menciptakan kehidupan yang rasional, dalam arti kedamaian. Itulah sebabnya Visi Papua Tanah Damai sebagai tema utama kampanye tokoh-tokoh gereja dan aktivis kemanusiaan di Tanah

¹ *Mahasiswi Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga*

Papua setelah sekian tahun lamanya melihat dan merasakan berbagai konflik tak berujung sebagai penyebab utama pembangunan Papua tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Konflik di Papua pada umumnya banyak, baik konflik yang berdimensi politik, sosial, budaya, ekonomi dan ekologi. Namun dari semua itu, konflik Politik menjadi akar masalah utama terjadinya berbagai konflik di Tanah Papua. Kekerasan, intimidasi, pembunuhan, diskriminasi, rasisme, marjinalisasi, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, pembungkaman ruang demokrasi dan segala bentuk kekerasan lainnya menyelimuti kehidupan orang asli Papua sejak diintegrasikan ke Indonesia melalui PEPERA tahun 1969. Situasi dan kondisi ini terus berlanjut walaupun Otonomi Khusus Papua digulirkan tahun 2001 sebagai *win win solution* atas konflik politik yang berlangsung sejak awal tahun 1960-an hingga saat ini. Hasil kontrak politik yang termuat dalam UU Otonomi Khusus Papua belum sungguh-sungguh diimplementasikan oleh Pemerintah sehingga terjadi degradasi trust yang sangat mendalam dan dianggap sebagai strategi temporer untuk meyakinkan masyarakat Papua demi meredam tensi tuntutan Papua merdeka yang tinggi saat itu. Soleman B. Pontoh, Mantan Kepala BAIS TNI yang juga ikut terlibat sebagai tim perundingan damai RI-GAM menulis sebuah artikel berjudul “Dua Dekade Otsus Setengah Hati, Kepala Dilepas Ekor Dipegang”. Dalam artikel tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat “setengah hati” dalam memberikan Otsus Papua jika dibandingkan dengan Otsus Aceh. Bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Pasal 4 Ayat 1. Ada tambahan frasa “kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Penambahan frasa tersebut menjadi dasar sewaktu-waktu Pemerintah Pusat bisa intervensi tergantung situasi politik, sebagaimana terjadi belakangan ini Pemerintah Pusat melakukan revisi undang-undang Otsus jilid 2 dan pemekaran 4 Provinsi secara sepihak tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua. Berbeda dengan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 4 tidak ada embel-embel kewenangan tertentu ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan [2]. Hal tersebut menunjukkan

bahwa Pemerintah Pusat tidak jujur dan sepenuh hati berikan Otsus kepada Papua atau meminjam istilah Soleman B. Pontoh “Kepala Dilepas Ekor Dipegang” . Selain UU Otsus, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua periode dan dilanjutkan dua periode berikutnya Presiden Joko Widodo memimpin telah mengeluarkan berbagai Perpres tentang Badan/Tim/Unit percepatan pembangunan Papua, namun sama sekali belum mampu memadam bara api konflik yang selama puluhan tahun merenggut ribuan korban masyarakat sipil, TPN-OPM dan TNI/Polri. Konflik terus berlanjut dan hampir tiap hari/minggu kita mendengar informasi berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan terjadi di seantero Papua. Seakan-akan kita sengaja membiarkan konflik terus mengalir dan tak berujung tanpa ada upaya “Perdamaian Abadi” sebagaimana bunyi alinea ke empat Pembukaan Undang- Undang Dasar.

Upaya mewujudkan Papua Tanah Damai adalah visi masa depan bersama, impian bersama, dan harapan bersama dari semua orang di Tanah Papua. Papua Tanah Damai merupakan suatu tatanan ideal yang masih harus diperjuangkan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan[3]. Dalam rangka itu, maka artikel ini menulis tentang bagaimana membangun Papua Tanah Damai dengan pendekatan teori Johan Galtung. Ia adalah sosiolog dan matematikawan Norwegia yang merintis disiplin studi perdamaian dan konflik. Secara umum Johan Galtung memberikan tiga model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yakni *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Namun dalam artikel ini hanya menggunakan dua model pendekatan, yaitu *peacemaking* dan *peacebuilding* yang akan diadaptasi sesuai dengan realitas konflik Papua, terutama penyebab, aktor dan konteks terjadi konflik. Sebab penyelesaian konflik dengan teori apapun dengan melupakan konteks seringkali tidak berujung pada tercapainya perdamaian.

AKAR KONFLIK PAPUA

Ada beragam jenis konflik di Papua, baik yang berdimensi politis, ekonomis, sosial, budaya, ekologi, Hukum dan HAM dan sebagainya. Namun tim dari LIPI mengidentifikasi empat akar masalah utama, yaitu (1) Kegagalan Pembangunan, (2) Marjinalisasi dan Diskriminasi Orang Asli Papua, (3) Kekerasan Negara dan Tuduhan Pelanggaran HAM (4) Sejarah dan Status Politik Wilayah Papua [4]. Empat akar masalah ini menjadi acuan utama untuk mencari solusi perdamaian di Tanah Papua.

1. Persoalan Sejarah dan Status Politik Wilayah Papua

Indonesia berjuang merebut Papua dari Belanda dengan jalur diplomasi dan konfrontasi. Diplomasi pertama tanggal 24 Maret 1950 diadakan Konferensi Tingkat Menteri di Jakarta antara Indonesia dengan Belanda, namun tidak membuahkan hasil yang berarti. Berlanjut ke Konferensi Asia–Afrika di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955 dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Pada kesempatan itu Indonesia mencari dukungan berbagai negara untuk membebaskan Papua. Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan diberlakukannya UU No. 13 Tahun 1956. Indonesia untuk pertama kalinya Indonesia mengajukan masalah Papua dalam sidang Umum PBB pada tahun 1954. Namun belum mendapat atensi yang cukup dari PBB sehingga kembali perjuangkan dengan jalur konfrontasi militer dan ekonomi. Bentuk-bentuk konfrontasi itu antara lain: (a) Aksi mogok para buruh pada perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. (b) Pemutusan hubungan konsulat Belanda di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1957. (c) Nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. (d) Pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat di Sao Siu pada tanggal 17 Agustus 1956. Gubernur pertama yang ditunjuk adalah Sultan Tidore yaitu Zaenal Abidin Syah. Beliau secara resmi dilantik pada tanggal

23 September 1956. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1960 [7]. Sementara Indonesia berjuang untuk mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia, para tokoh intelektual Papua yang disiapkan oleh Belanda menginisiasi kemerdekaan Papua. Manifesto politik yang dibuat oleh Anggota Komite Nasional pada 19 Oktober 1961 yang terdiri dari Nicholaas Jouwe, E.J. Bonay, Nicholaas Tanggahma, dan F. Torey. Dalam manifesto tersebut, Komite Nasional mendesak Pemerintah Belanda memberikan hak bagi Papua untuk berdiri sendiri sebagai bangsa merdeka. Pada 1 Desember 1961 masyarakat Papua mendeklarasikan kemerdekaannya di kantor-kantor Hoofd van Plaatselijk (HPB), untuk pertama kalinya Bendera Bintang Kejora berkibar di samping Bendera Belanda. Inisiasi kemerdekaan masyarakat Papua yang didukung oleh Pemerintah Belanda tersebut direspon oleh Indonesia dengan mendekrasikan TRIKORA. (e) Perjuangan Pemerintah Indonesia melalui TRIKORA dikumandangkan di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961 oleh Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai panglima dalam penyerangan terhadap Belanda dan membubarkan Negara Papua yang baru dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961.

Dalam rangka menyukseskan TRIKORA, maka Indonesia bekerja sama dengan Uni Soviet mendatangkan alutsista berupa kapal selam, tank, kapal roket cepat, pesawat tempur, helikopter, peralatan amfibi, dan berbagai persenjataan berat. Situasi tersebut dibaca cepat Presiden Amerika Serikat. Demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional dan geopolitik wilayah pacific maka John F. Kennedy turun tangan membujuk Belanda dan sekaligus memberikan jaminan kepada Indonesia atas status Papua. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi kepada Belanda. Intervensi Presiden Amerika Serikat tersebut membuahkan hasil dengan ditandatanganinya *New York Agreement* pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Subandrio dan Belanda oleh Van Royen dan Schuurman serta disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker. Isi perundingan New York antara lain: Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962,

pemerintah sementara PBB yaitu UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) akan tiba di Irian Barat. Berdasarkan perundingan New York, Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Pelaksanaan PEPERA melalui mekanisme *one man one vote*. Pelaksanaan PEPERA Untuk menjaga keamanan di Irian Barat PBB membentuk pasukan keamanan yang bernama *United Nations Security Force* (UNSF) di bawah pimpinan Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Sementara UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Sebelum Irian Barat atau Papua menjadi bagian sah dari Indonesia melalui proses PEPERA, Indonesia sudah melakukan beberapa langkah strategis yang belakangan dipandang sebagai kecurangan, seperti menunjuk E.J. Bonay sebagai Gubernur Irian Barat setelah sebelumnya Zaenal Abidin Syah.

Kontrak politik di bawah meja antara Indonesia dengan Amerika mempercepat pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing guna memuluskan perusahaan Amerika masuk di Papua. Akhirnya tepat pada tanggal 7 April 1967 ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc (Perusahaan Amerika). Pemboran dan studi kelayakan mulai pada bulan desember 1967-1969 (Sebelum PEPERA). Pada saat PEPERA tahun 1969 dilaksanakan di bawah tekanan dan pengkondisian pihak militer Indonesia sehingga hanya diwakili oleh 1025 orang Papua dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional (*one man one vote*) sesuai dengan *New York Agreement*. Proses sejarah PEPERA yang dipandang sebagai proses yang cacat hukum, penuh intimidasi dan pemaksaan di bawah kendali militer Indonesia sehingga para Pemuda Papua yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengangkat senjata melawan militer Indonesia di hampir seantero Papua. Konflik tersebut semakin meluas dan berpengaruh buruk dalam berbagai dimensi hidup orang Papua, terutama dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, HAM dan keamanan. Protes atas hasil PEPERA yang dianggap oleh masyarakat Papua sebagai proses

yang manipulatif dan cacat hukum tersebut berlangsung sejak tahun 1969 sampai Otsus jilid 2 ini tidak kunjung usai. Kedua belah pihak masing-masing mempertahankan ideologi “NKRI Harga Mati” dan “ Papua Merdeka Harga Hidup”.

2. Persoalan Pelanggaran HAM PASCA PEPERA

Pasca PEPERA terjadi berbagai gelombang protes dari masyarakat Papua. Saat itu pemuda Papua memperkuat basis perlawanan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) di berbagai wilayah di seantero Papua. Indonesia merespon itu dengan berbagai operasi militer yang mengkorbankan puluhan ribu masyarakat sipil, yaitu (1) peristiwa Enarotali (Paniai): Pangdam Sarwo Edi Wibowo memerintahkan orang Papua yang menolak Pepera dibunuh, dimana 634 penduduk diindikasikan dalam peristiwa ini. (2) Peristiwa Timika tahun 1977: Masyarakat yang protes dengan hadirnya freeport terbunuh sebanyak 30 orang melalui operasi pesawat udara. Tahun 1994 penculikan 4 warga dan dihilangkan jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Pada tahun 1995 11 orang warga tewas dalam operasi untuk menumpas TPN-OPM. (3) Peristiwa Biak Barat dan Biak Utara tahun 1974, terjadi pembunuhan massal di Kampung Busdori, Krisdori (Biak Barat) dan Ampobukor (Biak Utara). Diperkirakan sebanyak 45 orang disiksa dan dibunuh. Tahun 1974, di kampung Makuker dan Workwar Biak, terjadi penyiksaan dan pembunuhan dengan korban jiwa hampir 121 orang. Kemudian pada 1975 di kampung Arwam dan Rumbin terjadi pembunuhan terhadap 41 orang secara massal. (4) Peristiwa Wamena, pada tahun 1977 ini diperkirakan korbannya antara 10.329 orang hingga 12.397 orang. (6) Peristiwa Bela dan Alama: Uskup Herman Moninghoff, OFM melaporkan adanya pembunuhan warga sipil sebanyak 20 orang warga desa Alama. Aparat juga membunuh 10 orang Nduga. (7) Peristiwa Biak Berdarah 6 Juli 1998: Data yang dikumpulkan oleh Gereja Kristen Injili Irian Jaya menyebutkan 8 orang meninggal, 3 orang hilang, 4 orang luka berat sehingga dievakuasi ke Makasar Ujung Pandang. Kemudian 33 orang luka ringan, dan 150 orang ditahan secara sewenang-wenang. Selain

itu juga ditemukan 32 mayat misterius. (8) Pembunuhan Terhadap Arnold AP tahun 1984. (9) Pembunuhan Terhadap Theys Eluay tahun 2002. (10) Pembunuhan Dr. Thom Waggai tahun 1996. Selain itu Pelanggaran HAM Yang Menjadi Perhatian Internasional Saat ini, antara lain: Kasus Wasior berjumlah 71 orang tewas dan Wamena berjumlah 115 orang tewas [8].

Masih banyak lagi pelanggaran HAM berat yang belum didokumentasi sejak awal Trikora dikumandangkan di Yogyakarta tahun 1961 sampai saat ini. Berbagai operasi militer digalakan sebelum dan sesudah PEPERA, seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Batarayhuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Koteka di Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih III (1985). Tahun 1996 Operasi Militer di Mapnduma dan Biak berdarah tahun 1998. Terlepas dari kasus pembunuhan, hampir seluruh masyarakat Papua pada waktu itu merasakan berbagai teror, intimidasi, penyiksaan, pemerkosaan dan berbagai kekerasan verbal lainnya. Peristiwa kelam tersebut membentuk *Memoria Passionis* bagi masyarakat Papua secara turun-temurun hingga saat ini sehingga tidak mudah untuk dilupakan.

Setelah pemberlakuan OTSUS Jilid I juga kasus pembunuhan masyarakat sipil OAP terus berlanjut, terutama pembunuhan masyarakat sipil OAP di daerah-daerah konflik, seperti di Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Timika, Yahukimo, Intan Jaya, dan wilayah lainnya. Kasus pembunuhan pelajar, mahasiswa dan aktivitas saat aksi protes atau demo di beberapa kota, seperti kasus terbaru pembunuhan massa demo tolak pemekaran DOB Papua di Yahukimo tahun 2022, Pembunuhan Massa aksi tolak rasisme di Deyai tahun 2019, pembunuhan pelajar di Paniai tahun 2014, dan masih banyak lagi kasus pembunuhan saat aksi damai yang berujung ricuh. Jumlah kasus pembunuhan dipenghujung OTSUS Jilid I, Amnesty International Indonesia mencatat total ada 95 jiwa meninggal dunia dalam berbagai kasus di Papua, rinciannya; pada tahun 2018 ada 12 kasus yang mengakibatkan 18 jiwa meninggal, tahun 2019 ada 16 kasus dengan 32 jiwa meninggal, tahun 2020 ada 19 kasus dengan 30 jiwa meninggal, dan tahun 2021 ada 11 kasus dengan 15 jiwa meninggal, dan masih banyak

kasus pembunuhan yang belum terdata dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang konflik politik antara OPM dengan TNI pasca Pepera tahun 1969 sampai saat ini berkontribusi terhadap depopulasi orang asli Papua yang semakin minoritas [9]. Oleh karena itu, imam Jesuit dan filsuf berkebangsaan Jerman, Franz Magnis-Suseno mengatakan, "...situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia" [10].

Persoalan Depopulasi dan Marginalisasi

Persoalan nomor satu dari empat akar masalah yang dirumuskan LIPI dalam buku Papua Roadmap tahun 2009 adalah marginalisasi dan diskriminasi, namun sesungguhnya persoalan utama adalah pro-kontra sejarah integrasi Papua ke Indonesia, sehingga dalam artikel ini sudah lebih dulu dibahas di bagian awal. Sedangkan bagian ini penulis hanya menyoroti Depopulasi Orang Asli Papua dan Marginalisasi pada era Otonomi Khusus Papua yang merupakan konsekuensi dari sejarah disintegrasikannya Papua ke dalam Indonesia pada tahun 1969. Terutama dalam hal depopulasi orang asli Papua beberapa dekade ini dipengaruhi 6 faktor dominan, yaitu (1) Depopulasi OAP akibat penyakit HIV/AIDS, (2) Konflik OPM dengan TNI/Polri akibat pro-kontra Sejarah Integrasi, (3) Pengaruh Minuman keras, (4) kualitas hidup sehat yang masih rendah, (4) Migrasi penduduk Non-OAP yang secara masif ke Tanah Papua melalui program transmigrasi dari Pemerintah maupun dari niat sendiri dengan motif ekonomi, (6) Nepotisme dan Kolusi Non-OAP dalam berbagai bidang pekerjaan.

Data BPS tahun 2010 menunjukkan dari aspek sosial laju pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2000-2010 Provinsi Papua tertinggi di Indonesia, yaitu 5.39 dan Provinsi Papua Barat sebesar 3.71. Sementara rata-rata nasional adalah 1.49. Salah satu faktor laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia adalah transmigrasi dari luar masuk ke Tanah Papua untuk mencari peluang kerja di Provinsi dan Kabupaten yang baru dimekarkan. Sepuluh tahun berikutnya mulai dari tahun 2010-2019 laju pertumbuhan penduduk sedikit berkurang tetapi masih di atas rata-

rata angka nasional, seperti di Provinsi Papua sebanyak 1.88 sedangkan Provinsi Papua Barat lebih tinggi yaitu 2.55. Angka pertumbuhan penduduk tersebut masih di atas angka rata-rata nasional sebesar 1.31. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh migrasi masuk yang erat kaitannya dengan pertimbangan dan motif ekonomi. Menurut Data BPS tahun 2015, migrasi neto seumur hidup di Provinsi Papua Barat tahun 2015 sebanyak 220,392 jiwa. Selanjutnya selama 4 tahun bertambah 17,995 jiwa sehingga total migran masuk seumur hidup tahun 2019 sebanyak 238,387 jiwa. Lima besar provinsi asal migran seumur hidup ke provinsi Papua Barat berasal Maluku 17,1%, Sulawesi Selatan 15,8%, Jawa Timur 15,1%, Papua 10,6% dan Jawa Tengah 10,1%. Sedangkan migrasi neto di Provinsi Papua tahun 2015 sebanyak 402,395. Migrasi terus bertambah, dari tahun 2015 hingga 2019 bertambah 26,181 jiwa sehingga total migran neto sebesar 428,576. Lima besar provinsi asal migran seumur hidup yang ke provinsi Papua berasal Sulawesi Selatan 31,4%, Jawa Timur 16,7%, Jawa Tengah 11,4, Maluku 8,5 dan Nusa Tenggara Timur 5,3. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk akibat migrasi tersebut dikuatirkan setelah pemekaran DOB 4 Provinsi dan kabupaten/kota akan mengundang migrasi masuk secara besar-besaran ke Tanah Papua untuk mengisi sebagian peluang lapangan kerja di pemerintahan dan perusahaan baru yang dibuka sehingga Orang Asli Papua semakin termarginal. Sebab faktanya selama 20 tahun Otsus Jilid I dan pemekaran beberapa daerah otonom baru di Tanah Papua segala aspek kehidupan di Tanah Papua masih didominasi oleh Non-Papua, seperti UMKM, jabatan fungsional dan struktural di Pemerintahan, pimpinan dan tenaga kerja di perusahaan swasta dan BUMN, anggota DPRD Kabupaten/Kota di Papua, dan lain-lain hampir semua sudah didominasi oleh non-asli Papua. Masyarakat asli Papua semakin termarginal, lalu muncul ancaman depopulasi Orang Asli Papua yang semakin meningkat setiap tahun [11].

Dampak dari Depopulasi dan Marginalisasi dibidang politik bisa kita liat dari Hasil pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 17 April 2019 dimana keterwakilan orang asli Papua yang duduk di lembaga DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat minim

seperti di Kota Jayapura dari total 40 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 13 orang. Kabupaten Jayapura dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 7 orang. Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi DPRD hanya 7 orang asli Papua. Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD hanya 4 orang asli Papua. Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya 3 orang. Kabupaten Keerom dari 23 kursi DPPRD orang asli Papua hanya 7 orang. Sementara di Papua Barat, dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sorong keterwakilan orang asli Papua hanya 3 orang. Kabupaten Fakfak dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 8 orang. Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 9 orang. Kota Sorong dari 30 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 6 orang. Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 11 orang [12]. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terjadi marginalisasi politik yang cukup tinggi.

Sedangkan dalam bidang ekonomi semua aspek didominasi oleh penduduk migran. Ruang gerak pengembangan ekonomi bagi OAP semakin sempit. Para kaum terdidik OAP yang diharapkan menjadi motor penggerak perubahan ekonomi Tanah Papua hanya bisa bergerak pada proyek Pemerintahan dengan nilai di bawah 1 milyar. Sedangkan proyek pembangunan di Tanah Papua dengan nilai belasan, puluhan hingga ratusan milyar dan ekonomi riil lainnya didominasi non-OAP. Fenomena ini tidak disadari dan dicari solusi oleh Pemerintah setempat guna memproteksi eksistensi OAP dalam bidang ekonomi. Sedangkan mama-mama Papua yang bergerak di sektor ekonomi riil selama ini tak berdaya dan hanya bisa menjual sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu, dan pinang di depan pasar dan emperan toko dengan beralaskan kardus, karung, dan beratap langit. Ada juga yang menjual pinang di tempat putaran taksi, pangkalan ojek, dan pertigaan jalan. Ketidakberdayaan ini bagi orang yang belum sadar dan paham anggap biasa saja, namun bagi orang yang sadar akan eksistensi OAP secara universal adalah suatu ketidakadilan dan pengabaian hak-hak dasar dalam bidang sosial ekonomi [13]

Dalam bidang sosio-kultural juga mengalami pelambatan yang cukup serius bagi eksistensi OAP karena dengan adanya dominasi penduduk

migran yang sangat masif. Misalnya kita lihat dari kasus Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, Kota Sorong dan daerah lainnya mengalami pelambatan yang cukup serius bagi eksistensi OAP dalam bidang pengembangan sosio-kultural. Walaupun tidak kita pungkiri bawah ada upaya yang dilakukan oleh praktisi setempat secara mandiri maupun ada upaya Pemerintah Daerah namun sejauh ini masih bersifat parsial dan temporer tanpa menyentuh pada substansi yang mendasar dan berkelanjutan, sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi semua stakeholders pembangunan Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua.

Persoalan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga menjadi faktor utama penyebab marginalisasi orang asli Papua, dimana sebab dari kualitas SDM rendah memberikan peluang bagi kaum migran untuk mengisi ruang-ruang kerja yang tersedia. Data BPS juga menunjukkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat (Sebelum pemekaran 4 Kabupaten) ada peningkatan setiap tahun namun masih di bawah rata-rata nasional. IPM Provinsi Papua Tahun 2022 adalah 61,39. Dalam dimensi pendidikan angka rata-rata lama sekolah (RLS) 7,02 tahun dan Harapan lama sekolah (HLS) sebanyak 11,14 tahun. Dalam dimensi kesehatan, angka umur harapan hidup saat lahir (UHH) 66,23 Tahun. Dalam dimensi ekonomi, pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan sebesar 7.146.000. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,27 dari tahun sebelumnya [14]. Sedangkan IPM di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 65,89. Dari dimensi pendidikan, Angka harapan Lama Sekolah (HLS) 13,21 Tahun, Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) 7,84 tahun. Dari dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir (UHH) hingga 66,46 tahun. Sedangkan dari dimensi ekonomi rata-rata pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan 8,1 juta rupiah. Dari data tersebut ada peningkatan 0,63 poin (0,97 persen) dibanding capaian tahun sebelumnya namun masih di bawah angka rata-rata nasional juga seperti Provinsi Papua [15].

Persoalan Rasisme dan Diskriminasi

Persoalan rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua sudah ada sejak Papua ditaklukan oleh bangsa-bangsa lain, terutama oleh Indonesia. Perbedaan ras dan minoritas membuat perlakuan rasial dan diskriminatif mudah diterima di berbagai wilayah di Indonesia. Orang Papua diidentikan dengan suka mabuk, bicara kasar, mudah emosi, bodoh, terbelakang, ketertinggalan, suka ribut, kotor, tidak sehat, kurang bergizi, tidak bisa diatur, dan sebagainya. Semua hal buruk disematkan kepada orang Papua, sehingga saat bersosialisasi dengan orang luar Papua tidak luput dari sindiran-sindiran halus yang mengandung makna rasisme. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa orang Papua sulit mendapatkan kos/kontrakan di wilayah Jawa karena perlakuan rasisme itu.

Dalam sejarah Papua bersama Indonesia, tak luput juga dari pernyataan rasial yang keluar dari mulut tokoh bangsa, seperti Kahar Muzakkar (Salah satu tokoh pendiri bangsa Indonesia), Letjen TNI Ali Moertopo (Ketua Operasi Khusus Kemenangan PEPERA 1969), Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, Megawati Soekarnoputri, dan lain-lain. Para tokoh-tokoh nasional yang diharapkan menjadi pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tetapi rasisme dan diskriminasi yang mendarah daging dalam benak sebagian tokoh dan masyarakat Indonesia sehingga kadang-kadang ceplis-ceplos menyampaikan ujaran rasial. Rasisme dan diskriminasi tersebut menimbulkan jurang sosial yang cukup lebar antara orang Papua dengan Indonesia lainnya, dipihak lain semakin memperkuat identitas kebangsaan sendiri.

Selain dalam bentuk ujaran, rasisme dan diskriminasi dalam bentuk kebijakan pembangunan juga sudah terjadi sejak Papua digabungkan, misalnya kita bisa lihat dari implementasi UU Otonomi Khusus antara Aceh dengan Papua sangat berbeda jauh meskipun isinya hampir sama. Otonomi Khusus di Papua selama ini hanya bunyi uang saja tanpa ada kewenangan yang luas dan khusus bagi orang Papua. Berbagai produk hukum Perdasus turunan dari Otsus yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi untuk perlindungan, pemberdayaan dan penegakan keadilan selalu

ditolak oleh Jakarta karena berbagai kecurigaan terhadap pemimpin Papua. Tentu ini salah satu bentuk diskriminasi yang diterima oleh orang Papua sejak otsus digulirkan. Belum termasuk kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya temporer untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia sedang bekerja sungguh-sungguh untuk membangun Papua dalam berbagai dimensi kehidupan.

Persoalan Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Ekologi

Tanah Papua merupakan pulau yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekaguman atas kekayaan alam tersebut maka pada abad 15 (tahun 1528) Alvaro De Savedra, pimpinan armada laut berkebangsaan Spanyol memberi nama "*Isla De Oro*" atau "*Sland of Gold*" yang artinya Pulau Emas [9]. Oleh karena itu, sejak awal Tanah Papua ditaklukan sudah menjadi rebutan berbagai Negara, terutama Amerika dan Eropa. Kekayaan Sumber Daya alam Papua menurut data Bappeda Papua pada tahun 2009, saat ini terdapat sebanyak 2,5 miliar ton kandungan cadangan bahan tambang emas dan tembaga (konsesi Freeport saja), dan Tambang Tangguh juga memiliki cadangan gas 14,4 triliun kaki kubik dari enam lapangan atau sebanyak 24 TSCF dari total nasional 108 TSCF. Sebanyak 540 juta meter kubik potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektar hutan konversi perkebunan skala besar, selain itu dengan panjang pantai 2 ribu mill dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi dan Papua memiliki potensi perikanan 1,3 juta ton per tahun. Potensi SDA Papua yang sangat menjanjikan sehingga Indonesia dengan berbagai cara pertaruhkan segala potensi yang dimiliki untuk mempertahankan Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

» Persoalan Pertambangan

Potensi bahan tambang di Tanah Papua mulai ditemukan oleh seorang geologist bernama J.J Dozy dalam sebuah misi ekspedisinya pencarian minyak bumi di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1936. Dalam ekspedisi tersebut J.J Dozy menemukan sebuah bukit berbentuk seperti gigi setinggi 131 yang kaya akan unsur tembaga dan emas.

Kemudian ia mengambil sampel dan kirim ke Universitas Leiden untuk diteliti. Lebih lanjut Ia memberi nama Erstberg yang artinya Gunung Bijih atau orang Amungme sendiri menyebut *Nemangkawi Ninggok* (gunung suci panah putih). Kemudian pada tahun 1960 hasil publikasinya tentang Erstberg dibaca oleh oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Co dan menindaklanjutinya dengan meninjau bukit tersebut. Saat itu situasi dan kondisi perpolitikan dunia antara blok timur dan blok barat sedang memanas karena perang dingin untuk merebut wilayah pasifik, maka untuk mengamankan itu Amerika menawarkan Indonesia untuk membuka pertambangan di Papua dengan kontrak politik Amerika harus membantu Indonesia mengintegrasikan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memuluskan misi itu diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Pada tanggal 7 April 1967 ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc. Freeport sebelum Papua menjadi bagian sah dari Indonesia melalui PEPERA tahun 1969. Selanjutnya pemboran dan studi kelayakan mulai pada bulan desember 1967-1969. Kemudian tahap kontruksi mulai berlangsung dari tahun 1969-1972. Sejak itu Freeport sudah mulai beroperasi dan pada saat baru saja produk perhari mencapai 8.000 ton bijih/hari, kemudian meningkat menjadi 18.000 ton bijih/hari. Sampai saat ini menurut data lembar Fakta PTFTI tahun 2021 menunjukkan bahwa PTFTI telah menginvestasikan US\$ 7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional sebesar lebih dari US\$ 60 miliar sejak 1992-2020 [16].

Selain Freeport, sampai dengan akhir tahun 1999 di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 Wilayah Kontrak Karya (KK) dan 3 Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta 4 Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) [17]. Belum termasuk perusahaan yang masuk 2 dekade pemberlakuan Otsus Papua. Terakhir yang mengemuka adalah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua yang menjadi rebutan para elit Jakarta. Berdasarkan data Kementerian ESDM 2020, Blok Wabu menyimpan potensi sumber daya 117.26 ton bijih emas dengan rata-rata

kadar 2,16 gram per ton (Au) dan 1,76 gram per ton perak. Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan nilai potensi ini setara dengan US\$14 miliar atau nyaris Rp300 triliun dengan asumsi harga emas US\$1.750 per troy ounce. Sementara itu, setiap 1 ton material bijih mengandung logam emas sebesar 2,16 gram [18]. Selain Blok Wabu, ada beberapa daerah yang akan menjadi target pertambangan selanjutnya adalah tambang Emas Pegunungan Bintang yang sudah mulai dijajaki oleh PT. Antam. Pertambangan ilegal juga sudah berlangsung lama di beberapa wilayah, seperti tambang ilegal di wilayah Yahukimo, Pegunungan Bintang, Bovendigoel, Degeuwo Paniai. Tambang-tambang ilegal ini juga sebagian besar dikuasai oleh para pendatang. Mereka sekaligus mendatangkan prostitusi dan minuman keras di tengah-tengah hutan. Berbagai pengelolaan hasil tambang di seluruh Tanah Papua sama sekali tidak menguntungkan masyarakat adat setempat. Masyarakat selalu menjadi korban kepentingan elit Jakarta dengan pihak asing, sehingga masyarakat selalu hidup dalam lingkaran kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan konflik sosial. Fakta-fakta tersebut kita bisa lihat dari kualitas hidup masyarakat Amungme dan Kamoro pemilik gunung emas tidak mengalami kemajuan yang signifikan sejak perusahaan tersebut beroperasi sampai sekarang, begitupun dengan masyarakat pemilik hak ulayat perusahaan minyak bumi dan gas di Bintuni dan Sorong. Adanya Otonomi Khusus bagi Papua juga tidak memberikan sedikit peluang bagi masyarakat adat setempat untuk mengelola pertambangan rakyat secara mandiri, sebab semuanya sudah dikapitalisasi secara tersistem dari Jakarta.

» **Persoalan Pengelolaan Kehutanan**

Tanah Papua memiliki hutan tropis terbesar urutan kedua di dunia. Namun secara perlahan semakin menyusut akibat deportasi dan alih fungsi lahan oleh berbagai perusahaan. Menurut data Auriga Nusantara, luas hutan alam tersisa di Tanah Papua sekitar 33.847.928 hektare, yang terdiri dari Provinsi Papua 24.993.957 hektare dan Provinsi Papua Barat 8.853.971 hektare (data sebelum ada pemekaran). Dari total 41.517.037 hektare luas daratan Tanah Papua, wilayah kelola yang diberikan bagi

masyarakat hanya sekitar 169.665 hektare saja, sedangkan total luas izin kelola yang diberikan korporasi besar swasta sekitar 8.589.282, atau 50 kali lipat lebih besar dari izin yang diberikan kepada masyarakat. Selama 20-an tahun ini terjadinya pergeseran episentrum deforestasi di Tanah Papua, dimana tutupan hutan alam Tanah Papua menyusut 663.443 hektare, 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019. Bila direrata, terjadi deforestasi 34.918 hektare per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tanah Papua. Pada 2011-2019 deforestasi dominan terjadi di Merauke, Boven Digoel, Keerom, Nabire, Fakfak. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan kabupaten yang saat ini belum menjadi episentrum deforestasi, seperti Maybrat, Tambraw, Mamberamo Raya, pada masa mendatang justru menjelma menjadi episentrum baru deforestasi [19].

Sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PKH) di Tanah Papua diterbitkan menteri kehutanan pada rentang 1992–2019, seluruhnya seluas 1.549.205 hektare. Sektor pertanian menjadi tujuan utama pelepasan, yakni seluas 1.461.577 hektare. Pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah tujuan utama pelepasan kawasan hutan untuk sektor pertanian, yakni seluas 1.307.780 hektare, atau 84% dari total pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua. Beberapa wilayah pelepasan hutang untuk perkebunan sawit adalah Boven Digoel (302.423) hektare, Jayapura 108.379 hektare, Mimika 105.891 hektare, Merauke 100.693 hektare, Teluk Bintuni 92.723 hektare, Mappi 89.210 hektare, Sorong 81.800 hektare, Sorong Selatan 75.222 hektare, Sarmi 54.197 hektare, Teluk Wondama 35.071 hektare, Maybrat 30.768 hektare, Nabire 21.921 hektare, Manokwari 20.083 hektare, Dogiyai 1.885 hektare, Tambrauw 9.976 hektare, Deiyai 8.050 hektare, Intan Jaya 3.001 hektare, Kaimana 2.702 hektare, Keerom 1.137 hektare, Fakfak 567 hektare dan Waropen 202 hektare [19].

Jutaan hektar hutan yang dieksploitasi oleh berbagai perusahaan tersebut sama sekali tidak menguntungkan pemilik masyarakat adat setempat. Yang terjadi saat ini adalah kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya hak-hak masyarakat adat, baik hak sosial-budaya, ekonomi,

ekologi, politik, hukum dan HAM. Masyarakat selalu menjadi korban kepentingan elit Jakarta dengan pihak perusahaan. Fakta-fakta tersebut kita bisa lihat dari kualitas hidup masyarakat di areal perusahaan di sejumlah daerah yang disebutkan di atas hidup dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan kualitas kesehatan yang buruk.

Terkait dengan pengelolaan hutan Papua sudah mendapatkan kekhususan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, namun sejauh ini belum sepenuhnya bisa diberlakukan karena konflik dengan regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan atau regulasi sektoral, sehingga tidak jelas regulasi mana sebagai *lex specialis*, termasuk mengenai pengaturan pengelolaan hutannya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, misalnya, sedemikian semena-mena memindahkan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi dalam pada pengelolaan hutan, atau Undang-Undang Minerba yang mengambil alih kewenangan pemerintah daerah pada sektor pertambangan. Hal seperti ini menimbulkan kekosongan pengelola efektif di lapangan [19].

» **Persoalan Degradasi Budaya dan Bahasa Lokal**

Tanah Papua memiliki 7 wilayah adat (zona kebudayaan), yaitu Tabi/Mamta, Saireri, Doberai, Bomberai, Anim-Ha, Lapago, Meepago dan di dalamnya terdapat lebih dari 250 suku. Pemerintah selama ini mengklaim melakukan pendekatan pembangunan dengan pendekatan 7 wilayah adat/kebudayaan, namun sesungguhnya pola pendekatan tersebut hanya sebatas pembagian kewilayahan tanpa menyentuh pada substansi pengembangan pembangunan berbasis kebudayaan. Hal tersebut bisa kita lihat dari dua dekade Otsus ini bahasa dan budaya lokal Papua semakin terdegradasi. Faktor yang dominan adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi bagi generasi muda, depopulasi orang asli Papua akibat gelombang transmigrasi Non-Papua dan migrasi lokal antara wilayah dan juga kematian orang Papua yang semakin masif akibat berbagai faktor. Selain itu, dampak dari deportasi hutan secara besar-besaran juga turut menghancurkan hutan-hutan sakral masyarakat adat setempat, sehingga orang Papua seakan-akan hidup tanpa perlindungan roh-roh

nenek moyang yang menjadi kekuatan hidup selama berabad-abad di Tanah Papua. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pulau Dewata-Bali yang arus wisatawan dan migrasi global yang berdatangan setiap hari secara masif namun mereka tetap konsen dan eksis dalam menjaga alam. Demikian pula dengan Jawa tetap mempertahankan bahasa dan budaya lokalnya di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi.

Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid I maupun Jilid II memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa melalui lembaga-lembaga formal, non-formal dan informal, namun sejauh ini belum diimplementasikan dengan baik. Harusnya ada produk hukum turunan dari Otsus untuk diberlakukan di tingkat Provinsi/Kabupaten dengan dukungan pendanaan dari sumber dana Otsus yang memadai, misalnya Perdasus/Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Perdasus/Perda Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, Perdasus/Perda Pemerintahan Adat, Perdasus/Perda Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat, Perdasus/Perda Kependudukan Berbasis Suku/Marga, dan sebagainya sebagai bentuk proteksi akan eksistensi masyarakat adat Papua. Namun faktanya jauh panggang api. Mestinya kita bisa belajar dari beberapa wilayah yang sudah menerapkan Perda Kebudayaan, misalnya di Jawa Tengah mata pelajaran bahasa Jawa masuk dalam kurikulum yang diajarkan dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi dan ada hari tertentu para pegawai Pemerintahan dari tingkat Provinsi hingga kelurahan wajib menggunakan bahasa Jawa. Provinsi Bali juga sudah punya perda tentang Desa Adat sehingga kelembagaan adat yang sudah diwariskan sejak turun-temurun masih bisa dilestarikan. Sedangkan kita di Papua baru dirintis oleh Bupati Jayapura dengan Perda kampung adat dan sekolah adat, namun keberlanjutan dari program tersebut menjadi problem mendasar karena kebijakan pembangunan setiap pemimpin di Papua selama ini bersifat politis sehingga gampang sekali dirubah ketika ganti pemimpin yang baru. Selain kurangnya komitmen dan konsisten dari Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan budaya, situasi dan kondisi gejolak politik Papua sejak tahun 1969

sampai saat ini juga turut memperburuk eksistensi kebudayaan lokal. Misalnya pada tahun 1971-1972 ada Operasi Koteka yang dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia di Pegunungan Tengah Papua dengan tujuan untuk menghapuskan penggunaan koteka (penutup kelamin laki-laki) dan menggantikannya dengan celana dan baju yang dianggap lebih “modern”. Pandangan Indonesia terhadap Orang Papua yang pakai koteka dianggap primitive dan terbelakang ini sesungguhnya pandangan yang rasial dan mencederai harkat dan martabat orang gunung sekaligus turut menghancurkan kebudayaan Papua.

Persoalan Ketidakadilan Hukum dan Pembungkaman Ruang Demokrasi

» Persoalan Ketidakadilan Hukum

Rentetan kekerasan dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang mengorbankan ratusan ribu jiwa belum pernah diselesaikan secara adil. Kehadiran Otonomi Khusus awalnya dianggap sebagai angin segar untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan adanya Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua, namun sampai saat ini belum terbentuk. Artinya Pemerintah tidak punya komitmen yang serius untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga saat ini hanya beberapa saja yang menjadi atensi Komnas HAM, namun itupun belum kunjung tuntas secara adil, seperti Peristiwa Paniai (2014), Peristiwa Wasior dan Wamena 2001 dikembalikan berkali-kali oleh Kejaksaan dengan alasan tidak lengkap. Kasus pembunuhan Theys Eluay dan penculikan sopirnya Aristoteles Masoka yang dikabarkan hilang setelah diculik. Para pelaku dikenai hukuman penjara antara dua-tiga tahun lebih penjara di Mahkamah Militer Tinggi. Jika dibandingkan dengan perlakuan hukum antara kasus Sambo dengan pembunuhan Theys Eluay tentu ini bentuk rasisme dan diskriminasi hukum terhadap orang Papua.

» **Pembungkaman Ruang Demokrasi**

Reformasi Tahun 1998/1999 dan bergulirnya UU Otonomi Khusus Tahun 2001 sesungguhnya memberikan angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia dan khususnya masyarakat di Tanah Papua. Salah satu semangat reformasi adalah jaminan atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam implementasinya di Tanah Papua berbeda jauh dengan wilayah Indonesia lainnya. Situasi dan kondisi Papua masa seperti orde baru, dimana hak-hak kebebasan berekspresi masih dibungkam secara sistematis oleh Pemerintah Indonesia melalui POLRI dan dibackup oleh TNI. Dua dekade Otsus Papua ini puluhan hingga ratusan aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua dan BEM Kampus-Kampus di Papua yang ingin memperjuangkan keadilan dan kesetaraan selalu diteror, ditangkap dan dihadang sebelum melakukan aksi demonstrasi. Padahal demonstrasi tidak memerlukan izin dari kepolisian, cukup memberitahu kepolisian. Hal tersebut sudah diatur dalam UU No.9 tahun 1998 pasal 10. Selanjutnya pihak kepolisian hanya mengkawal aksi demo guna memastikan keamanan, ketertiban dan kedamaian, namun sejauh ini pihak kepolisian di Papua melenceng jauh dari aturan perundang-undangan seolah-olah harus ada izin dari kepolisian. Meskipun tidak diberi izin, kelompok *civil society* tetap melaksanakan demo, sehingga seringkali mereka ditangkap atau dihadang sebelum atau saat melakukan demonstrasi. Hampir setiap demo sering mengalami kekerasan fisik dari pihak aparat. Pembungkaman ruang demokrasi sejak Otsus diberlakukan sampai sekarang masih terus ada dan selalu ada peristiwa penghadangan, penangkapan, kekerasan, teror dan intimidasi kepada para aktivis. Banyak kasus namun dalam artikel ini hanya berikan beberapa contoh, yaitu: (1) kasus tahun 19 Desember 2016 demonstrasi besar-besar di berbagai kota di seluruh Indonesia menolak peristiwa Operasi Tri Komando Rakyat (Trihora). Pada kasus ini polisi menangkap 488 orang, dengan rincian di Merauke ada 126 yang ditangkap, Nabire 75 orang, Wamena 165 orang, Jayapura 37 orang, Manado dan Gorontalo 85 orang (cnn). Para pendemo ditangkap dan diinterogasi sebelum dilepaskan [20]. (2)

Kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya tanggal 16 Desember 2019, dimana oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP dan ormas reaksioner mengepung mahasiswa Papua di Surabaya dan memaki mereka dengan kata “monyet”. Respon atas ucapan rasisme tersebut seantero Tanah Papua bergejolak. Masyarakat dari semua kalangan mulai dari unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, aktivis pemuda dan masyarakat umum turun jalan demo besar-besaran. Dampak dari demo tersebut beberapa fasilitas publik rusak parah sebagai bentuk kekecewaan terhadap ujaran rasisme yang dialami orang asli Papua sejak bergabung dengan Indonesia. Akibat dari kasus ini beberapa aktivitas mahasiswa dan Pemuda Papua ditangkap dan dipenjara, seperti eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih Papua, Ferry Kombo; Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay; Hengky Hilapok; dan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Urobmabin, Buchtar Tabuni, seorang aktivis United Liberation Movement for West Papua, Agus Kossay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ketua KNPB Mimika, Steven Itlay, Juru bicara KNPB, Victor Yeimo [21]. Sedangkan aktivis di Jakarta yang dipenjara adalah Suryanta Ginting, Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Isay Wenda. Para aktivis yang ditangkap dan dipenjara ini atas dugaan makar dalam demonstrasi menentang rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya [22].

Selain kasus-kasus pembungkaman demokrasi, Tanah Papua juga masih tertutup bagi wartawan asing dan pengekangan kebebasan pers. Sepanjang 60-an tahun Papua bersama Indonesia, para wartawan asing tidak diizinkan meliput peristiwa kekerasan dan HAM secara objektif di lapangan. Media nasional-pun tidak semua berita kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua diliput secara objektif, hanya kasus-kasus tertentu yang diangkat namun lebih banyak memojokan masyarakat asli Papua. Tidak sedikit juga para wartawan lokal di Papua mendapat perlakuan kasar, teror, intimidasi, penyitaan alat rekam dan kekerasan.

SOLUSI MEWUJUDKAN PAPUA TANAH DAMAI

Jaringan Damai Papua mendefinisikan Papua Tanah Damai sebagai visi masa depan bersama, impian bersama, dan harapan bersama dari semua orang di Tanah Papua. Papua Tanah Damai merupakan suatu tatanan ideal yang masih harus diperjuangkan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan. Papua Tanah Damai mengandung sepuluh nilai dasar, yaitu keadilan dan kebenaran, partisipasi, rasa aman dan nyaman harmoni/keutuhan, kebersamaan dan penghargaan, pengakuan dan harga diri, komunikasi dan informasi yang benar, kesejahteraan, kemandirian dan kebebasan. Papua Tanah Damai memiliki multidimensi maka tentu perdamaian di Tanah Papua harus secara holistik dan komprehensif, antara lain: Papua Tanah Damai perspektif politik, perspektif hukum dan hak asasi manusia, perspektif keamanan, perspektif penyelenggaraan pemerintahan, perspektif ekonomi, perpektif lingkungan hidup, perspektif kesehatan, perspektif pendidikan, perspektif kebudayaan, perspektif sosial, perspektif budaya dan perspektif spiritual [3].

Untuk mewujudkan itu, bagaimana Pendekatan *Peace making* dan *Peace Building* dalam Teori Johan Galtung diadaptasi dalam konteks penyelesaian konflik di Tanah Papua yang mengandung multi dimensi/perspektif. Namun dalam artikel ini lebih fokus pada konflik yang memberikan kontribusi besar dan berpengaruh ke semua dimensi pembangunan, yaitu konflik politik tentang sejarah Papua diintegrasikan ke Indonesia melalui proses PEPERA. Oleh karena itu, model pendekatan *peacemaking* bisa digunakan untuk mengakhiri konflik tersebut. Menurut Johan Galtung (1976) *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bertikai dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai

penengah. Akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding [23]. Dalam konteks penyelesaian konflik Politik Papua ini tentu semua pihak mendorong adanya dialog antar aktor utama, yaitu Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka/*United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang dimediasi oleh pihak ketiga (Negara) yang netral sebagai penengah. Dalam dialog tersebut pada prinsipnya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana berbagai pihak menyepakati *win-win solution* yang tepat untuk mengakhiri konflik yang tidak berkesudahan ini. Pendekatan ini pernah dilakukan dalam menyelesaikan konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Konflik tersebut dimediasi oleh Findalia di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

Model penyelesaian konflik Aceh ini mestinya dipakai juga untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Tanah Papua sebagaimana yang selama ini disuarakan oleh pihak gereja- gereja Papua, Jaringan Damai Papua (JDP), KontraS, Aktivistis HAM, LBH dan berbagai aktivis Pemuda Papua. Dalam konflik Papua ini ada banyak aktor dengan kepentingannya dalam hal ekonomi (kapitalis global) dan geo-politik wilayah pasific selatan sehingga dibutuhkan dialog yang lebih holistik dan komprehensif. Dalam dialog tersebut dihadirkan juga pihak Amerika dan Belanda selaku pihak yang pernah terlibat dalam konflik politik Papua agar semua duduk dalam satu meja dialog yang bermartabat.

Selanjutnya konsep membangun perdamaian atau *peacebuilding* didefinisikan sebagai aktifitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan [23]. *Peacebuilding* dapat berjalan setelah *peacemaking* atau dialog tersebut dilaksanakan, tanpa itu tidak bisa menciptakan perdamaian. Proses penyelesaian akar masalah Papua untuk

kasus kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM dapat ditempuh dengan pendekatan *peacebuilding* itu.

Dengan semangat *peacemaking* (dialog damai) semua pihak saling bekerja sama membangun *peacebuilding* dalam berbagai dimensi. Salah satu langkah strategisnya adalah konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan UU Otonomi Khusus Papua sebagai *win-win solution* pada tahun 1999/2000 untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membentuk Pengadilan HAM (kasus pelanggaran HAM yang pelakunya dari aparat dan korbannya warga sipil diadili melalui pengadilan HAM bukan pengadilan militer), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penegakan Hukum yang berkeadilan, Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat, Perlindungan dan Pengembangan Bahasa dan Budaya, Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Perlindungan Ekonomi Rakyat Papua, Pendidikan Kebudayaan Papua, Ketenagakerjaan Papua, Kependudukan Papua, Partai Lokal Papua, Pengelolaan Kesehatan Papua, Ruang Demokrasi dibuka dan sebagainya. Produk-produk hukum yang penjabaran dari UU Otsus tersebut dibentuk dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak. Selain itu, dalam skala nasional sudah ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini perlu diperkuat lagi sehingga bisa diterapkan sebagai mata pelajaran di setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia agar mengurangi pikiran, sikap dan perbuatan rasisme terhadap sesama anak bangsa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan menciptakan perdamaian. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik, namun paling tidak dua pendekatan ini bisa mengurangi eskalerasi konflik sehingga tercipta Papua Tanah Damai sebagaimana yang didambakan oleh semua pihak di Tanah Papua.

PENUTUP

Konflik yang terjadi di Papua sangat banyak dan berdimensi politis, ekonomis, sosial, budaya, ekologi, Hukum & HAM dan sebagainya. Namun merujuk pada hasil temuan dari LIPI bahwa ada empat akar masalah utama, yaitu (1) Kegagalan Pembangunan, (2) Marjinalisasi dan Diskriminasi Orang Asli Papua, (3) Kekerasan Negara dan Tuduhan Pelanggaran HAM (4) Sejarah dan Status Politik Wilayah Papua. Maka pendekatan perdamaian yang ditawarkan dalam artikel ini adalah pendekatan *Peace making* dan *Peace Building* dalam teori Johan Galtung untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Konflik Sejarah dan Status Politik diselesaikan dengan pendekatan *Peace making*, yaitu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan OPM/ULMWP (Perwakilan Rakyat Papua) dan dimediasi oleh pihak ketiga (Negara) yang netral. Dalam dialog tersebut dihadiri juga oleh pihak Amerika dan Belanda selaku pihak yang ikut terlibat dalam konflik politik tersebut. Selanjutnya *Peacebuilding* dapat dijalankan, namun setelah *peacemaking* atau dialog tersebut dilaksanakan, sebab tanpa itu tidak bisa menciptakan perdamaian. Dengan semangat *peacemaking* semua pihak saling bekerja sama membangun *peacebuilding* dalam berbagai dimensi dengan menggunakan UU Otonomi Khusus sebagai acuan utama. Persoalan kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM akan terselesaikan jika semua pihak dengan konsisten dan sungguh-sungguh melaksanakan UU Otonomi Khusus, sebab semua hal sudah termuat di dalam tinggal bagaimana pengembangan dalam bentuk perdasus dan aksi-aksi pembangunan. Dengan dua pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan cita-cita Papua Tanah Damai sebagaimana yang didambakan oleh semua pihak di Tanah Papua.

REFERENSI

- Weil, Eric. 1997. *Logique de la philosophie (La logica della filosofia)*, terjemahan ke dalam bahasa Italia oleh Livio Sichirillo, Il Mulino, Milan.
- Pontoh, Soleman, 2020. *Dua Dekade Otsus Papua, Kebijakan 'Setengah Hati'?*. Diakses tanggal 08 Mei 2023 dari sumber: <https://www.gatra.com/news-496539-politik-dua-dekade-otsus-papua-kebijakan-setengah-hati.html>
- Jaringan Damai Papua (JDP), 2014. *Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua*. JDP: Jayapura-Jakarta
- Widjojo S. Muridan, dkk, 2009. *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the present and Security the Future*. Yayasan Obbor : Jakarta
- Mansoben, J.R. 1995. *Sistim Politik Tradisional di Papua*. Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Leidin University: Jakarta
- Martin Sitompul, 2019. *Debat Pendiri Bangsa Soal Papua*. Diakses tanggal 08 Mei 2023 dari sumber: <https://historia.id/politik/articles/debat-pendiri-bangsa-soal-papua-v5EAo/page/1>
- Ringkasan Materi Pelajaran SMP: *Bab IV Perjuangan Merebut Irian Barat*. Diakses tanggal 08 Mei 2023 dari sumber: http://pintar.jatengprov.go.id/uploads/users/rusyanto/materi/SMP_Perjuangan_Merebut_Irian_Barat_2014-10-28/Perjuangan_Merebut_Irian_Barat.pdf
- Pigai Natalis, 2014. *Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi Ham Dan Mencari Jalan Kedamaian)*. Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014
- Sitokdana, Melkior, 2016. *Sejarah Nama Papua & Asal Usul Manusianya Dari Penemuan ke Peradaban, Dari Gereja ke Politik*. Kepel Press, Yogyakarta.
- Suseno, Franz M. 2015. *Kebangsaan, demokrasi, pluralisme bunga rampai etika politik aktual*. Kompas: Jakarta.
- Sitokdana, Melkior, 2022. *Pemekaran DOB di Tengah Ancaman Depopulasi Orang Asli Papua*. Diakses tanggal 09 Mei 2023 dari sumber: <https://www.sinarharapan.net/pemekaran-dob-di-tengah-ancaman-depopulasi-orang-asli-papua/>

- Humasdprp, 2019. *Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim*. Diakses tanggal 09 Mei 2023 dari sumber: <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/>
- Okowali, Debi.D, 2023. *Pinang mama Papua dalam cengkeraman migran*. Diakses tanggal 09 Mei 2023 dari sumber: <https://jubi.id/opini/2023/pinang-mama-papua-dalam-cengkeraman-migran/>
- BPS: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022*. Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari sumber: <https://papua.bps.go.id/backend/images/IPM-Rilis-Desember-2022-ind.jpg>
- BPS: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022*. Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari sumber: <https://papuabarat.bps.go.id/backend/images/2022-12-01-Infografis-IPM-ind.png>
- Potensi Mineral*. Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari sumber: <https://papua.go.id/view-detail-page-29/undefined>
- Dorong Investasi, Pelayanan Perizinan Akan dipermudah*. Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari sumber: <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-16/dorong-investasi-pelayanan-perizinan-akan-dipermudah.html>
- Kandungan Emas Blok Wabu Lebih Besar dari Grasberg Freeport, Nilainya Setara Rp300 Triliun*. Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210925/44/1446724/kandungan-emas-blok-wabu-lebih-besar-dari-grasberg-freeport-nilainya-setara-rp300-triliun>
- Koalisi Indonesia Memantau. 2021. *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*. Februari, 2021. Jakarta, Indonesia
- Polisi Tangkap 488 Warga Papua saat Demo Soal Trikora*. Diakses tanggal 11 Mei 2023 dari sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161219204624-12-180833/polisi-tangkap-488-warga-papua-saat-demo-soal-trikora>
- Papua: Tujuh tapol Papua divonis hukuman penjara - 'Kami demo tolak rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris?'*. Diakses tanggal 11 Mei 2023 dari sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53074109>

6 *Terdakwa Kasus Makar Surya Anta cs Hadapi Putusan Siang Ini*. Akses tanggal 11 Mei 2023 dari sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4989514/6-terdakwa-kasus-makar-surya-anta-cs-hadapi-putusan-siang-ini>

Galtung, John. 1976. *Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding*. Dalam Johan Galtung: *Peace War and Defense: Essays in Peace Research II*, Copenhagen, Christian Ejlers.

MEWUJUDKAN PAPUA TANAH DAMAI: UPAYA, TANTANGAN, DAN HARAPAN MASA DEPAN

Monika Bamulki¹

Pendahuluan

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian paling timur Pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini di timur dan Australia di selatan. Ibu kota provinsi ini adalah Jayapura. Nama “Papua” berasal dari kata lokal kuno yang berarti “berambut keriting”, merujuk pada rambut keriting khas Melanesia yang masih dimiliki banyak suku bangsa hingga saat ini. Nama tersebut pertama kali digunakan oleh orang-orang Eropa ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat yang sering disebut sebagai “orang Papua”.

Papua memiliki sejarah panjang dan kompleks. Wilayah ini pertama kali dijajah oleh Belanda pada tahun 1828 dan diberi nama Nugini Belanda. Setelah Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1949, Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang kemudian memulai kampanye untuk mengasimilasi penduduk asli Papua ke dalam budaya nasional. Namun, konflik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Papua telah mengalami berbagai kerusuhan akibat sengketa lahan, termasuk protes terhadap perusahaan

¹ Mahasiswi Aktif Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi.

tambang yang beroperasi di tanah adat tanpa izin dari masyarakat setempat. Bentrokan kekerasan juga pernah terjadi, seperti insiden pada bulan Desember 2018 ketika demonstrasi atas rencana Jakarta untuk memperluas kedaulatan atas provinsi Papua Barat berujung pada konflik antara pengunjung rasa dan aparat keamanan.

Dampak konflik di Papua dirasakan di berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Ketidakstabilan politik di Indonesia telah menyebabkan peningkatan kontrol militer di wilayah Papua, yang berimbas pada terbatasnya kebebasan bagi masyarakat Papua dalam mengekspresikan diri dan menentukan kehidupan mereka sendiri. Selain itu, ketimpangan ekonomi memperburuk kondisi, di mana pemilik tanah memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan petani kecil, dan masyarakat perkotaan cenderung lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian. Ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya seperti tanah dan air berpotensi meningkatkan ketegangan sosial serta memperdalam konflik antara kelompok yang berbeda, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang adil untuk memastikan kesejahteraan semua pihak.

Upaya Mewujudkan Papua Tanah Damai

Papua telah lama mengalami konflik berkepanjangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya untuk membangun Papua sebagai tanah yang damai harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat lokal, organisasi internasional, maupun media.

1. Peran Masyarakat Setempat

Masyarakat Papua memiliki peran utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Tradisi dan kebiasaan lokal menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan sering kali digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah keyakinan bahwa

seseorang yang meninggal harus dimakamkan secara layak untuk menghindari kesialan bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, organisasi lokal berperan penting dalam mediasi konflik dengan menggunakan metode tradisional seperti arbitrase atau pertemuan bersama sesepuh dari berbagai pihak. Dalam beberapa kasus, konflik yang sebelumnya menyebabkan ketegangan—seperti sengketa tanah antar desa—dapat diselesaikan secara damai melalui dialog yang difasilitasi oleh tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki kapasitas besar dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan Papua yang damai dengan menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- Mengimplementasikan undang-undang yang melarang hasutan kekerasan dan ujaran kebencian berbasis etnis atau agama.
- Mengalokasikan dana untuk program yang meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok masyarakat di Papua.
- Memberikan dukungan politik yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan perdamaian dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional turut berkontribusi dalam proses perdamaian di Papua, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah terlibat dalam isu Papua sejak tahun 1962, saat Indonesia mengambil alih wilayah ini dari Belanda. Melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), PBB terus memberikan bantuan hingga saat ini.

Selain PBB, berbagai organisasi seperti Save the Children, Oxfam International, World Vision International, dan Plan International juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mereka memberikan bantuan berupa perlengkapan kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi anak-anak yang terdampak oleh konflik atau bencana.

4. Peran Media

Media memiliki pengaruh besar dalam membangun Papua sebagai tanah damai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konflik yang terjadi serta memberikan wawasan terkait solusi yang dapat dilakukan. Dengan melaporkan konflik secara objektif dan transparan, media membantu masyarakat memahami situasi dan mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung perdamaian.

Selain itu, media juga dapat mengangkat kisah sukses tentang bagaimana berbagai komunitas yang berbeda budaya atau agama dapat bekerja sama dan hidup berdampingan secara harmonis. Kisah-kisah seperti ini berpotensi menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan Papua yang damai.

Papua telah lama menjadi wilayah yang rentan terhadap konflik dan ketegangan akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat setempat, organisasi internasional, serta media memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di Papua.

Selain mengatasi akar penyebab konflik, seperti ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia, pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada dialog juga sangat penting. Masyarakat Papua serta komunitas non-Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan agar tercipta rasa kepemilikan bersama terhadap perdamaian.

Meskipun membangun Papua sebagai tanah damai bukanlah tugas yang mudah, dengan komitmen bersama dan keterlibatan aktif dari semua

pihak, Papua dapat menjadi wilayah yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Penutup

Konflik di Papua telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, kelompok separatis, dan masyarakat adat Papua. Isu-isu yang menjadi inti dari konflik ini mencakup hak atas tanah, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Meskipun masih terdapat ketegangan, berbagai langkah telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, termasuk dialog antara pemerintah dan kelompok separatis serta program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Papua.

Tanah Papua memiliki potensi besar bagi masa depan Indonesia jika tercipta rasa aman dan damai yang berkesinambungan, baik bagi masyarakat asli Papua maupun komunitas non-lokal yang menetap di wilayah ini. Namun, hingga saat ini, konflik di Papua telah memasuki fase yang lebih serius, dengan intensitas yang meningkat dan berpotensi semakin memburuk jika tidak ada penyelesaian konkret. Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pihak menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan Papua sebagai tanah yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Konflik di Papua disebabkan oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama antara pemerintah serta masyarakat lokal, dengan dukungan dari komunitas internasional dan media. Selain itu, masyarakat lokal memiliki peran penting dalam membangun perdamaian melalui praktik-praktik adat mereka serta keterlibatan dalam proses perdamaian. Pemerintah pusat juga perlu menghormati hak-hak masyarakat lokal terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat Papua. Organisasi internasional dan media memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat

Papua serta memberikan dukungan bagi terciptanya stabilitas dan perdamaian di wilayah ini.

Dengan partisipasi aktif dan kerja sama yang melibatkan semua pihak, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi wilayah yang lebih stabil, adil, dan sejahtera. Meskipun membangun perdamaian bukanlah tugas yang mudah, dengan langkah-langkah konkret dan komitmen bersama, Papua dapat menjadi tanah yang damai bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 41-46.
- Kossay, P., & Bhakti, I. N. (2011). Konflik Papua: akar masalah dan solusi.
- Ladjar, L. L. (2011). Papua Baru” dan “Papua Tanah Damai”. *Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura*, 5-7.
- Yaboisembut, F. (2011). Konsep Papua Tanah Damai Dari Perspektif Budaya Papua (Dewan Adat Papua). *Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura*, 5-7.
- Araf, A. (2011). Sekuritisasi Papua: implikasi pendekatan keamanan terhadap kondisi HAM di Papua. (*No Title*).
- Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 41-46.
- <https://investor.id/opini/241741/mewujudkan-papua-tanah-damai>

MIRAS, KRIMINALITAS, DAN PERAN PEMUDA: MEMBANGUN PAPUA TANAH DAMAI

Yuliana Agustina Youwe¹ dan Ferawati Workas²

Pendahuluan

Papua, dengan kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan sosial. Salah satu faktor utama yang memicu berbagai kasus kriminalitas di wilayah ini adalah penyalahgunaan minuman keras (miras) dan narkoba. Konsumsi miras telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan, dari penganiayaan, pencurian, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan.

Selain dampak kriminalitas, miras dan narkoba juga berdampak pada pemuda—generasi penerus yang seharusnya menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Pemuda di Papua, khususnya di Kabupaten Keerom, memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan miras dan narkoba. Sementara sebagian pemuda terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat, banyak pula yang memilih jalur positif dengan mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi komunitasnya.

Artikel ini akan membahas dampak miras dan narkoba, studi kasus di Kabupaten Keerom, serta upaya pemuda dalam membangun Papua

¹ Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Email: yulianayouwe08@gmail.com

² Email: macefhe28@gmail.com

sebagai Tanah Damai, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Miras, Narkoba, dan Kriminalitas di Papua

Miras telah lama menjadi bagian dari interaksi sosial di Papua, tetapi dalam perkembangannya, penyalahgunaan miras justru memicu banyak tindak kejahatan. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021**, tercatat **6.962 kasus kriminalitas**, dengan sekitar **50 persen dari 800 pidana umum** yang terjadi di Papua dipicu oleh pelaku yang mengonsumsi miras.

Kasus kriminalitas yang dipengaruhi oleh miras dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk:

- **Kota Jayapura**, di mana angka kriminalitas meningkat dari **3.244 kasus pada tahun 2021 menjadi 3.636 kasus di tahun 2022**. Lebih dari **50 persen kasus kriminal** di kota ini terkait dengan konsumsi miras.
- **Kabupaten Keerom**, yang menjadi jalur transit bagi distribusi miras dan narkoba, mencatat **35 kasus kriminal akibat miras**, termasuk **16 kasus penganiayaan**, **8 kasus kekerasan dalam rumah tangga**, serta beberapa kasus kematian akibat konsumsi berlebihan.

Dampak miras terhadap individu dan masyarakat cukup luas, di antaranya:

- **Gangguan kesehatan**: Penyalahgunaan miras menyebabkan kerusakan saraf, gangguan jantung, metabolisme tubuh, serta peningkatan risiko penyakit kronis.
- **Peningkatan agresivitas**: Banyak pelaku kejahatan bertindak di bawah pengaruh alkohol, menyebabkan insiden kekerasan dan konflik sosial.
- **Ketergantungan ekonomi**: Konsumsi miras yang berlebihan sering kali mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan finansial untuk membeli alkohol.

Selain miras, narkoba juga menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat Papua. Kabupaten Keerom, dengan letaknya yang strategis sebagai jalur transportasi, sering menjadi titik transit bagi peredaran narkoba skala besar. Pada tahun 2024, polisi menangkap **5 orang yang terlibat kasus narkoba jenis ganja seberat 1,4 gram**, sementara dalam razia gabungan TNI-Polri, ditemukan **1,7 kilogram ganja** dari dua tersangka.

Meskipun pihak kepolisian telah berupaya keras untuk menindak pelaku peredaran miras dan narkoba, tantangan besar masih ada. **Produsen miras ilegal terus beroperasi**, sementara jaringan narkoba yang lebih besar masih sulit diberantas sepenuhnya.

Studi Kasus di Kabupaten Keerom: Pemuda sebagai Agen Perubahan

Kabupaten Keerom merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak nyata dari penyalahgunaan miras dan narkoba. Keerom tidak hanya mencatat banyak kasus kriminal akibat zat-zat tersebut tetapi juga memiliki **komunitas pemuda yang aktif berkontribusi dalam pemberantasan miras dan narkoba**.

Dalam wawancara dengan beberapa pemuda Keerom, ditemukan bahwa banyak dari mereka terjerumus ke dalam konsumsi miras dan narkoba akibat faktor lingkungan dan tekanan hidup. Berikut beberapa alasan utama keterlibatan pemuda dalam penyalahgunaan zat:

- **Lingkungan pergaulan negatif:** Pemuda yang berinteraksi dengan teman sebaya yang sudah terbiasa mengonsumsi miras cenderung ikut terjerumus.
- **Ketidakkampuan mengelola emosi:** Banyak pemuda menghadapi tantangan emosional akibat konflik keluarga atau tekanan ekonomi, yang mendorong mereka mencari pelarian melalui miras dan narkoba.
- **Keinginan menikmati kesenangan berlebihan:** Sebagian pemuda awalnya hanya ingin bersenang-senang tetapi kemudian mengalami ketergantungan.

Namun, tidak semua pemuda terjebak dalam penyalahgunaan zat. Banyak pemuda Keerom yang memilih jalur positif dengan **berkontribusi dalam komunitas sosial dan keagamaan**. Mereka aktif dalam **kegiatan olahraga, seni, fotografi**, dan kepemimpinan komunitas, membuktikan bahwa pemuda Papua memiliki potensi besar sebagai agen perubahan.

Membangun Papua Tanah Damai: Peran Pemuda dalam Pemberantasan Miras dan Narkoba

Di tengah maraknya kasus kriminal akibat miras dan narkoba, pemuda memiliki peran penting dalam membangun Papua sebagai Tanah Damai. Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk membantu memberantas penyalahgunaan zat serta mengurangi angka kriminalitas:

1. Menjadi Pendamping dan Teman yang Peduli

Pemuda dapat membantu teman sebaya yang terjebak dalam lingkungan negatif dengan pendekatan berbasis kepedulian, empati, dan motivasi.

2. Membangun Jejaring Sosial yang Positif

Komunitas berbasis olahraga, seni, pendidikan, dan agama dapat menjadi alternatif bagi pemuda untuk mengalihkan perhatian dari perilaku menyimpang.

3. Mendorong Kesadaran dan Edukasi

Sosialisasi tentang bahaya miras dan narkoba harus digencarkan melalui seminar, diskusi terbuka, serta kampanye sosial di berbagai platform.

4. Mengembangkan Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Pemuda yang aktif dalam komunitas sosial dan keagamaan lebih cenderung memiliki perspektif positif tentang kehidupan dan menjauhi penyalahgunaan zat.

5. Berpartisipasi dalam Advokasi dan Kebijakan Publik

Pemuda dapat turut serta dalam advokasi untuk memperketat regulasi peredaran miras dan narkoba serta meningkatkan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan zat.

Penutup

Penyalahgunaan miras dan narkoba telah menjadi tantangan besar di Papua, terutama dalam hal kriminalitas dan ketertiban sosial. Namun, **pemuda memiliki potensi besar dalam membangun Papua sebagai Tanah Damai**. Dengan kesadaran, jejaring sosial yang positif, serta keterlibatan dalam edukasi dan advokasi, pemuda dapat menjadi **agen perubahan** yang membantu memberantas miras dan narkoba serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Sinergi antara **pemuda, pemerintah, dan masyarakat** sangat diperlukan untuk mengembalikan Papua ke identitasnya sebagai **“Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi”**, sebuah wilayah yang bebas dari pengaruh zat berbahaya dan penuh dengan potensi generasi muda yang berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Darwis dkk, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengatasinya*.

Anton Tabah, *Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer)*, No 41 Tahun IV, Bandung: Sinar Cakra Sakti, 1990.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.

Jurnal

Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum

Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Vol. 21, No. 2, Mei (2016): hlm. 125 – 134.

Amanda Nia, *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol.5, No.6, Mei (2017): hlm. 1 – 18.

Mulyadi Alrianto Tajuddin & Agus S., *Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke: Perspektif Kriminologi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Papua.

Nasri Nalole, *Analisis Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Keerom*.

Sumber Lain

Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*.

Kompas.com, *35 Kasus Kriminal Akibat Miras Terjadi di Keerom Setahun Terakhir*, <https://regional.kompas.com>.

Kompas.id, *Picu Kriminalitas di Papua, Penegakan Perda Miras Harus Ditingkatkan*, <https://www.kompas.id>.

Kumparan.com, *50 Persen Pelaku Kriminalitas di Kota Jayapura Dipengaruhi Miras*, <https://kumparan.com>.

JPNN.com, *Irjen Mathius Sebut Kasus Kriminal di Papua Kebanyakan Berawal dari Miras*, <https://m.jpnn.com>.

P2PTM Kemkes, *Dampak Minuman Keras pada Kesehatan*, <https://p2ptm.kemkes.go.id>.

Portal Universitas Quality, *BAB II Minuman Keras dan Penyalahgunaannya*, <http://portaluniversitasquality.ac.id>.

Kompas.com Skola, *Pendapat Para Ahli Mengenai Generasi Muda*, <https://www.kompas.com>.

Elshinta.com, *Kasus Narkoba di Keerom dan Upaya Penindakannya*, <https://www.elshinta.com>.

MUTUAL TRUST DI TENGAH KOMPLESKITAS ISU PAPUA

Fransiskus Bala Kleden

Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban modern, konflik Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1969 adalah salah satu konflik paling lama yang masih awet bertahan hingga saat ini.¹ Konflik yang pecah di ujung timur tanah air tercinta ini awalnya hanya melibatkan ketegangan antara pihak pemerintah Indonesia dan kelompok separatis² saja. Namun, ketegangan-ketegangan tersebut kini merambah lebih luas

¹ Keinginan Irian Jaya (sekarang disebut Papua) untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa ditelusuri sejak bergabungnya provinsi tersebut ke dalam NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Tetapi upaya untuk menjadi negara sendiri pelan-pelan redup selama masa Orde Baru. Pada saat ini, ketika Soeharto tidak berkuasa lagi, perjuangan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Perjuangan itu kelihatan mulai menampakkan hasil ketika mereka mulai berani-berani mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Kenaikan bendera Bintang Kejora inilah yang menjadi pemicu awal pelbagai kerusuhan di Papua. Bernard Raho, "Konflik di Indonesia: Problem dan Pemecahannya - Ditinjau dari Perspektif Sosiologis" dalam Guido Tisera (ed.), *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian* (Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, 2001), hlm. 127.

² Ada beberapa perbedaan sebutan terhadap "kelompok separatis" ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, misalnya, menyebut kelompok ini dengan nama *Kelompok Teroris Bersenjata* (KTB) dengan dasar Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Penyebutan ini didukung juga oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lalu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutnya dengan sebutan *Kelompok Separatis Teroris* (KST), sedangkan TNI dan Polri menyebutnya dengan nama *Kelompok Kriminal Bersenjata* (KKB). Di sisi lain, kelompok bersenjata Papua secara konsisten mengaitkan dirinya dengan gerakan separatisme melalui sebutan *Organisasi Papua Merdeka* (OPM) dan *Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat* (TPNPB). Hemat penulis, perbedaan penyebutan nama ini akan sangat berdampak pada munculnya perbedaan persepsi dan strategi penanganan konflik. Ini tentu dapat berimplikasi terhadap siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan konflik serta bagaimana cara-cara penanganannya.

dalam konflik antarsesama orang asli Papua (OAP), dan konflik antar orang Papua dengan sesama warga negara Indonesia (OAP melawan non-OAP). Konflik yang berkepanjangan ini menjadi keprihatinan bersama seluruh masyarakat Indonesia karena sudah tak tanggung-tanggung menjatuhkan banyak korban jiwa. Kehadirannya adalah satu tantangan besar yang sudah dan akan terus memasung perkembangan kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri.

Panorama konflik yang ditandai dengan pelbagai kasus kekerasan, pertengkaran, kerusakan, huru-hara, perang antarsuku, pemberontakan, penembakan dan pembantaian telah mencederai kemanusiaan sebagai keutamaan universal yang harus dimiliki setiap masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ini beralasan kuat, sebab hanya atas nama kemanusiaan-lah, setiap manusia berhak mendapat perlindungan serentak mendapat akses untuk diperlakukan sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusiawi. Artinya, menghargai kemanusiaan menuntut sebuah kesadaran totalitas, bukan sekadar menahan diri dengan tidak mengganggu atau mengusik orang lain, atau hanya bersifat pasif semata. Menghargai kemanusiaan di sini lebih ditampakkan dalam cara manusia memperlakukan manusia lain melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan riil atas dasar nilai-nilai universal kemanusiaan. Dengan lain kata, menghargai kemanusiaan adalah sebagaimana manusia memanusiation manusia itu sendiri.

Konsep-konsep kemanusiaan yang luhur dan mulia ini hampir tidak ditemukan dalam konflik yang muncul di Papua. Sadar atau tidak, kekerasan demi kekerasan yang terjadi telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tutupnya sekolah dan fasilitas-fasilitas kesehatan, lumpuhnya aktivitas pemerintahan, kelaparan serta arus migrasi yang masif dalah sederetan bukti konkret dari peminggiran kemanusiaan di Papua. Berhadapan dengan realitas ini, pertanyaan- pertanyaan mendesak yang perlu diangkat adalah *“Apa sebetulnya akar (motif) paling utama dari konflik berkepanjangan di Papua ini? Lalu, siapa yang harus bertanggungjawab*

Bdk. Angel Damayanti, “Papua di Antara Beragam Kepentingan”, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/28/papua-di-antara-beragam-kepentingan>.

memutuskan mata rantai konflik? Dan, bagaimana pihak-pihak yang bertanggungjawab secara konkret membangun kedamaian di Papua?"

Potret Konflik: Data Kekerasan, Motif, dan Beberapa Pendekatan yang Pernah Ditempuh

Jika 24 tahun silam, presiden Habibie menilai masalah Timor Timur seakan-akan sebagai “kerikil dalam sepatu”, presiden Jokowi dalam konfrontasi awal terhadap masalah Papua menunjukkan dua sikap fenomenal yang mungkin dianggap tabu oleh rezim-rezim sebelumnya. Sikap *pertama*, Jokowi secara terbuka mengakui bahwa di Papua memang ada konflik, sesuatu yang ditutup rapat oleh para petinggi militer selama ini. Sehari setelah mengikuti Perayaan Natal Nasional di Stadion Mandala, Jayapura (28/12/2014), Jokowi menunjukkan kesungguhannya untuk mengakhiri konflik dengan aksi blusukan ke Wamena, sebuah tempat di wilayah Pegunungan Papua yang oleh kalangan militer dinilai sebagai “daerah merah”. Di sana Jokowi berdialog dengan beberapa tokoh adat dan menanyakan langsung keinginan mereka.³ Sikap *kedua*, pada 10 Mei 2015, Jokowi secara mengejutkan membuka Papua bagi para jurnalis asing yang mau mengkaji tentang isu Papua. Pada saat yang sama, Jokowi juga memberikan grasi pada lima orang tahanan politik yang terlibat OPM. Jokowi menegaskan bahwa pemberian grasi tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua.⁴

Dalam kajian kepustakaan, penulis menemukan adanya tiga sumber berbeda yang melaporkan tentang jumlah kekerasan yang sudah terjadi di Papua. Gugus Tugas Papua (*sumber pertama*) melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan di Papua bisa mencapai 348 kali sejak 2010 hingga Maret 2022. Di sisi lain, Aliansi Demokrasi untuk Papua (*sumber kedua*) melaporkan adanya 63 kasus kekerasan pada 2021 dan 53 kasus pada 2022. Dan, Kepala Kepolisian Daerah Papua (*sumber ketiga*) melaporkan

³ Nico Gere, *Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua* (Jakarta: Perum LKBN Antara, 2015), hlm.79-80.

⁴ Lima orang yang diberikan grasi oleh Presiden Jokowi adalah para pelaku serangan ke gudang senjata di markas Kodim Wamena pada 2003. Mereka adalah *Linus Hiel Hiluka* dan *Kimanus Henda* (keduanya divonis 19 tahun 10 bulan), *Jeftai Murib* dan *Numbunga Telenggen* (keduanya divonis seumur hidup), serta *Apotnalogolik Lokobalm* (vonis 20 tahun). Bdk. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi.

angka yang lebih besar lagi, yaitu 106 kasus kekerasan pada 2021 dan 90 kasus pada 2022.⁵ Meskipun ketiga sumber ini memaparkan gambaran kuantitatif yang berbeda, jumlah-jumlah tersebut sudah secara eksplisit menunjukkan bahwa kekerasan di Papua masih terus terjadi selama lebih dari 50 tahun.

Seturut riset yang dilakukan LIPI, ditemukan empat akar utama konflik di Papua. *Pertama*, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Riset mengatakan bahwa orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Artinya, sejarah yang masih bengkok-bengkok ini harus terlebih dahulu dibicarakan secara tuntas. *Kedua*, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik pertama di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tak pelak membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan ketika berkumpul. *Ketiga*, masifnya arus migrasi ke Papua. Tak dapat dimungkiri, banyaknya pendatang ke Papua telah memarginalisasikan orang asli Papua (OAP) dan memunculkan sentimen tersendiri. Kondisi demografis pun menjadi timpang di mana jumlah pendatang kini diprediksi sudah melebihi jumlah OAP. Migrasi, pembangunan, dan pengambilan kebijakan lain yang tidak melibatkan OAP membuat mereka merasa tersingkir. Jika sudah merasa tersingkir, masyarakat Papua akan semakin rentan terdiskriminasi oleh ketidakadilan struktural. *Keempat*, kegagalan pembangunan Papua. Ukuran sederhana kegagalan pembangunan tampak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Di Papua kita mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajarnya karena tidak ada guru, serta puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan.⁶

⁵ Data tentang gambaran jumlah kekerasan di Papua ini bisa dibaca dalam Angel Damayanti, "Papua di Antara Beragam Kepentingan" (*loc.cit*).

⁶ Riset LIPI ini bisa dibaca dalam <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik->

Terhadap akar-akar permasalahan di atas, sudah ada beberapa pendekatan solutif yang diambil guna menanggapi konflik di Papua, namun semuanya berujung pada kegagalan. Yang terjadi malah sebaliknya, kekerasan malah makin bertumbuh subur di Papua. Beberapa pandangan menyalahkan “pendekatan keamanan” yang digunakan pemerintah karena cenderung represif dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pendekatan keamanan seperti ini disinyalir lebih berpotensi memicu teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal *memoria passionis* atau ingatan-ingatan tentang penderitaan bagi generasi Papua masa depan.⁷

Kehadiran “pendekatan ekonomi” juga dianggap gagal membawa kesejahteraan bagi orang asli Papua, sebaliknya ia malah mendorong praktik korupsi kepala-kepala daerah Papua. Selain itu, “pendekatan sosial-budaya” yang digiatkan melalui para intelektual dan pikiran-pikiran bernaasnya juga kerap kali gagal. Daya tawar para intelektual lemah terhadap pemegang kekuasaan. Alih-alih hadir sebagai alat kritik dan kontrol atas kekuasaan yang korup, para intelektual malah dengan mudah dijinakkan oleh kekuasaan sendiri.⁸ “Pendekatan kemanusiaan” juga telah dirajut bersama. Pada 11 November 2022 lalu, Komnas HAM, *United Liberation Movement for Papua*, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah berkumpul bersama di Swiss dan menandatangani sebuah naskah

Papua/5818. Di samping empat alasan di atas, ada juga dua alasan lain yang diangkat oleh Kajian Gugus Tugas Papua UGM (2022). Alasan *pertama*, motif politik lokal yang berhubungan erat dengan kontestasi politik di daerah, seperti pilkada dan perekrutan birokrasi. Pascareformasi, pemekaran menjadi strategi yang dianggap jitu untuk mengindonesiakan Papua, tetapi menimbulkan banyak ekses. Dalam kasus pilkada, para calon tak siap menerima kekalahan. Hasilnya, kekerasan terjadi dalam setiap tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran hingga penetapan. Hal tersebut juga berlaku pada proses perekrutan birokrasi yang jauh dari prinsip meritokrasi. Alasan *kedua*, motif ekonomi yang dipengaruhi oleh kontestasi sumber daya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilacak melalui konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan yang terjadi di seputar aktivitas pengamanan untuk proyek investasi. Selain itu, terjadi pula perebutan sumber daya ekonomi antarmasyarakat, seperti tanah atau lahan hingga tambang ilegal. Bisa dibaca dalam Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, “Konflik Papua dan Tanggung Jawab Intelektual”, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/16/konflik-papua-dan-tanggung-jawab-intelektual>.

⁷ Fabio Maria Lopes Costa, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, dan Dian Dewi Purnamasari, “Tuntaskan Konflik Papua dengan Jalan Dialog”, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/28/tuntaskan-konflik-dengan-jalan-dialog>.

⁸ *Ibid.*,

yang diberi nama “Jeda Kemanusiaan”. Tujuannya adalah menyediakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Papua, serta menyiapkan kepastian tentang hak-hak dasar para tahanan dan narapidana. Ikhtiar damai yang ditawarkan oleh “pendekatan kemanusiaan” terbilang sangat mulia, tetapi pelik untuk mewujudkannya.⁹

***Mutual Trust* dan Negosiasi Damai: Perspektif Penulis**

Pendekatan keamanan, ekonomi, sosial-budaya, kemanusiaan serta solusi dialog yang berulang kali diusulkan sebagai upaya penyelesaian masalah di Papua kerap berujung rusuh atau bahkan ditolak. *Ending* kegagalan demi kegagalan ini perlu dievaluasi secara tuntas. Menurut penulis, akar terdalam dari konflik yang berujung kekerasan di Papua adalah “rendahnya rasa saling percaya” (*mutual trust*) antarsesama OAP dan juga antar OAP dengan pemerintah dan sesama warga Indonesia lain. Lemahnya “rasa saling percaya” ini mendorong pihak OAP untuk menganggap pihak sebelah sebagai lawan yang terus dicurigai. Tak ada satu titik kebaikan yang dilihat dari sebelah. Pihak sebelah, menyitir *Hobbes*, hanya dilihat sebagai serigala bagi pihaknya.¹⁰ Akibatnya, ancaman dan intimidasi-intimidasi yang memancing datangnya tindakan-tindakan destruktif akan dibalas pula dengan ancaman-ancaman baru dan destruksi-destruksi lainnya. Di tengah dinamika kekerasan demikian, *mutual trust* jadi satu-satunya kunci yang dipakai untuk membuka pintu hati kedua belah pihak. Dengan pintu hati yang terbuka, pihak-pihak yang berkonflik akan diantar menuju suatu proses komunikasi yang dapat membantu penyamaan persepsi baik di level internal warga Papua maupun dengan pemerintah.

⁹ Hamid Awaludin, “Jeda Kemanusiaan di Papua”, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/jeda-kemanusiaan-di-papua>.

¹⁰ Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* menulis bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (Latin: *homo homini lupus est*). Pepatah itu hendak mengkritisi tabiat manusia yang kerap kali berlaku kejam kepada sesama manusia. Bak serigala, manusia kerap kali kehilangan perikemanusiaan pada saat berbuat jahat kepada sesamanya. Bahkan lebih ekstrem lagi, dalam tindakan kekerasan terhadap sesamanya, dia berpikir dan merasa bahwa dia sedang tidak melakukannya pada ‘sesamanya’, tetapi pada ‘musuh’ yang harus dihancurkan.

Konflik dan kekerasan akan muncul dari komunikasi yang terdistorsi, dari tiadanya pengertian dan pemahaman, dari ketidaktulusan dan penipuan (*deception*). Jika komunikasi sudah terdistorsi, lingkaran ketidakpercayaan satu sama lain yang tidak terkontrol akan mudah menggerogoti dua belah pihak. Untuk itu, komunikasi perlu dimulai oleh OAP dan pihak sebelah (pemerintah, non-OAP) dengan terlebih dahulu membebaskan diri mereka dari prasangka- prasangka buruk yang membelenggu. Dengan mengeliminasi prasangka, *mutual trust* dengan sendirinya akan muncul dan berdiri kokoh. Komunikasi yang berlandas pada *mutual trust* (rasa saling percaya) akan menutup ruang bagi terjadinya segala bentuk kekerasan karena di sana terdapat “keadaan setara dari saling tukar-menukar perspektif” (*the symmetrical condition of mutual perspective-taking*).¹¹

Menurut penulis, di tengah beragam aktor dan kepentingan yang ada di Papua, komunikasi di atas fondasi *mutual trust* (rasa saling percaya) dapat mendorong kedua belah pihak untuk membangun sebuah persepsi yang sama tentang masalah yang sedang dihadapi. Di sana, “negosiasi damai” sebagai resolusi bersama bisa dibicarakan lebih jauh. Komunikasi berlandas *mutual trust* dan negosiasi damai menjadi langkah awal untuk membahas upaya bersama agar seluruh OAP dapat menikmati perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan keadilan sosial. Untuk itu, komunikasi dan negosiasi damai perlu melibatkan pemerintah Indonesia dengan OPM, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang diterima oleh kedua belah pihak, seperti yang dilakukan dalam perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain melibatkan pemerintah Indonesia dengan OPM, komunikasi dan negosiasi damai juga perlu melibatkan warga Papua sendiri dan memfasilitasi sebanyak mungkin aspirasi dari representasi OAP. Di sini, peran lembaga dan tokoh agama serta para intelektual yang peduli dengan masyarakat Papua harus dilibatkan. Ini penting untuk memenangkan hati dan semangat masyarakat Papua. Dengan demikian, OAP tidak lagi merasa dibeda-bedakan oleh pemerintah Indonesia karena OAP adalah kita.

¹¹ Giovanna Borradori, *Philosophy in a Time of Terror: Dialogue with Jurgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), hlm. 64.

Implementasi Praktis

Hasil komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat pada gilirannya harus diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan administratif demi mencapai tujuan-tujuan kolektif. Ini penting mengingat komunikasi tanpa implementasi praktis adalah absurd.¹² Setelah melewati proses komunikasi dan negosiasi damai, kedua belah pihak (OPM dan pemerintah Indonesia) harus memutuskan untuk saling mengucapkan janji demi hubungan baik di kemudian hari. Semua tekad untuk hidup bersama secara damai dapat diinstitutionalisasi. Harapan-harapan bersama harus distabilkan dalam bentuk konstitusi-konstitusi, undang-undang, aturan-aturan, atau konvensi-konvensi yang baru. Aturan-aturan baru inilah yang menjadi tali untuk mengikat erat persatuan dan perdamaian kembali antara pihak OAP dan pemerintah Indonesia.

Penutup

Dinamika kekerasan di Papua adalah dinamika saling menghancurkan. Permusuhan antarsesama OAP, antar OAP dengan pemerintah, dan antar OAP dengan sesama warga Indonesia lain semakin hari semakin tajam. Pihak-pihak yang berselisih saling mengutuki, setiap gerak-gerik lawan dicurigai sebagai tipu muslihat untuk melakukan serangan, iklim ketidakpercayaan tumbuh di mana-mana dan rasa ketidakpastian meningkat dengan adanya ancaman-ancaman. Kompleksitas isu Papua ini sudah dikaji dari motif-motif penyebab konflik hingga bermuara pada penentuan solusi yang adil bagi kemelut pihak-pihak yang berkonflik dan terutama bagi keutuhan bangsa Indonesia. Semangat *mutual trust* (rasa saling percaya) bisa menjadi air yang memadamkan api penyulut konflik. *Mutual trust* yang kokoh mampu menghantar OAP, pemerintah, dan sesama warga negara Indonesia pada pemahaman dan persepsi yang satu dan sama sebagai satu bangsa. Sudah terlalu banyak korban manusia, kehilangan harta benda dan terutama kerusakan moralitas. Mari bersama-

¹² F. Budi Hardiman, *Massa, Teror dan Trauma* (Yogyakarta: Penerbit Lamalera & Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 39.

sama saling percaya, buka hati untuk komunikasi dan negosiasi demi Papua dan bangsa Indonesia yang damai.

Daftar Pustaka

- Awaludin, Hamid. "Jeda Kemanusiaan di Papua", dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/jeda-kemanusiaan-di-papua>.
- Borradori, Giovanna. *Philosophy in a Time of Terror: Dialogue with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
- Costa, Fabio Maria Lopes, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, dan Dian Dewi Purnamasari. "Tuntaskan Konflik Papua dengan Jalan Dialog", dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/28/tuntaskan-konflik-dengan-jalan-dialog>.
- Damayanti, Angel. "Papua di Antara Beragam Kepentingan", dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/28/papua-di-antara-beragam-kepentingan>. Gere, Nico. *Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua*. Jakarta: Perum LKBN Antara, 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Massa, Teror dan Trauma*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera & Penerbit Ledalero, 2011.
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi.
- Indonesia, Alfath Bagus Panuntun El Nur. "Konflik Papua dan Tanggung Jawab Intelektual", dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/16/konflik-papua-dan-tanggung-jawab-intelektual>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua", dalam <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818>.
- Raho, Bernard. "Konflik di Indonesia: Problem dan Pemecahannya - Ditinjau dari Perspektif Sosiologis" dalam Guido Tisera (ed.), *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*. Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen (LPBAJ) Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, 2001.

Membangun Sikap Keterbukaan untuk Berdialog Dalam rangka penyelesaian konflik kekerasan di Tanah Papua

Yohanes kayame

Pendahuluan

Persoalan kekerasan di Tanah Papua kerap kali terjadi setiap tahun. Ada pembunuhan, eksploitasi sumber daya alam, penembakan bahkan stigma-stigma terhadap orang Papua. Sedikitnya ada tiga pelanggaran HAM berat yang masih dicatat oleh KOMNAS RI, yakni kasus Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003) dan Paniai berdarah (2014). Tiga kasus ini masih menggantung, belum ada penyelesaian secara serius oleh pemerintah. Termasuk juga kasus-kasus lain yang masih belum diselesaikan dengan tuntas.

Persoalan di Papua amat kompleks. Artinya persoalan ini mengandung banyak segi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Semuanya saling kait-mengait dan sulit diurai. Bahkan persoalan ini mempengaruhi aktivitas semua orang yang ada di Papua baik dalam memenuhi kebutuhan harian, pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan. Terutama bagi masyarakat di daerah konflik, seperti di Intan Jaya atau Maybrat yang bahkan menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran.

Demi kesejahteraan bersama, mesti ada solusi-solusi yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya adalah dialog Jakarta Papua,

yang dikampanyekan oleh Pater Neles kebadabi Tebai, Pr bersama dengan JDP di Papua maupun di Jakarta. Sosialisasi sudah dilakukan di kampung-kampung juga di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Yogyakarta di hadapan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan di kampus-kampus. Termasuk juga melalui buku-buku yang diterbitkan JDP. Konsep dialog ini didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan berusaha mencari akar persoalan di Papua (Pamungkas & Rusdiarti sumariella, 2017).

Dialog dianggap penting dan bermartabat oleh pihak agama. Uskup Leo Laba Ladjar, Uskup Keuskupan Jayapura, pernah berkata “Rakyat Papua sudah bertekad untuk berjuang tanpa kekerasan, tetapi melalui perundingan dan diplomasi, dengan cara damai dan demokratis. Sikap yang amat simpatik itu harap tidak dijawab oleh Bedil, Bom dan Penjara” (Ladjar, 2009). Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Pendeta Sokrates Sofian Yoman, Presiden Gereja Baptis Papua. “ Dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh, dialog ini mesti dimediasi oleh pihak asing yang netral, yang disetujui oleh pihak Orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia” (Yoman, 2007). Hal yang sama juga disampaikan oleh Pimpinan Gereja KINGMI, Pdt. Dr. Benny Giyai. “Selama dua tahun terakhir semua pihak di Papua sudah mengusulkan pemerintah Indonesia mendekati ULMWP dan berunding.”¹³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai representasi pemerintah di daerah, juga mendukung dialog dengan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Guna menyikapi konflik yang berkepanjangan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar melakukan dialog damai.¹⁴ Dialog Jakarta-Papua mesti dilihat dalam bentuk sebuah negosiasi antara para aktor dengan mengutamakan kepentingan bersama (Kaisupy & Maing, 2021). Di lain pihak dialog dianggap sudah tidak relevan karena dianggap tidak sesuai dengan unsur komunikasi strategi visi dan misi Negara (Rick et al., 1999).

¹³ <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/benny-giyai-ulmwp-representasi-papua-berdialog-dengan-jokowi>

¹⁴ <https://jubi.co.id/dprd-se-papua-minta-jokowi-gelar-dialog-dengan-ulmwp/>

Presiden Jokowi dalam masa jabatannya pada periode pertama (2014-2019), populer dengan dialog sektoral, artinya dialog per sektor-sektor yang ada, misalnya sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor politik, dll (Nugroho & Sardini, 2019). Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-5, dalam pidatonya pada 16 Agustus 2010, mengatakan akan membangun Papua dengan hati dan dengan komunikasi konstruktif (Kossay, 2013).

Ironisnya, konsep dialog ini belum terlaksana lantaran tarik-menarik bahkan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun 2012, pihak OPM/KKB pernah menolak dialog Jakarta-Papua.¹⁵ OPM/KKB ingin dialog dengan konsepnya sendiri. OPM/KKB menyebut ingin berdialog dengan Pemerintah Indonesia asalkan dimediasi oleh PBB.¹⁶ Sikap pemerintah, hendak dialog tetapi dialog sektoral.¹⁷ Akhirnya, dialog tidak pernah terjadi.

Mengapa dialog tidak terlaksana pada hal usaha-usaha dialog sudah dilaksanakan? Apakah para aktor belum siap berdialog? Tulisan ini hendak meneliti dialog yang belum terealisasi ini.

Kilas balik dialog Jakarta-Papua

Usaha dialog Jakarta-Papua ini muncul karena akumulasi kekerasan yang terjadi akibat konflik antara dua kelompok, yakni KKB/OPM di Papua dengan slogan “Papua merdeka harga mati” dan Pemerintah Indonesia, dengan slogan “NKRI harga mati”. Kekerasan itu terjadi sejak Papua terintegrasi ke dalam Negara Republik Indonesia, tahun 1963. Menurut Natalius Pigai, mantan Komisioner HAM Indonesia, bahwa kekerasan ini terjadi sebagai bentuk kolonialisme bangsa Indonesia terhadap Papua. Pada saat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, yang dianggap tidak sah, terdapat klaim Indonesia dan Belanda

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/411686/opm-tolak-rencana-dialog-jakarta-papua> (diakses pada tanggal 13 april 2022, pukul 22.34 WIB)

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220325140636-20-776122/opm-tolak-dialog-damai-ide-komnas-ham-hanya-mau-di-pbb> (Diakses pada 13 april 2022, Pukul 22.50)

¹⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-lakukan-dialog-sektoral-untuk-papua/4081405.html> (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 11.00)

baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional (Pigai, 2014).

Pada saat ini pun kita masih mendengar dan merasakan kasus-kasus kekerasan antara TNI/POLRI dan OPM/KKB, yang berdampak pada masyarakat sipil yang harus mengungsi, meninggalkan tempat tinggal mereka. Misalnya kasus pengungsian warga Nduga ke Wamena, yang terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah pengungsi sekitar 2000 penduduk (Haluk, 2019) atau kasus pengungsian di Maybrat, akibat kontak senjata antara TNI dan OPM/KKB pada tahun 2021.

Perjuangan Pater Neles bersama JDP dibantu penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Usaha LIPI adalah pemetaan akar persoalan Papua dalam empat pokok yakni, masalah sejarah atau status integrasi papua ke dalam NKRI, Operasi Militer yang pernah terjadi, stigma sebagai orang yang termarginal, dan kegagalan pembangunan di Papua.¹⁸ Pemetaan ini dianggap akan membantu dalam proses dialog. Masalah yang dihadapi oleh pihak Jakarta Papua sudah digambarkan oleh LIPI. Proses dialog Jakarta Papua akan dipermudah jika menghadirkan aktor-aktor dalam dialog yakni ada sembilan aktor: TNI-Polri, TPN-OPM, orang Papua (yang ada di Papua), paguyuban para migran di Papua, orang Papua (di luar Papua), Investor, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat (Pamungkas & Rusdiarti Suma Riella, 2017).

Menurut Pater Neles, dialog penting karena ada indikasi konflik di Papua. *Pertama*, masih adanya penembakan. Di dalam media massa – cetak dan elektronik- kadangkala memuat berita-berita pembunuhan yang mengakibatkan korban kematian bahkan menciptakan kondisi yang kurang nyaman untuk aktivitas. *Kedua*, adanya perlawanan OPM/KKB di hutan belantara terhadap TNI/POLRI yang dianggap sebagai penjajah. Perlawanan yang dilakukan dengan pembakaran beberapa alat berat untuk mencegah pembangunan jalan atau aset-aset pemerintah seperti rumah sakit, kantor-kantor pemerintah, bangunan sekolah, dan rumah-rumah. *Ketiga*, masih adanya pengibaran bendera bintang kejora setiap

¹⁸ <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818> (diakses pada tanggal 13 april 2022, pukul 22.14 WIB)

tanggal 1 Desember yang dirayakan sebagai hari kemerdekaan Papua (Tebay, 2016). *Keempat*, masih adanya tuntutan referendum. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terus menyuarkan referendum untuk Papua. KNPB menganggap bahwa penentuan pendapat rakyat yang pernah terjadi tahun 1969 adalah cacat dan tidak sesuai dengan aturan. Saat itu hanya 1025 orang Papua yang ikut, tidak semua orang Papua padahal diperkirakan ada 800.000 orang Papua waktu itu. *Kelima*, adanya sikap saling curiga dan tidak percaya antara orang Papua dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah menganggap orang Papua sebagai ‘separatis’, yang ingin berjuang untuk merdeka. Begitupun sebaliknya Orang Papua pun tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia. Mereka menganggap pemerintah Indonesia adalah penjajah Orang Papua. *Ketujuh*, adanya operasi-operasi militer di Tanah Papua.

Indikator-indikator ini mau mengandaikan bahwa Papua merupakan daerah konflik berkepanjangan sejak tahun 1963, sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia hingga kini. Konflik ini akan terus ada jika tidak ada kesadaran publik terhadap situasi ini. Kesadaran dari pemerintah Indonesia juga kesadaran para tokoh-tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, dan semua orang untuk bekerja sama. Kesadaran yang penting adalah kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang kian keropos akibat kekerasan antara satu dengan yang lain. Maka pentingnya membangun sikap keterbukaan untuk berdialog dalam rangka mengakhiri *memoria passionis*.

Membangun keterbukaan menurut Francis Bacon dan konteks konflik di Papua

Francis Bacon (1561–1626) adalah filsuf dan politikus di Kerajaan Inggris. Bacon lahir di York House, London pada tanggal 22 Januari 1561 pada masa pemerintahan Elizabeth I dari Inggris. Ayahnya bernama Nicholas Bacon yang berstatus sebagai pejabat tinggi di Kerajaan Inggris. Ketika berusia 12 tahun, ia menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge dan mengkhususkan pembelajaran tentang pemikiran Plato dan Aristoteles. Ia kemudian bekerja sebagai staf untuk duta

besar Kerajaan Inggris di Prancis pada tahun 1576. Bacon juga menjadi anggota Parlemen Inggris pada usia 23 tahun.¹⁹

Menurut Bacon, kemajuan hidup manusia seringkali terhambat oleh cara pandang manusia sendiri terhadap realitas hidupnya. Bacon menyebut “halangan” ini sebagai idola-idola. idola-idola itu dianalogikan seperti debu yang menempel di mata kita dan mengganggu proses penglihatan kita terhadap realitas di depan mata. “debu” ini berbentuk idola-idola dan seakan terpatir dalam benak pikiran kita (Prasetyono, 2013). Menurutnya ada empat idola yang menjadi rintangan dalam realitas hidup, yakni idola suku, idola gua, idola pasar dan idola teater.

- Idola suku (idols tribe) adalah suatu berhala terhadap pemikirannya sendiri sebagai subyek. Sebab tidaklah benar bahwa indra manusia adalah ukuran untuk semua persepsi, entah dari indra atau pikiran.
- Idola gua adalah berhala individu manusia. Setiap manusia memiliki gua atau sarangnya masing-masing yang merusak alam. Kerusakan muncul akibat sifat individunya, pengaruh membaca buku dan tokoh yang dikaguminya serta sifat individunya.
- Idola pasar adalah kecerdasan yang terhalang akibat kata-kata yang tidak tepat di tengah masyarakat. Opini-opini publik yang dibangun berdasarkan prasangka-prasangka orang terhadap suatu objek. Kebenaran dari opini ini tidak dapat dibuktikan dengan tepat, sehingga hanya menyesatkan.
- Idola panggung (teater) adalah sistem pemikiran yang terkemuka dari pada yang lain, yang membawa pemikiran orang pada tatanan hidup yang berbeda. Pada akhirnya akan turun panggung karena ada unsur-unsur yang hanya fiktif belaka dan tidak relevan.

Konteks pemikiran Bacon didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dianggap lama dan keliru. Orang mengagung-agungkan pengetahuan yang sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Orang terlalu mengidolakan sesuatu yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Idola terhadap ideologi-ideologi atau

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon (diakses pada 14 april 2022, Pukul 18.39)

tokoh-tokoh dalam sejarah yang berpengaruh terhadap hidup. Pemikiran terhadap ideologi itu bahkan dapat mempengaruhi seluruh perjuangan hidup bahkan kepada hal-hal yang mendasar dalam hidup. Misalnya idola terhadap seorang tokoh filsuf, tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Gaya berpikir dan berbicara pun dapat dipengaruhi oleh tokoh yang diidolakan. Gaya rambut Neymar, pemain Bola, diikuti oleh para idolanya dengan potongan rambut yang sama.

Dalam konteks pemikiran Bacon ini, slogan 'NKRI harga mati' dan 'Papua Merdeka Harga mati' adalah idola. Kedua belah pihak mengidolakan ideologinya masing-masing. NKRI Harga mati mempertahankan Papua ke dalam NKRI. Sebaliknya Papua merdeka harga mati dengan perjuangan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Bacon, idola itu seperti debu yang menutup mata kita untuk melihat sesuatu yang benar. Slogan NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati adalah debu yang menutup mata. Debu itu menutup hati Nurani dan merenggut sekian banyak korban karena kekerasan melalui operasi-operasi dan saling menembak antara TNI/POLRI dan OPM/KKB.

NKRI Harga mati dan Papua Merdeka Harga mati adalah idola suku. Kedua kelompok dengan sukyektivitasnya masing-masing menginterpretasi nilai untuk kepentingan masing-masing. Mereka mempertahankan kebenaran kelompok sebagai yang benar dan mesti diakui. Klaim kebenaran atas diri. Pemerintah Indonesia dengan klaimnya bahwa Papua sudah termasuk dalam NKRI dan itu diakui oleh PBB. Papua Merdeka Harga Mati dengan klaimnya bahwa Papua bukan dalam NKRI sebab cacat hukum saat PEPERA tahun 1969. Ketegangan ini mengakibatkan kekerasan, pembunuhan antara kedua belah pihak.

Slogan NKRI harga mati dan Papua Merdeka Harga Mati adalah juga sebagai idola Gua. Kedua kelompok itu sebagai sarang yang menampung ideologinya melalui hasil, diskusi, refleksi, atau melalui buku-buku yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh penting. Sifat individualitas dalam kelompok yang membentuk ideologi atau pemahaman tentang kebenaran-kebenaran. Pemahaman yang dibangun itu membentuk sarang-sarang

yakni pemahaman tentang NKRI dan Papua merdeka sebagai harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Selain itu slogan NKRI harga Mati dan Papua merdeka harga mati adalah idola pasar. Opini-opini publik sangat mempengaruhi orang atau kelompok. Opini publik tentang NKRI harga mati bisa saja menyesatkan orang pada kehidupan yang buruk, yang menindas bahkan membunuh orang. Begitupun sebaliknya, Papua Merdeka Harga mati dapat pula mengakibatkan korban nyawa terhadap TNI/POLRI atau siapa saja yang dianggap bagian dari kelompok TNI/POLRI.

Slogan Papua merdeka harga mati dan NKRI harga mati juga adalah idola panggung. Pemahaman yang 'naik daun' atau populer dalam iklim politik di Papua. Dua ideologi ini tampak mendominasi alam pikiran orang bahkan menciptakan ketegangan-ketegangan antar kelompok. Ada kelompok-kelompok yang mendukung NKRI Harga mati dan ada pula kelompok-kelompok yang mendukung Papua merdeka harga mati. Dua ideologi ini mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Pada waktu tertentu kedua ideologi ini dapat menjadi tidak relevan lagi untuk menciptakan kedamaian dan keadilan bagi orang Papua. keduanya dapat dikonstruksi dalam pemahaman-pemahaman yang lebih bermartabat, pemahaman yang manusiawi tanpa mengakibatkan pertumpahan darah antara satu dengan yang lain.

Bacon mengajak untuk lebih terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Membangun sikap keterbukaan dengan cara-cara baru, realitas yang baru, pemikiran yang baru untuk sebuah perdamaian yang hakiki.

Dialog sebagai jalan

Untuk itulah mesti ada dialog untuk menciptakan suasana kedamaian. Dialog Jakarta dan Papua atau Papua dan Jakarta yang dilakukan oleh sembilan aktor dan dimediasi oleh pihak yang netral. Para aktor bersama-sama berdialog dan menyepakati bersama solusi-solusi yang tepat dan relevan. Para aktor tersebut membagi informasi, mengungkapkan pendapat kepada yang lain. Tidak saling menutup diri

antara satu dengan lainnya. Setiap orang dan kelompok hendak berbagi pendapat dan idenya masing-masing dan menemukan solusinya secara bersama.

Perjuangan dialog sudah dilaksanakan oleh alm. Pater Neles Tebay sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Menurut Pater Neles dialog bukan sebagai tujuan melainkan sebuah jalan untuk sampai pada tujuan. Dialog hanya sebagai sarana, alat, instrument yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yakni perdamaian bagi Papua (Sarapung, 2013).

Pater Neles yakin bahwa dialog akan memungkinkan terjadinya perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Dialog akan menghentikan korban nyawa akibat kekerasan, penembakan, intimidasi dan teror antara kelompok 'Papua merdeka harga mati' dan 'NKRI harga mati'. Para aktor dapat bertemu dan menyepakati model dialog, cara, dan pelaksanaannya. Kedua pihak dapat dengan leluasa mengungkapkan gagasannya tanpa ada rasa paksaan atau intimidasi antar satu dengan yang lainnya sebab dialog memungkinkan permasalahan dapat teratasi dengan kondusif dan manusiawi.

Penutup

Bagi orang Papua, persoalan kekerasan di Tanah Papua (dapat) menjadi *memoria passionis*. Kekerasan itu terjadi sudah sejak tahun 1963, saat Papua masuk dalam NKRI. Kekerasan itu akibat ketegangan antara slogan NKRI harga mati dan slogan Papua merdeka harga mati. Kedua slogan ini membuat penderitaan yang berkepanjangan hingga kini. Dialog merupakan jalan yang baik dan bermartabat untuk menemukan solusinya. Para aktor dalam dialog dapat dipertemukan dan membagi informasi antara satu dengan yang lain secara terbuka. Para aktor 'meninggalkan dahulu' slogan harga mati dan menemukan pemahaman-pemahaman dan cara-cara yang baru dengan melepaskan idola-idola yang merongrong hidup dan martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Eka Putra, A. (2018). *MENUMBUHKAN SIKAP KETERBUKAAN TERHADAP YANG LAIN : Perspektif Silang Budaya (Cross-Cultural) Andi Eka Putra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung A . Pendahuluan Dalam Perspektif Sosiologis , Manusia Tak Mungkin Hidup Sendirian , Terisolir Satu D.* 13(1), 97–110.
- Elisabet, A. Dkk. (2005). *Agenda Dan Potensi Damai Di Papua*. LIPI Press.
- Giyai, B. P. D. (2000). *MENUJU PAPUA BARU: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Deiyai/Elsham Papua.
- Haluk, M. (2019). *Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua (1st Ed.)*. Pustaka Larasan.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). *PROSES NEGOSIASI KONFLIK PAPUA: DIALOG JAKARTA-PAPUA. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(1), 82.* <https://doi.org/10.23887/jish-Undiksha.V10i1.27056>
- Kossay, P. (2013). *MEMBANGUN PAPUA DENGAN HATI: Antara Ucapan Dan Realita*. TOLLELEGI.
- Mustofa, H. (2019). *Mewujudkan Dialog Untuk Perdamaian Di Tanah Papua.* 3–6.
- Nugrahanta, G. A. (2010). *The Instauratation Of Human Dominion Over Nature In Francis Bacon Novum Organum. Jurnal Orientasi Baru, 19(1), 33–50.* <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/view/1383>
- Nugroho, A. H., & Sardini, N. H. (2019). *Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019. Journal Of Politic And Government Studies, 8(3), 41–50.*
- Pamungkas, C., & Rusdiarti Suma Riella. (2017). *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pigai, N. (2014). *Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi Ham Dan Mencari Jalan Kedamaian). Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 23–*

38. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/72813-ID-Solusi-Damai-Di-Tanah-Papua-Mengubur-Tra.Pdf>
- Prasetyono, E. (2013). Manusia, Ilmu Pengetahuan, Dan Kesadaran Diri. *Orientasi Baru*, 22, No.2(Oktober), 187–205. [Http://Www.Usd.Ac.Id/Lembaga/Lppm/Jurnal.Php?Id=Abstraksi&Model=Volume&Id_J=15&Id_M=1063&Id_K=884](http://Www.Usd.Ac.Id/Lembaga/Lppm/Jurnal.Php?Id=Abstraksi&Model=Volume&Id_J=15&Id_M=1063&Id_K=884)
- Rick, S., Mara, E., Sumantri, S. H., Wahyudi, B., Studi, P., Dan, D., Konflik, R., & Pertahanan, U. (1999). *DIALOG STRATEGIS PAPUA DALAM MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA PAPUA STRATEGIC DIALOGUE IN PREVENTING THE NATIONAL DISINTEGRATION*. 7, 30–63.
- Serapung, J. E. (2013). *DIALOG SEBAGAI JALAN BUKAN TUJUAN.Pdf* (P. 436). Interfidei.
- Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. *Friedrich Ebert Stiftung*, 1–30.
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Jurnal Agama Dan Budaya*, 12(April), 82–106.
- Yoman, S. S. (2007). *Pemusnaan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat*. Cenderawasih Press.

Internet

- <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818> (diakses pada tanggal 13 april 2022, pukul 22.14 WIB)
- <https://nasional.tempo.co/read/411686/opm-tolak-rencana-dialog-jakarta-papua> (diakses pada tanggal 13 april 2022, pukul 22.34 WIB)
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220325140636-20-776122/opm-tolak-dialog-damai-ide-komnas-ham-hanya-mau-di-pbb> (Diakses pada 13 april 2022, Pukul 22.50)
- <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-lakukan-dialog-sektoral-untuk-papua/4081405.html> (diakses pada tanggal 13 april 2022, Pukul 11.00)
- <https://jubi.co.id/dialog-jakarta-papua-sudah-dikuburkan-indonesia-tapi-perlu-dicari-dan-dihidupkan-lagi/> (diakses pada tanggal 14 april 2022, Pukul 10.00 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon (diakses pada 14 april 2022, Pukul 18.39)

<https://www.satuharapan.com/read-detail/read/benny-giay-ulmwp-representasi-papua-berdialog-dengan-jokowi>

<https://jubi.co.id/dprd-se-papua-minta-jokowi-gelar-dialog-dengan-ulmwp/>

MEWUJUDKAN PAPUA TANAH DAMAI (TELAAH ZONPOLITIKON ARISTOTELES)

Ignasius Silubun OFM

Pendahuluan

Salah satu syarat dan jalan meraih *bonum commune* (kebaikan bersama) agar terwujudnya “Papua Tanah Damai” adalah memahami dengan baik gagasan Aristoteles tentang *zoonpolitikon* – manusia sebagai makhluk politik. Kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu setiap warga negara perlu masuk dalam realitas dan dilema politik yang terjadi saat ini.

Ketimpangan sosial, terutama kemiskinan dan termarginalisasinya masyarakat setempat merupakan faktor pemicu lahirnya berbagai konflik dan masalah. Meskipun disadari semangat “Papua Tanah Damai” lahir dari suatu realitas kepahitan Papua saat ini sedang menangis. Artikel ini membatasi persoalan pada ketimpangan sosial, terutama kemiskinan dan termarginalisasinya masyarakat setempat, yang menurut hemat kami merupakan pula pemicu absennya damai di Papua.

Situasi Kita

Buku “Termarginalisasi Kelapa Sawit – Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua” karya Bernardus Renwarin menampilkan fakta bahwa kemiskinan dan termarginalisasi suatu masyarakat karena adanya perubahan sosio-ekonomi di tengah masyarakat. Kelapa sawit dijanjikan membawa perubahan yang baik. Tetapi masyarakat sekitar malah dirugi-

kan. Lahan berkebun dan berburu digantikan oleh kelapa sawit sehingga sumber pangan hilang. Rencana pemerintah untuk percepatan dan perkembangan daerah tidak disertai penguatan kapasitas masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alexandro F. Rangga, OFM dalam dua bukunya tentang Papua “Fenomena Papua, Esai-Esai Sosial” dan “Tindakan Politik Bagi Papua”. Dua buku tersebut menyajikan fakta bahwa kemiskinan yang terjadi adalah pemiskinan oleh pihak-pihak tertentu dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya berupa pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan serta fungsi keadilan. Negara berfungsi untuk membuat kehidupan negara dan rakyatnya semakin layak untuk dihidupi. Paling kurang Rangga memberikan suatu gambaran dari fenomena Otonomi Khusus yang tidak berdasar atas aspirasi rakyat serta tragedi Asmat yang menghebohkan Negara pada September 2017 hingga Januari 2018.

Zoonpolitikon

Manusia pada dirinya adalah makhluk politik. Makhluk politik – *zoonpolitikon* yang menurut pemahaman Aristoteles sebagai makhluk yang hidup dalam sebuah *polis* (Koten, 2010: 159). Manusia yang hidup dalam sebuah *polis* adalah manusia yang ada untuk saling terhubung dan saling berinteraksi. Manusia sebagai makhluk politik juga adalah makhluk rasional (Koten, 2010: 163). Rasionalitas menghantar manusia untuk berpikir secara kritis atas realitas yang terjadi di sekitarnya. Melihat dan menilai apakah suatu realitas telah terjadi sesuai dengan nilai-nilai luhur *polis* atau malah sebaliknya. Jika realitas terjadi diluar nilai-nilai luhur suatu *polis* maka manusia bertanggung jawab untuk mengusahakan kesesuaian antara realitas dan idealisme dari nilai-nilai luhur *polis*.

Pokok penting dari *polis* dalam konteks di negara kesatuan Indonesia ialah Pancasila. Seorang *zoonpolitikon* akan bertindak dan menuntut kebenaran dan keadilan jika realitas yang ada di Papua tidak sesuai dengan Pancasila. Mayoritas masyarakat yang hidup melarat dan di bawah garis kemiskinan dan sebagian lagi hidup mewah dan berkelimpahan harta tidaklah sesuai dengan sila kelima dari Pancasila.

Lebih jauh, makhluk Politik memiliki kesadaran bahwa adanya *polis* bukan saja berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan finansial semata tetapi terciptanya iklim damai. Adanya *polis* bukan tentang “pembangunan hanya dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, cenderung merendahkan martabat manusia dengan mengorbankan pribadi manusia, dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendalam pada tuntutan dari keuntungan ekonomis saja” (Tebay, 2008: 69). Prinsip dasar dari manusia sebagai makhluk politik yang membangun polis yakni bahwa ia berjuang untuk menciptakan suatu sirkulasi keadaan damai.

Ketimpangan Sosial

Pada prinsipnya adanya ketimpangan sosial mengakibatkan banyak hal buruk dapat terjadi. Ketimpangan sosial “mengandung” kehancuran dan “melahirkan” berbagai persoalan kekerasan, diskriminasi, rasialisme, kecurigaan atau prasangka buruk terhadap orang lain, perampokan, dan konflik. Dalam konteks Papua, terlepas dari persoalan ideologi, ketimpangan sosial merupakan faktor pemicu berbagai persoalan yang terjadi baik di Papua dan daerah-daerah yang merasa senasib di tanah air. Ketimpangan sosial memunculkan ketidakpuasan terhadap kenyataan. Manusia *zoonpolitikon* akan gelisah tatkala kenyataan berbenturan dengan harapan.

Situasi-situasi berikut menyertai keadaan damai yakni keadilan, kesejahteraan atau kemakmuran, maupun keharmonisan. Situasi ini disebut keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial sulit terwujud ketika masyarakat mengalami kelaparan, kemiskinan, keterasingan dari tanahnya sendiri, keterbelakangan pembangunan, kemerosotan pendidikan dan kesehatan, hingga penindasan kebudayaan dan nilai-nilai luhur serta pembunuhan terhadap orang tak bersalah. Sebagai manusia *zoonpolitikon* mendobrak ketimpangan sosial yang terjadi karena sistem yang keliru, mendobrak kebiasaan yang memarginalisasikan dan memiskinkan orang lain adalah suatu keharusan.

Kesimpulan

Terwujudnya Papua tanah damai mesti disertai dengan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran hanya bisa terjadi jika adanya suatu pemahaman yang menyeluruh dan tak terpisah-pisah dalam semua aspek kehidupan. Kesadaran sebagai makhluk politik- *zoonpolitikon* menjadi penting dalam kehidupan bersama. Tanpa kesadaran tersebut, tidak akan ada usaha konkret dari semua pihak bagi terwujudnya *bonum commune* di Papua.

Daftar Pustaka

- Koten, Kelabu Yoseph. 2010. *Partisipasi Politik. Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalero
- Rangga, Alexandro. F. 2018. *Fenomena Papua, Esai-Esai Sosial*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- 2020. *Tindakan Politik Bagi Orang Papua*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- Renwarin, Bernardus. 2017. *Termarjinalisasi Kelapa Sawit- Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Tebay, Neles. 2008. "Mendalami Ajaran Gereja tentang Hak-hak Asasi Manusia" dalam *Limen. Jurnal Agama & Kebudayaan*. Vol. 4, No. 2, April 2008, halaman 69. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

Memoria Resurrectionis berkomitmen untuk mencatat kebangkitan: upaya-upaya pemulihan, perlawanan yang bermartabat, dan gerakan-gerakan sosial yang menyalakan harapan. Ia adalah ruang bagi ingatan yang menyembuhkan, bukan sekadar mengenang, tetapi menghidupkan kembali martabat dan kekuatan orang Papua dalam membangun masa depan yang damai dan adil.

Edisi pertama ini secara khusus memberi ruang bagi suara orang muda Papua. Tulisan-tulisan mereka, yang semula tersebar dan berisiko tercecer, kini dikumpulkan dalam satu buku sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka berpikir, merumuskan, dan menyuarakan gagasan tentang perdamaian dari sudut pandang generasi muda. Di dalamnya, kita menemukan refleksi kritis, harapan yang jujur, dan semangat untuk membumikan damai dalam konteks sosial, budaya, dan politik Papua yang nyata.

Buku ini bukan sekadar antologi artikel. Ini adalah testimoni kolektif tentang bagaimana orang muda Papua memaknai dan mengupayakan perdamaian. Di tengah tantangan struktural dan sejarah panjang konflik, mereka memilih untuk menulis, berdialog, dan membangun narasi alternatif. Ini adalah bentuk produksi pengetahuan yang tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga strategis secara kultural dan spiritual.

